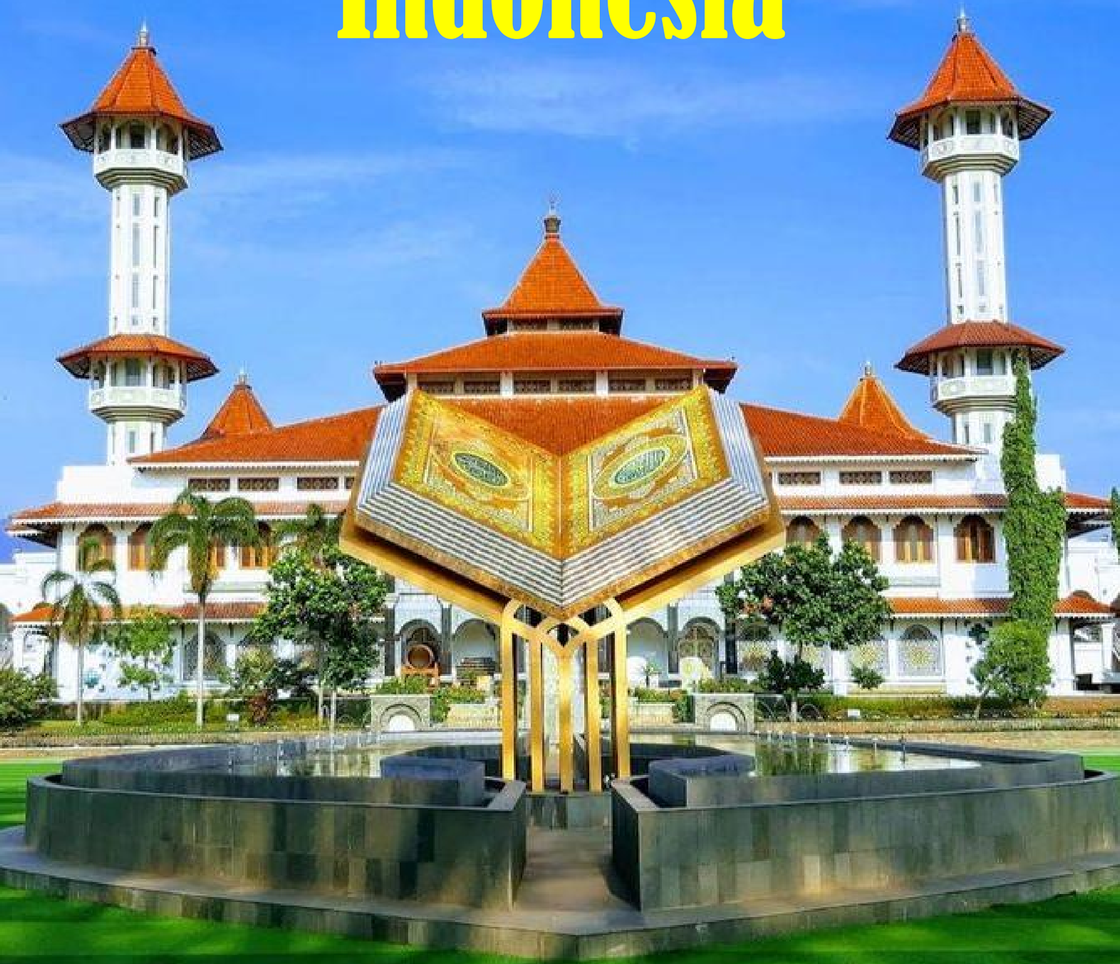
Arah Baru Peradaban Islam Indonesia



Ahmad Zainuri

Pohon Tua Pustaka


BHINNEKA TUNGGAL IKA

Arah Baru Peradaban Islam Indonesia

Ahmad Zainuri

ARAH BARU PERADABAN ISLAM INDONESIA

Ahmad Zainuri

PENERBIT POHON TUA PUSTAKA

VILLA BANGUNTAPAN ASRI 3, BANGUNTAPAN BANTUL, DIY

PERANCANG SAMPUL & PENATA LETAK

Bahrul Ulum

ISBN

978-623-6643-29-7

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan sehat dan manfaat waktu yang begitu luar biasa, sehingga saya dapat menyusun buku **“Arah Baru Peradaban Islam Indonesia”** ini sebagai bahan bacaan untuk para pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, guru, dosen, maupun pendakwah Islam serta para penggemar buku. Buku yang penulis rajut ini merupakan buku karya monumental yang sudah menginjak buku keempat dari penulis. Semoga buku ini bisa memberikan sebuah sumbangsih literasi dunia Islam sebagai rujukan yang insyaAllah berkah dan bermanfaat. Sholawat serta salam kan terus tercurahkan pada Nabi Muhammad *Shalawallahu ‘alaihi wassalam*, nabi yang membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benerang yakni, *ad-dinul islam.* Dan nabi yang kita harapkan semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita juga bisa mengamalkan ajaran sunnah rosul dan setiap tingkah lakunya yang baik.

Dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu memberi dorongan kepada penulis untuk tetap semangat berkarya, apapun karya itu semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mendorong penulis untuk terus berkarya menulis buku sebagai sumber bacaan harian. Terima kasih juga pada media sosial yang selalu mendorong untuk semangat menulis. Terima kasih juga pada dosen-dosen penulis yang selalu memberikan semangat mental untuk terus menulis. Dan terima kasih untuk seseorang yang selalu memberi semangat batin kepada penulis untuk terus berkarya.

Konsep dan makna yang dapat penulis iriskan dalam buku ini ialah titik temu yang bisa memberikan lentera satu sama lain akan kehadiran

beberapa kelompok-kelompok Islam di Indonesia ini untuk saling bisa memberikan ruang edukasi dan ruang perjumpaan yang indah dan menyapa. Bukan hanya intraagama, akan tetapi antaragama di Indonesia harus bisa memberikan pelangi yang indah, meski pernah bersedih, tapi harus bisa tampilkan warna dan secercah harap dan cita untuk bisa saling harmoni dan toleransi. Perbedaan bukan menjadi gerbang penghalang bagi hadirnya multimadzhab Islam di Indonesia. Persinggungan yang masih saja ketat ialah perjibakuan antara sisi agama dan negara, sistem demokrasi dan ulasan kelompok-kelompok Islam yang mempunyai pandangan berbeda akan sebuah amalan pada setiap kelompoknya.

Dan ada ulasan seklumit mengenai sejarah Islam di Indonesia yang penulis angkat, kenapa? Karena penulis ingin menampilkan beberapa fundamentalitas kekuatan Islam yang sudah sejak dahulu lahir dengan sistem monarki Islam, yang mana bisa memberikan kemaslahatan bersama, keharmonisan antarpemeluk dan antargolongan. Sehingga dibawa ke era yang semakin beradab dan digital ini, sengaja penulis tampilkan menjadi bagian bab yang tak terpisahkan sebagai fragmen dasar dalam memaknai Islam dan persinggungannya dengan negara. Dengan lahirnya buku ini, semoga bisa menjadi secuil wawasan yang bisa memberikan arah baru dalam melihat konsepsi Islam dan peranannya dalam arus dunia yang semakin digital. Buku ini semoga berkah dan manfaat untuk semua golongan, Aamiin.

Jember, 04 Januari 2021

Ahmad Zainuri

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang indah, ramah dan santun harus bisa menjadi sebuah cahaya yang bisa memberikan pancaran keberbagai arah. Konsepsi yang paling arif dan bijak ketika persinggungan akan sebuah distinsi yang masih saja bergulat menjadi retorika yang bergumul dan dialektika yang mendogma. Kemenangan yang menjadi titik akhir dan titik temu harusnya bisa diejawantahkan menjadi sebuah ulasan yang melebur keberbagai arah dan komponen Islam. Seringnya perdebatan yang bisa menimbulkan percikan api pertengkaran ialah prosesi uji pikir dan mental yang keras dan inginnya menang sendiri. Keilmuwan yang harusnya dibantah dengan keilmuwan, bukan malah dengan kekerasan dan fisik. Terutama pembahasan kelompok-kelompok Islam yang mempunyai madzhab dan pandangan yang berbeda, itu bisa menimbulkan sebuah metode dasar yang berbeda pula ketika makna arif dan santun tidak tersampaikan. Keawaman tentang Islam dan beberapa keilmuwannya, seringkali dibawa kearah yang ekstrim dan eksklusif.

Islam di Indonesia harus bisa menjadi Islam yang *wasathiyah* dan bisa bermoderasi akan sebuah multikulturalitas dan pluralitas yang ada. Lokus yang komprehensif bukan kebenaran yang diutamakan tapi diskusi dan pandangan yang berfundamen ialah sebagai rumus berdirinya kesahajaan dan kekuatan negeri ini. Terutama antara agama dan negara masih saja menjadi ulasan abadi yang tak akan ada ujungnya. Paradigma yang keseringan terlontarkan ialah antara sekular dan Islamis. Konsepsi sistem pemerintahan di Indonesia harus bisa menjadi jalan tengah untuk bisa saling memberikan keadilan satu sama lain, bukan individualitas dan komunalitas. Rekonsiliasi dan reaktualisasi konsepsi dasar keislaman yakni

niat ialah kunci utamanya, harus terinterpretasikan menjadi aksi yang ternobatkan oleh diri sebagai ejawantah kondisi.

Negeri ini dengan majemuknya penghuni, bukan kesemena-menaan yang kemudian dinjukkan. Ketika sistem sekular diterapkan di Indonesia, mana mungkin bisa dengan mayoritas di negeri ini ialah Muslim. Apakah kemudian menggunakan sistem pemerintahan syariah/khilafah, mana mungkin juga dengan melihat bahwa agama di Indonesia ada 6 agama termasuk Islam dan beberapa kepercayaan lokal. Apakah kemudian bisa menerima kehadiran sistem yang menekankan dari nilai-nilai satu agama, tapi abai akan agama lain dan makna kemaslahatan humanitas di Indonesia?. Harusnya bisa memahami seluruh lapisan dan kelompok yang bringas akan mendirikan sebuah konsep-konsep yang sulit diterima oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Suatu sistem demokrasi akan terwujud jika didukung oleh ketiga unsur dalam sebuah negara, yakni adanya kemauan politik dari negara (*state*), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*politcal society*) dan adanya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat dan mandiri.

Kemudian, keberbedaan sebuah tafsir akan tekstualis dan kontekstualis menjadi sebuah rujukan agama yang memberikan perdebatan antarkelompok Islam. Islam di Indonesia hadir dengan beberpa jalan yang pastinya multi, dalam artian banyak kelompok-kelompok Islam yang lahir dengan jargon Islam modern, tradisional, revisionis, universal dan macam lainnya yang hanya sebatas ambivalensi-kultural dan menanggap realitas dan hanya sekilas pun akan terbias. Ada beberap kelompok yang tidak setuju dengan penafsiran menggunakan konsep kontekstual, yakni dengan melihat realitas dan kondisi keadaan masyarakat yang ada, karena teks pada dasarnya sudah mati dan dihidupkan dengan adanya membawa teks keluar dan mengejawantahkan dengan kondisi, sehingga konsep tersebut disebut

kontekstual. Namun, juga banyak kelompok yang masih tidak setuju, karena pandangan skriptaulisnya sudah mengakar dan tidak tidak mau untuk bersinergi, karena dianggap ada sebuah indovasi baru dalam berislam.

Dalam Zuhairi menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai wahyu sering kali dipahami oleh sebagian kalangan sebagai teks yang tidak bisa dikomunikasikan dengan realitas. Selalu ada ketegangan antara yang langit dan yang bumi. Adonis menerangkan, selalu ada upaya memisahkan antara yang tetap dan yang berubah, yang tetap dianggap final, sedangkan berubah harus mengacu kepada yang tetap, itulah wahyu.

Dalam sisi dan makna toleransi setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama,* mengakui perbedaan dan keragaman. Al-Quran banyak menjelaskan tentang hal tersebut secara terang-menderang. Allah menciptakan manusia ke dalam dua ragam jenis kelamin; laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (QS Al-Hujurat 13: 43). Dari sini saja, kita dapat memahami bahwa sejak awal penciptaan manusia, Allah telah menjadikan karakter yang paling menonjol bagi manusia. Fenomena negara-bangsa dan multikulturalisme telah menjadi perhatian Al-Quran. Tuhan menegaskan, realitas sosial yang akan terjadi bagi umat Islam dan umat agama-agama lain di kemudian hari. Pada waktu ayat tersebut diturunkan, fenomena negara-bangsa dan etnisitas tidak berkembang pesat seperti sekarang ini. Akan tetapi uniknya, Al-Quran sudah menegaskan tentang fenomena tersebut. Di sini perbedaan dan keragaman harus mendapat perhatian khusus sebagai sebuah kesadaran terhadap fenomena sosial makhluk ciptaan Allah. (Misrawi, 2017, hal. 10).

Dalam konteks agama-agama, yang harus menjadi pijakan adalah kesadaran tentang keragaman syariat. Sebagai jalan menuju Allah, syariat disebutkan dalam Al-Quran tidak hanya satu. Setiap umat mempunyai

syariat yang bertujuan untuk menguji mereka dan berpacu dalam kebaikan. Allah sebenarnya mempunyai kekuasaan untuk menjadikan syariat dalam satu bentuk. Tapi Dia memilih untuk menjadikan aneka ragam syariat agar setiap hamba-hamba-Nya memilih yang sesuai dengan kehendak hati nurani dan akal budinya (QS Al-Maidah 5: 48). Dari makna ayat al-Maidah tersebut bahwa akal budi merupakan salah satu anugerah Allah kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya.

Dalam hal ini keragaman agama merupakan salah satu ayat Allah yang paling nyata di muka bumi. Setiap umat mempunyai keyakinan dan tata caranya sendiri. Kristen dan Yahudi mempunyai ajaran tentang sembayang, puasa dan zakat. Tapi perihal tata cara pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi masing-masing. Perbedaan dan keragaman sesugguhnya tidak hanya dalam ranah agama-agama. Dalam ranah intraagama pun terdapat keragaman dan perbedaan yang tidak kalah. Dalam Islam sendiri tercatat ratusan aliran, gerakan dan madzhab. Perbedaan dan keragaman tersebut ialah memperkaya khazanah keislaman. Dari sudut pandang positif, keragaman tersebut sebenarnya mempertegas perlunya dialog dan kompetisi dalam konteks kebaikan bukan hujatan.

Di sini, perbedaan dan keragaman merupakan fakta yang harus diterima sebagai *sunatullah*. Allah menciptakan semua ini dengan hikmah dan maksud yang amat mulia. Bukan hanya itu, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah menciptakan alam raya ini beranekaragam. Allah menciptakan bumi dalam bentuk gunung-gunung yang tak tergoyahkan dan sungai-sungai yang jernih (QS. Ar-Ra'd 13: 3). Allah yang menciptakan perbedaan dalam warna kulit dan bahasa (QS. Ar-Rum 30: 20). Perbedaan dan keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang telah dititahkan oleh Allah kepada setiap makhkuk-Nya. Tidak hanya sekadar perbedaan

antaragama, inttraagama, tetapi juga perbedaan dan keragaman di hampir semua makhluk di muka bumi: gunung, sungai, buah-buahan dan lain-lain. Semua itu, menurut Al-Quran agar menjadi ayat-ayat Allah di muka bumi, sehingga setiap manusia yang dikaruniai akal budi dan hari nurani dapat berpikir tentang rahasia di balik semua itu. Selanjutnya setiap manusia dapat mengembangkan budaya tafsir yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. (Misrawi, 2017, hal. 11).

Kedua, mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) dan koeksistensi (*al-ta'amul al-silmi*). Langkah ini merupakan langkah lanjutan yang mesti menjadi perhatian utama setiap Muslim. Mengakui perbedaan dan keragaman adalah niscaya. Akan tetapi hal tersebut akan kurang sempurna bila tidak dilengkapi dengan upaya mencari titik temu dan koeksistensi. Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw dalam rangka mengajak *ahlul kitab* untuk membangun titik temu, terutama dalam rangka menyembah dan menyerahkan diri kepada Allah secara total. Tentu saja penyerahan diri secara total kepada Allah tidak semata-mata dalam rangka teologis, melainkan juga dalam kerangka sosiologis.

Bila titik temu dengan konsep *kalimatun sawa'* dalam konteks keindonesiaan, maka akan menemukan momentumnya. Pancasila merupakan *kalimatun sawa'* di antara agama-agama yang ada di bumi pertiwi ini. Tatkala semua agama menerima sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa,* sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara, sesungguhnya semua agama mempunyai komitmen pada ketauhidan yang sama. Ketauhidan tersebut pada akhirnya diterjemahkan dalam konteks kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi spirit untuk membangun paradigm kewarganegaraan yang berlandaskan kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Maka dalam rangka

membangun titik temu dan koeksistensi, umat Islam senantiasa diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar menggunakan dakwah yang toleran (QS. An-Nahl 16: 125). Artinya, jalan menuju kerjasamadan koeksistensi tidak akan tercapai bilamana praktik dakwah dan dialog keberagamaan disampaikan dengan cara-cara yang ekstrem. (Misrawi, 2017, p. 12).

Bila agama-agama saja dituntut untuk membangun titik temu, apalagi dalam konteks intraagama. Sudah hampir dipastikan, titik temu dan koeksistensi agar senantiasa diperhatikan oleh umat Islam. Sebab, titik temu dalam intraagama merupakan titik tolak untuk membangun titik temu dalam antaragama dan antarperadaban. Allah menegaskan dalam Al-Quran, *sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka hendaklah kalian membangun rekonsiliasi di antara saudara-saudara kalian* (QS. Al-Hujurat 49: 10). Dalam ayat sebelumnya, dijelaskan secara gamblang, perseteruan tidak hanya terjadi di antara kalangan Muslim dengan non-Muslim. Akan tetapi yang amat memperihatinkan adalah terjadi di antara sesama umat Islam. Karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar setiap umatnya membangun persaudaraan, toleransi dan solidaritas.

Melihat Islam sebagai paradigma kemanusiaan membutuhkan sebuah pedekatan yang bersifat distingtif. Artinya, bila selama ini Islam lebih sering dilihat dengan kacamata dogmatik dan doktrinal, maka sebaiknya Islam dilihat dengan kacamata kesejarahan. Pergulatan doktrin dengan sejarah menjadi titik tolak untuk menyingkap dimensi humanitas dalam Islam. Di sini sebenarnya akan terkuak sebuah problem yang amat mendasar dalam studi Islam sedari dulu hingga sekarang, bahwa dalam masa yang cukup lama studi keislaman mengasumsikan kebenaran sebagai produk pemahaman terhdap teks. Seolah-olah disimpulkan: tidak ada

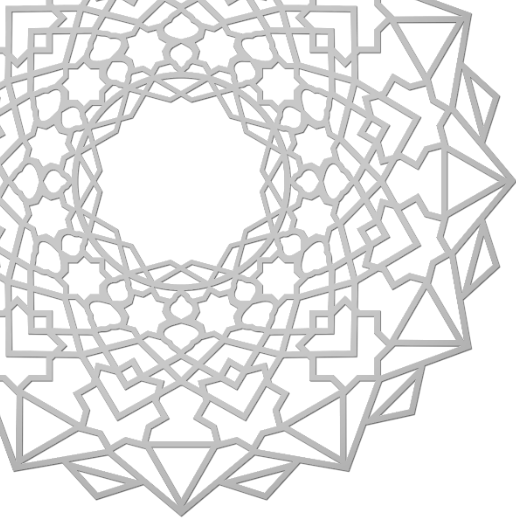
kebenaran diluar teks. Teks sudah menjadi embarkasi pemahaman keagamaan sekaligus terminal akhir sebuah kebenaran. Klaim kesempurnaan dan keparipurnaan Islam selalu merujuk kepada kesempurnaan tekstual. (Novriantoni, 2004, hal. 21).

Pada aras ini, tentu saja penalaran tekstual menjadi tekstualisme dan sikap tekatualis. Di sini, kita harus mengambil langkah yang adil dan bijaksana, bahwa sebagai sebuah pendekatan, pemahaman tekstual harus mendapatkan porsi yang semestinya, tidak lebih dan tidak pula kurang. Pemahaman tekstual hanya bisa menjelaskan ruang teks. Artinya, setiap teks mempunyai makna literal yang perlu diungkap untuk menyingkap makna awal yang mewujud di dalamnya. Sebagai sebuah makna, tentu saja harus diapresiasi. Karena itu, sebuah pemahaman yang tidak menggunakan ukuran-ukuran kesejarahan amat memungkinkan pemahaman yang ekstrim, komunal dan eksklusif. Alih-alih Al-Quran sebagai petunjuk (*hudan*), pembeda (*furqon*), dan penjelas (*tibyan*), justru sebaliknya Al-Quran menjadi pesan keagamaan yang berwatak provokatif dan menciptakan ketegangan yang bersifat permanen. Misalnya, dalam hubungan antaragama, seringkali muncul sikap anti-toleran dan konfrontatif dengan agama non-Islam karena didasari oleh ayat: *Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela membiarkanmu, sehingga kamu mengikuti ajaran mereka.* (QS Al-Baqarah 2:120). Tentu saja, pemahaman tekstual di atas menyimpan problematika serius, karena akan menuai dampak yang amat buruk bagi masa depan kemanusiaan, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antaragama. Keragaman agama yang merupakan sebuah keniscayaan dan bahkan *sunatullah* harus berada dalam bayang-bayang konflik yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, dalam rangka menyingkap makana yang lebih kontekstual dan mampu menyelami

substansi yang menjadi intensitas teks, diperlukan pembacaan yang serius terhadap *sabab al-nuzul.* (Novriantoni, 2004, hal. 24).

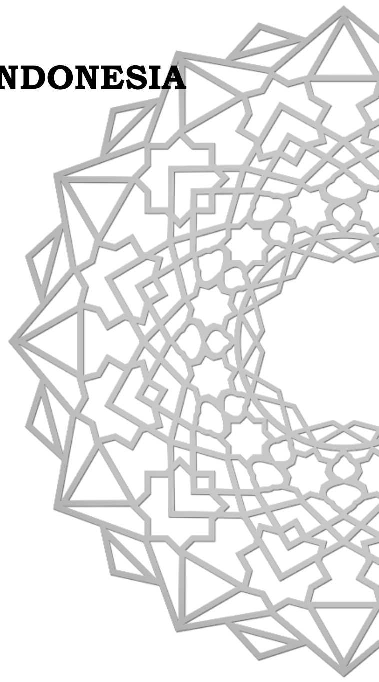
Dalam hal ini, kita perlu mempunyai kesadaran baru, bahwa konsep *sabab al-nuzul* bukanlah konsep yang statis. Artinya, upaya untuk merujuk terhadap sebab-sebab turunnya teks tidak hanya bersandar pada *sabab al-nuzul* yang sudah dikodifikasi ulama terdahulu, melainkan mendasari pada realitas kekinian, sehingga dengan upaya demikian terjadi rekontekstualisasi. Ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran berhadapan dengan kondisi sosio-historis tertentu, maka tak terelakkan saat ini Al-Quran pun berhadapan dengan problema kemanusiaan yang jauh lebih rumit. Karena itu, pembacaan terhadap *sabab al-nuzul* tidak hanya bersandarkan konsep lama yang telah tersedia, melainkan bisa membaca problem kekinian secara seksama, sehingga mampu menguraikan makna yang tersedia dalam teks secara jelas. Pada dasarnya, teks itu diam, otonom dan tidak berbunyi, akan tetapi yang membuat teks tersebut berbunyi adalah manusia sebagai penafsir terhadap teks. Di sinilah arti penting subyektifitas penafsir dalam mencari makna yang tersimpan dalam teks.

Buku ini tersusun dengan adanya beberapa poin-poin untuk mengurai akan sebuah narasi yang sedang disampaikan kepada khalayak. Semoga buku ini bisa memberikan sebuah manfaat kepada setiap pembaca dimanapun kalian berada. Selamat membaca….!!



BAB I

ARAH BARU MASA DEPAN INDONESIA



Melihat Indonesia yang sudah rapuh lama dengan kungkungan para muda-mudinya yang enggan menyambut kemerdekaan Indonesia dalam arah baru menuju kebangkitan Indonesia. Sumber daya manusia yang sewajarnya perlu menjadi pengembangan dan penyeimbang dalam membangun Indonesia yang lebih berkemajuan. Banyak sisi di mana Indonesia harus mengambil peran penting dalam mengejawantahkan beberapa problem lokal maupun nasional yang kini kian parah. Adanya kesakralan pandemi ini, pun jangan berhenti dalam membangun potensi-potensi Indonesia dari seluruh lini untuk menjawab beberapa tantangan era yang semakin canggih. Indonesia harus membangun sisi manapun untuk saling bersinergitas antara satu dengan yang lain. Komponen-komponen harus saling berinovasi dan berkreasi untuk merajut Indonesia yang semakin terarah.

Dari segi penududuk Indonesia yang berjuta-juta umat singgah di ribuan pulau ini, atas budaya, agama, suku yang lahir di negeri ini. Kemajemukan merupakan realitas yang tidak bisa kiita pungkiri untuk mencari sisi di mana untuk saling merekatkan. Membangun Indonesia tidak terbaboni hanya seraus yang satu irama, tapi makin banyak irama yang menjadi refrensi dalam membangun Indonesia, semakin komprehensif pula bekal masa depan Indonesia. Bangsa bangga akan kemajuan masa depan negara tanpa adanya kebijakan yang menjauh dari visi misi utama untuk membangun kemashalatan, kesejahteraan masyarakat. Mujamil melaporkan bahwa apabila rakyat sejahtera secara otomatis negara pun akan ikut sejahtera. Iran terdapat tokoh yang amat sangat luar bisa yang menjadi walikota, presiden tetap dengan gaya yang sederhana, yakni Mahmod Ahmadinejad. Indonesia yang di harap-harap seperti negara yang di pimpin oleh Lee Kuan Yeuw, Mahathir Mohammad dan Xiaoping.

Indonesia harus bisa bangkit dari keterpurukan ini dengan memanfaatkan sumber daya alamnya dan bersinergitas dengan sumber daya manusianya. Indonesia harus menyongsong arah baru yang semakin bertingkat dan perlunya berijtihad. Yusuf Qardawi mengatakan tajdid ialah bisa lahir dari beberapa kumpulan (organisasi). Dalam mengentaskan problem Indonesia, perlu kemudian Indonesia menatap arah baru dalam kemajuan Indonesia, ada sisi strategis pemikiran yang perlu kemudian Indonesia frame sebagai arah baru menuju Indonesia berkemajuan, *pertama,* membangun pemikiran inovatif-konstruktif, karena pemikiran ini berperan mempercepat gerak dinamika kemajuan Indonesia. *Kedua,* membudayakan tindakan kreatif-produktif, tindakan akan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di samping intelektual, sosial dan budaya. *Ketiga,* menciptakan kebijakan yang strategis-transformatif, kebijakan ini berperan menciptakan peluang-peluang baru dan lapangan kerja baru dalam menjawab sumber-sumber pendapatan ekonomi masyarakat. *Keempat,* melaksanakan pembangunan secara kolektif-sinergis, strategi ini untuk menggerakan kemajuan negara Indonesia secara serentak dan massal.

Arah baru untuk Indonesia yang lebih merdeka ialah sebuah kepatutan yang sangat di haruskan. Kenapa? Pasalnya sebuah proyek yang sudah berdiri mampang yang sudah terurai rapi, tapi sebuah kerja nyata ialah tiada hasil yang begitu memuaskan. Sehingga kesinergitasan antara satu dan yang lain harus saling bersatu dalam membangun Indonesia yang berperadaban. Aras lokal mengharap sebuah santunan yang masif akibat dari dampak pembangunan-pembangunan proyek yang menimpa masyarakat bawah. Seperti pembangunan pabrik semen di daerah Rembang yang berlangusng menuai konflik, karena masyarakat mengharapkan sebuah keadaan alam yang tetap asri dan hijau, karena tidak ingin menjadikan lingkungannya menjadi lingkungan yang kumuh dan kotor akibat dari ulah

perusahaan yang kurang memperhatikan hasil produksi. Seperti kasus proyek lapindo yang hari ini masih berjalan, dan anehnya menjadi sebuah lahan pariwisata. Nyatanya bahwa kasus lapindo tersebut ternyata ironis, karena daerah yang dekat sekali dengan bendungan,bau belerang. Namun, keuntungan mereka bisa merasakan gas gratis, tanpa membeli gas elpiji sebagai bahan bakar untuk memasak.

Kesinergitasan memang sangat perlu untuk di terapkan dalam arah manapun untuk membangun Indonesia yang lebih berarti dan bermakna ke depan. Antara pemerintah, pengusaha, intelektual dan lainnya harus bisa bersinergi dalam meneropong Indonesia kedepan dengan arah baru yang berkemajuan dengan menciptakan peradaban-peradaban baru yang maju. Sisi ekonomi menjadi sebuah kendalam besar untuk negeri ini. Membincangkan ekonomi yang dengan adanya pandemi ini menjadi salah satu penurunan yang masif. Banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan karena sebab pandemi dan gaji/upah yang tidak menjangkau dengan adanya karyawan yang masih banyak tersebut. Sehingga solusinya daripada itu banyak perusahaan yang harus memberhentikan karyawannya sebagai solusi untuk perusahaan.

Sehingga bagaimana arah baru Indonesia dalam meneropong dari sisi ekonomi masyarakat aar bisa tetap terjaga dana maju yang semua pasti terdampak pada ekonomi negara. Ada beberapa konsep yang penulis tawarkan, yakni *pertama,* dengan menciptakan ekonomi kreatif-inovatif. Dengan ekonomi kreatif-inovatif ini diharapkan mampu bisa meneropong arah kedepan dalam sisi ekonomi kreatif. Dengan adanya inovasi baru bisa mampu berjalan sinergis pula arah kedepan dalam membangun ekonomi kreatif di aras lokal. Patokannya ialah mereka mampu mengembangakan ekonomi tersebut ialah untuk kesejahteraan ekonomi masing-masing. *Kedua,* menciptakan ekonomi kreatif-produktif. Seperti yang di ungkapkan

Mujamil bahwa ekonomi harus bisa kreatif dan produktif. Belum yang kreatif akan menciptakan secara produktif, dan sebaliknya yang produktif pun belum tentu menciptakan sesuatu hal yang kreatif, sehingga keduanya harus saling sinergi. *Ketiga,* membangun daya sentral ekonomi kreatif. Dengan membangun sentral ekonomi kretif akan menjadikan salah satu pusat pengembangan daya cipta ekonomi yang mumpuni. Suatu daerah dengan memberdayakan ibu-ibu, pemuda untuk saling sinergi dalam membangun ekonomi kreatif sehingga tercipta pembangunan ekonomi pada masyarakat tersebut secara merata. Sehingg daya kompetitif dalam masyarakat tersebut menjadi daya kooperatif yang saling mendukung satu sama lain.

Promotor dari pada ekonomi kreatif tersebut ialah, dari ketiga-tiganya ialah letakkan dasarnya pada pemuda. Yang muda sekarang harus bisa yang maju, yang bergerak, yang mendemo dan yang merajut. Sehingga arah baru masa depan Indonesia nampak nyata siapa yang bergerak dan siapa yang menjadi promotor atas kemajuan bangsa ini, ternyata mereka ialah seperti yang dijanjikan oleh bapak proklamator kita yaknji Soekarno, berilah aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Pemberdayaan tersebut menjadi arah baru dalam membingkai kemajuan Indonesia untuk meretas telur-telur revolusi yang baru dan berkemajuan dengan peradaban yang bercorak pembaharuan. Reaktualisasi nilai-nilai kemasyarakatan yang menjadi norma kultural harus bisa tumbuh dengan pembaharuan-pembaharuan yang berkemajuan. Jangan terlalu menjumudkan pemikiran dalam arah yang terkungkung akan keadaan serba lurus. Namun, kalau bisa mencipta dan mendayagunakan atas apa yang Tuhan ciptakan bisa menggunakan penuh dengan kepositifan, kenapa tidak.

Arah baru untuk masa depan Indonesia bukan hanya pada sisi ekonomi, tapi bagaimana sisi yang lain mampu bisa bersanding sejajar

dalam membangun bersama untuk arah baru Indonesia kedepan dengan gebrakan-gebrakan dan inovasi baru untuk Indonesia yang lebih berperadaban dengan kemajuannya. Di sini harus adanya kesinergitasan, kembali oleh penulis ungkap karena memang butuh daya sinergi antara semua lini. Mungkin mengungkapkan pemikiran Mujamil bahwa jangan hanya terfokus pada ranah di mana semua lini sedang sibuknya menggali sebuah prestasi. Prestasi memang menjadi sebuah keunggulan dalam meningkatkan daya diri, terutama untuk apresiasi diri atas apa yang telah di cipta. Namun, dalam aras nasional pembangunan bahwa secara prestasi juga harus mampu di teropong bagaimana arah ekonomisnya, sehingga prestasi berbanding lurus dengan daya ekonomisnya. Penghambatan dalam kemajuan bangsa dan negara karena antara pencapaian prestasi dan ekonomi, prioritas dan kecenderungan populer, pengembangan program sama-sama baik, serta jenis kebutuhan keahlian dan penyiapan jenis sekolah tidak pernah sinergis, akhirnya berjalan sendiri-sendiri dan tidak bersinggungan. (Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara, 2012, hal. 243).

Terutama bidang pendidikan, pemerintah harus bisa membangun kesadaran seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam bidang ekonomi harus mampu mencetak para pengusaha profesional sebanyak-banyaknya untuk merintis dan membuka jalur-jalur perekonomian yang semakin luas. Dalam bidang sains dan teknologi, merangsang para ilmuwan untuk menggali temuan-temuan ilmiah yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, serta menghargai mereka. Dalam bidang politik, mengedepankan etika berpolitik dengan cara menonjolkan program masing-masing partai dan calon pejabat. Dalam

bidang pemerintahan, mengembangkan paradigma bahwa pejabat adalah pelayana masyarakat dengan target memberi kepuasan kepada masyarakat.

Dalam bidang hukum, menyerahkan semua keputusan kepada pihak penegak hukum, tanpa melalui intervensi dan jangan menggunakan hak-hak sendiri untuk mengadili atas apa yang telah dibuat oleh masyarakat. Dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, melindungi artefak-artefak kebudayaan daerah dari pencurian pemerintah negara asing maupun oknum warga negaranya secara individual. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, memperkuat pertahanan terutama di daerah perbatasan dengan negara-negara lain. Yang sebenarnya bahwa untuk menciptakan kebijakan yang strategis-transformatif, tidak hanya monopoli kewenangan pemerintah. Siapa pun memiliki kekuatan dan kekuasaan memimpin dan membawahi orang banyak, dia layak untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis-transformatif yang berorientasi pada penjaminan kesejahteraan mereka secara produktif jangka panjang.

Membangun era yang sudah lama rapuh dengan beberapa nawacita Indonesia yang sudah sudah nampak tidak berjalan pada koridornya. Sehingga membangun era baru indonesia yang berkemajuan menjadi sebuah jalan pintas-startegis dalam memangun era baru Indonesia yang berperadaban. Indonesia yang sebenarnya menjelang era abad yang sudah beberapa dekade ini hingga kemerdekaan Indonesia bisa dinikmati hingga 75 tahun. Namun, apakah kemudian rakyat dan bangsa merasa sudah terpenuhi segala aspek yang dibutuhkan bagi rakyatnya. Aliansi-aliansi yang hadir di negeri ini mulai dari kaum buruh, pedaganag, petani yang mana mereka menyuarakan beberapa aspirasi yang harus perlu turun ke jalan. Bahwa sebenarnya aspirasi tersebut sudah dititipkan kepada wakil-wakil rakyat, tapi kenyataannya aspirasi yang dibawa tidak sampai di mana harus terealisasi. Namun, dengan adanya kebebasan berpendapat di muka

umum, berdemonstrasi ialah salah satu bukti bahwa negara memberikan ruang-ruang untuk rakyat bersuara, meskipun itu sepertinya terlalu riskan dan brutal.

Namun, kalau ketika membandingkan dengan negara tetangga yakni negeri Jiran bahwa Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan untuk menumpahkan pikiran-pikiran ke muka umum. Mengutip Mujamil bahwa terdapat hal-hal tertentu yang menegaskan bahwa Indonesia justru lebih bergerak maju daripada negeri Jiran, seperti dalam persoalan demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas agama dan budaya, kebebasan intelektual, liberalisme pemikiran, pengetahuan dan kebudayaan dan sebagainya. Susilo menuturkan dalam Mujamil bahwa sejuta persoalan pascadeklarasi kemerdekaan 1945 justru menjadikan pengalaman Indonesia semakin kukuh, berkualitas dan lengkap. Di Malaysia, kebebasan intelektual dibungkam. Para kandidat mahasiswa dipaksa menandatangani perjanjian untuk menghindari kegiatan politik dan bersedia dikeluarkan bila kegiatan itu terjadi. Professor Chandra kehilangan jabatan di Universitas Malaya lantaran selalu mengkritik pemerintahan Mahathir Mohammad. Ini menandakan bahwa perkembangan ilmu sosial-humaniora tidak sepesat pembangunan ekonomi dan teknologinya. (Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara, 2012, hal. 196).

Sehingga bagaimana kemajemukan yang ada di negeri ini menjadi sebuah keberkahan yang terus bisa menjalin keharmonisan. Setidaknya kemajemukan ini bisa menjadi salah satu sisi di mana umat agama di Indonesia maupun di luar sana bisa terus memahami sebuah konsep sederhana yakni, di mana bisa terus menghadirkan sisi kebermaknaan, kemanfaatan dan keberkahan dalam setiap lini kehidupan, terutama menyoal keberagaman. Sehingga ketika umat agama di Indonesia mampu

duduk bersanding damai, menjadikan kehidupan ini sejuk dan harmonis. Sistem kepemimpinan bisa berjalan dengan indah pula, sehingga jangan mencoba membawa semua agama menjadi arus perbincangan pergulatan kontestasi politik negeri. Indonesia yang majemuk, pun sistem pemerintahannya, bingun antara konsep negara dan agama. Menimbulkan pelik yang runyam dengan geliat-geliat permusuhan dalam selimut, mereka bergerak pada kepraktisan politik. Sehingga pergumulan dan perbincangan mengenai negara dan agam juga menjadi sebuah bab penting ketika harus disandingkan dengan pola kemajemukan agama yang ada di Indonesia ini, bagaimana ruang gerak para elit adama dalam meneropong jauh persoalan pelik yang ada pada aras nasional dengan ragam simbol agama menjadi permainan demi kursi pemerintahan. Sehingga akan penulis ulas mengenai beberapa gagasan tentang negara dan agama dalam pergolakan arah demokrasi Indonesia pada uraian di bawah ini.

Pergolakan Arah Demokrasi Indonesia

Persinggungan antara negara dan agama menjadi sebuah perbincangan yang sangat keren dalam aras intelektual. Negara menjadi sebuah perbincangan yang masih hangat ketika harus di sandingkan dengan uraian agama. Menyandarkan sistem dalam sebuah negara ini menggunakan sistem demokrasi. Ketika harus melihat sistem yang sangat alot dengan kubangan satu sudut pandang, membuktikan bahwa ada satu yang bisa duduk tengger di atas kursi kekuasaan. Menandakan bahwa ada salah satu simbol, bendera yang berkuasa, jaringan ini, kultur seperti ini jangan jadikan sebuah rujukan kemajuan Indonesia di era masa mendatang. Bagaimana bisa maju kalau hanya sebuah jaringan dan satu golongan yang menang dan tanpa memperhatikan yang lainnya, sama saja bukan. Sehingga keberpihakan akan satu arah menjadi sebuah salah satu kejumudan untuk

menyongsong kemenangan dan kegemilangan Indonesia yang tidak mungkin akan tunai.

Kepemimpinan seorang tokoh yang duduk di kursi pemerintahan dan dari usungan bendera-bendera tidak akan pernah meninggalkan cuap-cuap yang pernah di sampaikan itu pada komunitas benderanya. Di tinjau dari sebuah sudut pandang dalam bidang politik negeri bahwa politik negeri masih menerapkan politik simpatisan dan politik keikutsertaan. Mujamil melaporkan, peran pemerintah harus di dasarkan pada realitas bahwa pemerintah seharusnya memiliki *pilitical will* (kemauan politik) dan *political power* (kekuatan politik). Kemauan dan kekuatan politik tersebut saling bersinggungan; ada kemuan politik tetapi tidak didukung dengan kekuatan politik, maka agenda pembangunan tidak jelas. Sebaliknya, ada kekuatan politik tetapi tidak didasari kemauan politik, maka pembangunan tidak jalan, dan pemerintahan yang baik dan bijak ialah mendukung keduanya sebagai perwujudan dari pembangunan yang merata akan dari berbagai aspeknya. (Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara, 2012, p. 227).

Indonesia yang merupakan negara begitu beragamnya politik-politik aliansi yang bernuansa kepartaian. Penyokongan yang kemudian hadir di negeri ini ialah mereka yang akan menduduki kursi pemerintahan apapun itu jabatannya dipastikan ada antek-antek di belakangnya yakni partai politik. Ketika mereka semua sudah tampuk kekuasaan dan menjadi salah satu, katakanlah sebagai wakil rakyat meskipun suara rakyat jarang bisa di dengar. Uraian dari Sembodo dikutip dari Umaruddin Masdar bahwa multipartai merupakan salah satu sistem yang mendasar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis serta lembaga inilah yang mampu menampung aspirasi rakyat dan memberikan pendidikan

politik bagi rakyat. Seperti halnya yang kita semua lihat bersama dalam kampanye partai politik menjelang pemilu sebagai representasi demokratisasi di Indonesia, terutama pada tahun 1999 dan 2004, tak jarang orator-orator handal yang ada di atas panggung untuk berkampanye, mengeluarkan janji-janji politik kepada rakyat.

Pendidikan murah, akses pelayanan kesehatan semakin mudah, bahan makanan juga akan semakin murah, tapi apa yang terjadi? Ternyata rakyat hanya di buai dengan janji-janji palsu politik yang sampai sekarang tidak mampu terealisir. Begitu pula elit politik kita sekarang sudah terpilih sebagai wakil rakyat—DPR, MPR, DPRD—telah melalaikan amanat yang diberikan kepadanya. Akhir-akhir ini kita sering dengan suara-suara dari aras bawah yang memperjuangkan suara rakyat, baik mahasiswa, petani, pedagang karena merespon berbagai persoalan yang muncul kepermukaan, akibat kebijakan yang tidak seimbang (*missbalance*). Namun, demonstrasi hanyalah demonstrasi dan aspirasi hanya sebagai slogan kosong yang hanya menempati dinding-dinding ruang kotor yang megah yang mereka wakil rakyat tempati. Sebenarnya niat utama mereka terpilih dan dipilih menjadi wakil rakyat ialah menyampaikan aspirasi rakyat, tapi kenyataannya ialah mereka malah membungkam suara harapan rakyat. Dikutip Sembodo, Sindhunata menjelaskan istilah politik negeri ini ialah politik anti ketulusan. Partai politik hanya dijadikan sebagai sebuah kendaraan untuk meraih kekuasaan, ketika mereka sudah meraihnya dan tampuk kekuasaan mereka akan merauk untung sebanyak-banyaknya untuk mengembalikan hasil dari jerih payah selama mereka demontrasi, kampanye, sehingga bagaimana mereka bisa untung di kemudian hari, minimal modal mereka bisa kembali. (Widodo, 2007, p. 225).

Pemikiran komunalisme—yang dilatarbelakangi bendera partai politik—masih subur dalam tubuh elit politik. Yang terpenting ialah

kelompok bendera ini sudah terpenuhi maka janji sudah terpenuhi. Sehingga mereka menjadi wakil rakyat atas dorongan dari beberapa kelompok yang mengharapkan sebuah sokongan yang negatif, sehingga ketika kelompok mereka sudah terealisasi, maka kelompok lain pun apalah arti. Kecondongan tersebut yang masih menjadi kultur buruk bagi politik di negeri ini. Yang masih mengedepankan *wong njero* tanpa melihat klasifikasi, kompetensi, sehingga kejumudan berpikir daya intelektual yang harusnya bisa bersanding dan bertukar malah bisa jadi hanya arus kultural yang serba itu-itu saja. Maka Indonesia butuh arah baru untuk menyongsong masa depan Indonesia yang berperadaban dan berkemajuan dengan pembaharuan-pembaharuan dalam aras lokal maupun nasional dengan beberapa komponen negara bisa bersineri bersama dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berperadaban di mata dunia.

Membincangkan arah politik negera ini menjadi sebuah perbincangan yang amat sangat riskan dengan munculnya friksi-friksi kepartaian. Politik harus bisa berbaik dengan keadaan tidak hanya memakan sendirian dan benderanya. Doktrin yang sudah menjadi landasan awal pada setiap anggota menjadi frame kaku untuk melihat bendera lain, ketika mereka sudah lolos ke Senayan. Perbincangan ini akan penulis tarik ke era Orde Baru akhir, yakni menjelang akhir runtuhnya Soeharto sebagai pemimpin tampuk kekuasaan hingga 32 tahun di negeri ini. Kemudian banyak yang mengharapkan akan udara segara yang turut menghembuskan era baru pada usai lengesernya Soeharto. Munculah kemudian Gus Dur sebagai sosok pembawa angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mengenai pemikiran humanis dan demokrasi. Masa Gus Dur lah bahwa kaum santri nampak pada aras nasional daripada sosok Gus Dur.

Nuansa partai-partai Islam nampak bangkit usai runtuhnya Soeharto pada gelanggang pemerintahan. Jungjungan melaporkan bahwa, ledakan

partisipasi pendirian partai Islam ini bersifat sesaat yang hanya terjadi di pemilu pertama era reformasi di tahun 1999, ada 11 partai Islam dari 48 yang ada dan untuk pemilu berikutnya tahun 2004, 2009 dan 2014, jumlah partai Islam mengalami penurunan secara signifikan, tercatat hanya lima partai yang masih tetap bertahan di antaranya, PAN, PPP, PKS, PKB dan PBB. (Simorangkir, 2015, p. 204).

Membincangkan keterkaitan antara Negara dan agama di negeri ini tidak pernah lepas dari pro-kontra antara pandangan yang setuju atas berdirinya negara Islam di Indonesia. Persinggungan itu hadir ketika sebuah ragam konflik yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara *toghut*, pemimpin yang kurang tahu terhadap kepemimpinan. Banyak kelompok putihan yang menyerukan atas dasar akan berdiri negara Islam di Indonesia. Bukan masalah tidak setuju akan berdirinya negara Islam, akan tetapi apakah sejarah tidak di baca dengan lugas, bahwa banyak umat agama lain yang turut hadir dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini. Mulai dari petani, mahasiswa, pedagang, santri dan masih banyak lagi perjuangan para pahlawan yang mempertahankan Indonesia ini menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Kemajemukan menjadi sebuah pluralitas negeri ini yang patut untuk terus dijaga, dirawat dan dipelihara akan eksistensi masing-masing. Mereka semua berhak untuk menikmati hasil jerih payah dari nenek moyangnya yang memperjuangkan tanah air ini sebagai tempat cucunya masa depan menjadi tempat yang bersahaja.

Namun, ironisnya bahwa semua termakan akan usia yang rapuh dan layu, tidak ada keperawatan yang ingin menyemai kembali. Sehingga jangan hanya menyerukan berdirinya negara Islam di Indonesia. Memang benar bahwa umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam terbanyak di dunia. Bukan berarti bahwa kemudian hak-hak individu dan kewenangan melenggang ke atas tanpa menyeadari di bawah. Banyak perjuangan yang

kemudian harus bisa saling berkooperatif membangun negeri ini. Menelisik sisi sejarah dari era setelah kemerdekaan ada sebuah peristiwa peringgungan ketat mengenai konsep negara Islam. Mengutip tulisan Amos Sukamto bahwa, bentuk kekecewaan umat Islam pada keputusan tersebut muncul kepermukaan dalam bentuk pemberontakan di beberapa daerah dengan tujuanmendirikan negara Islam. Misalnya, di Jawa Barat Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 memproklamasikan Negara Islam Indonesia.

Kahar Muzakar mengadakan pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tahun 1952 dan Daud Beure'eh memproklamasikan Negara Islam di Aceh sebagai bagaian dari Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwirjo. Namun, pemberontakan-pemberontakan ini justru melemahkan perjuangan politik Islam pada masa Orde Baru dan menguntungkan bagi kelompok abangan dan Kristen karena penguasa Orde Baru selalu curiga terhadap politik Islam. Hal ini tampak pada kebijakan militer Orde Baru yang memerangi kekuatan "ekstrim kiri"(komunis) dan "ekstrim kanan"(separatis Muslim). Pada masa Pemilu 1955 perbedaan-perbedaan antar kelompok di seluruh ranah tanah air lebih dipertajam dan dipertegas lagi lewat pembentukan partai politik. Karena partai politik tidak hanya melibatkan kelompok elit tetapi juga dukungan massa maka jika pada masa seputar proklamasi kemerdekaan RI yang bersitegang hanya ditingkat elit, pada masa pasca-pemilu 1955 ketegangan tersebut melibatkan seluruh komponen kelompok masyarakat Indonesia termasuk perbedaan komponen kelompok keagamaan.

Hal ini diperparah ketika banyak partai politik mengusung bendera agama. Sehingga konflik politik selalu tumpang tindih dengan konflik agama, begitu juga sebaliknya. Pada masa Pemilu 1955 jika dilihat dari perjuangan dasar negara partai yang mengikuti Pemilu bisa dibagi dalam

tiga kubu yaitu: kubu Islam, Nasionalis dan Sosial-ekonomi. Pada masa ini lagi-lagi sebagian kubu Islam yang menginginkan Indonesia berdasarkan Syariat Islam mengalami kekecewaan. Halini disebabkan dalam Pemilu 1955 tidak ada satupun di antara aliran-aliran pokok dalam masyarakat Indonesia yang tampil sebagai pemenang. Sehingga dalam konstituante tidak ada mayoritas tunggal. Partai-partai Islam atau blok Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yaitu Masjumi, NU, PSII, Perti,AKUI, PPTI, Gerakan Pilihan Sunda, L.M. Idrus Effendi meraih 230 kursi. Mereka harus berhadapan dengan Blok nasionalis yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara yaitu PNI, PKI, Parkindo, Partai Katolik, PSI,IPKI, PRN, dll., meraih 274 kursi, dan blok sosial-ekonomi memperoleh kursi 10.

Dengan perolehan kursi sebanyak 230 maka harapan blok Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara menjadi semakin tidak realistik. Halini terbukti ketika Konstituante yang sudah terbentuk memulai sidangnya pada tanggal 10 November 1956 di Bandung tidak bisa mencapai kata sepakat tentang masalah rumusan dasar negara yaitu, Negara Pancasila atau Negara Islam. Kebuntuan membuahkan dekritpresiden tanggal 5 Juli 1959. Presiden Sukarno menyatakan kembali ke UUD 1945 dan setelah ini Indonesia memasuki masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Meskipun begitu perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara RI tidak berarti sudah berakhir. Karena dalam setiap tahapan sejarah RI selalu ada kelompok Islam yang berjuang untuk cita-cita tersebut. (Sukamto, 2013, pp. 29-30).

Namun, ketika era Orde Baru akan pungkas, sekitar tahun 70-an terdapat kebangkitan gerakan-gerakan Islam. Gerakan ini masih ketika masa pasca Orde Baru yang dikenal dengan era Reformasi. Banyak kubangan-kubangan gerakan-gerakan Islam yang bernuansa warna-warni baik Islam

tradisionalis, Islam modernis, Islam fundamentalis, Islam revisionis, Islam pluralis dan masih gerakan-gerakan lain. Mengutip tulisan Jungjungan bahwa, pasca jatuhnya Orde Baru lalu kemudian disusul dengan terciptanya era disebut dengan era reformasi oleh beberapa pengamat dipandang sebagai situasi yang kondusif bagi kemunculan berbagai gerakan Islam di Indonesia. Gerakan oleh Tolkhah di namakan Gerakan radikalisme Keagamaan, karena aksi-aksi yang mereka lakukan ditengarai memiliki ciri radikalitas yang melekat seperti pemilikian kepemimpinan dan perorganisasian yang karismatik, kepedulian purifikasi keyakinan dan perilaku, pengajaran konsep kejihadan serta terutama karena adanya pandangan organisasi yang ingin melakukan transformasi pandangan hidup bangsa, dan sebagian kegiatan yang dilakukan terkesan keras tanpa kompromi, main hakim sendiri dan bahkan merusak. Bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh kelompok ini memang telah menjadi wujud perilaku keagamaan yang baru di Indonesia dan menjadi sorotan masyarakat internasional. Seperti yang dikemukakan Jamhari dan Jajangtak dapat dielakkan bahwa kehadiran mereka telah memberi citra negatif terhadap Islam Indonesia. Namun terlepas dari sekian banyak sebutan yang dikenakan kepada mereka harus pula disadari fenomena tersebut sesungguhnya memilikiakar historis keagamaan yang panjang. (Simorangkir, 2015, p. 210).

Dalam konteks ini, Jungjungan mengutip, Esposito memaparkan: saat ini Islam terus menunjukkan dinamika dan keragaman ekspresinya. Tema dominan dalam Islam yang lebih nyata pada kehidupan kaum muslim dapat disaksikan di sebagian besar dunia Islam sejak dekade 1970-an, entah itu berupa pakaian kaum perempuan di jalan-jalan Kairo, Istambul, Kuala Lumpur atau dalam kehidupan politik kaum muslim mulai dari Tunisia sampai Mindanao. Islam kembali ditegaskan secara lebih kuat dalam

kehidupan pribadi maupun kehidupan publik masyarakat Muslim dengan cara yang ketat dan terkadang dramatis yang seringkali disebut sebagai kebangkitan Islam, revivalisme Islam atau fundamentalisme Islam. Jungjungan meninjau dalam Jhon L Esposito memang lebih senang menggunakan istilah revivalisme atau aktivisme Islam karena istilah fundamentalisme terbebani oleh asumsi-asumsi Kristiani dan pelabelan oleh dunia barat serta mengandung ancaman yang bersifat monolitik. Sebab menurut Esposito dalam Jungjungan bahwa terdapat dua istilah yang dia usulkan, *Islamic Revivalism* dan *Islamic activism*, lebih ringan bebannya selain juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi reformasi dan aktivisme sosial dalam Islam.

Apa yang diusulkan oleh Esposito di atas lebih merupakan sebuah upaya untuk melihat semantik fundamentalisme Islam yang memang seringkali dipahami secara salah kaprah oleh kalangan Barat. Namun "Fundamentalisme Islam" bukan hanya dikritik oleh kalangan Ilmuan Barat. Bahakan Ilmuan dari Asia sendiri banyak yang menyoroti Fundamentalisme Islam dengan nada sinis. Fazlur Rahman dalm Jungjungan misalnya menyebutkan fundamentalisme sebagai orang yang dangkal dan "superfisial", anti intelektual dan pemikirannya "tidak bersumber kepada Al-Quran dan budaya tradisional Islam". Dalam pada itu Nurcholis Madjid, seorang tokoh "neo modernis"yang lain menggunakan istilah "fundamentalisme" dalam konteks agama Kristen di Amerika serikat sebagai agama pengganti "yang lebih rendah" dibandingkan dengan agama-agama yang sudah ada. Namun, dalam pandangan gerakan Islam ini bahwa sebagian perkembangan budaya bangsa Indonesia dewasa ini dinilai tidak lagi mencerminkan sebagai budaya yang religius. (Simorangkir, 2015, p. 211).

Pandangan ini telah mendorong bangkitnya kelompok Islam radikal untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikenal dengan istilah “nahi munkar” dengan cara menghilangkan pusat-pusat kegiatan maksiat tersebut. Misalnya, gerakan-gerakan yang ingin menerapkan syariah dan dianggap bertentangan dengan syariah, Komite Indonesia untuk solidaritas (KISDI), Majelis Mujahidin Indoensia (IMM), Hizbut Tharir (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad. Ketiga, faktor solidaritas dan pembelaan. Sebagai gerakan Islam muncul sebagai solidaritas membela kelompok Islam, yang dinilai diperlakukan tidak manusiawi oleh kelompok lainnya. Dalam pandangan mereka, pembelaan terpaksa dilakukan karena pemerintah tidak melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang memadai terhadap kelompok-kelompok Islam tersebut. Faktor inilah yang menjadi salah satu pendorong lahirnya gerakan Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad di berbagai daerah. Menurut Mietzner ada tiga tipe kelompok radikal di Indonesia, sebagai sel teroris, “*anti-vice*” militan dan para militer yang sering terlibat dalam konflik horizontal. Misalnya, teroris, sesudah soeharto lengser, Abu Bakar Ba”asyir yang tinggal di Malaysia selama 17 tahun kembali ke Indonesia. Pada tahun 1972 bersama dengan Abdullah Sungkar membangun Al-Mukmin, pesantren di Ngruki, Jawa Tengah. Ba’asyir juga pimpinan Jemaah Islamiyah (JI) merupakan payung organisasi untuk sel teroris di Indoensia dan Asia Tenggara.

Begitu juga dengan kaum militan yang menfokuskan gerakannya untuk memperjuang moral Islam dengan mengunakan kekerasan yakni FPI. Oranisasi ini didirikan pada tahun 1988 di Jakarta Selatan. Ketiga, adalah para militer. Kelompok ini lebih melindungi kelompok muslim pada daerah konflik, khususnya konflik di Poso dan Maluku, yakni Laskar Jihad. Pada Oktober 2002, Forum Komunikasi Ahlussunah wal Jamaah merupakan payung bagi Laskar Jihad,memutuskan untuk membubarkannya. Keempat,

teologis doktriner. Gerakan Islam kontemporer yang cendrung radikal, tumbuh subur sebagai respon reaktif terhadap dinamika perkembangan pemikiran teologis dan praktek peribadatan atau pengalaman ajaran yang dinilai dipenuhi oleh kebid'ahan, baik bi'dah akidah, budi pekerti, ibadah, maupun bid'ah muamalah. Fenomena praktik bid'ah yang secara histori kultural, dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filosofis, peradaban religius agama-agama lain yang berkembang sebelum masuknya Islam di Indonesia, juga budaya-budaya lokal, merupakan faktor penghambat kemajuan Islam. Karena ini gerakan ini perlu dilakukan upaya purifikasi ajaran secara serius melalui berbagai pendekatan dakwah. (Simorangkir, 2015, p. 212).

Menyoal mengenai sistem negeri ini antara penggunaan sistem sekuler ataukah Islami, itu merupakan jawaban yang tidak ada titik temunya. Merekonstruksi jauh kisah sejarah ketika kepemimpinan dan perjuangan *jihad ulama* mengenai sebuah negara. Mengutip Masykuri Abdillah menerangkan bahwa, karena ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan ini terbatas dan hanya bersifat garis besar, maka terjadi variasi dan perbedaan dalam pemikiran atau ijtihad ulama tentang masalah negara sistem pemerintahan, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Bahkan jika dibandingkan antara pemikiran klasik dan pemikiran kontemporer perbedaan nampak cukup besar. Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalakn mengenai negara dan agama, apakah terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenyataannya sistem kekhilafahan mengintegrasikan antara agama dan negara. Yang terdapat perbedaan adalah, apakah pendirian sebuah negara itu merupakan wajib *syar'i* atau wajib *'aqli* tentang syarat-syarat kepala negara. (Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia., 2011, p. 5).

Perbedaan konsep mengenai sistem pemerintahan dengan menyoal negara dan agama disebabkan oleh pandangan individu-individu para pemikir politik itu dalam memahami ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam pemerintahan serta pengaruh asing (terutama peradaban Romawi dan Persia serta Filsafat Yunani). Dalam hubungannya dengan pemerintahan, mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni

a. Mereka yang terlibat langsung dalam pemerintahan, seperti Ibn Abi Rabi', al-Mawardi dan ibn Khaldun.
b. Mereka yang berada di luar kekuasaan, tetapi masih sering berpartisipasi dalam bentuk kritik-kritik terhadap kekuasaan, seperti Al-Ghazali dan ibn Taimiyah, dan;
c. Mereka yang terlepas dari konteks politik yang ada, sehingga pemikiran-pemikiran yang dikemukakan merupakan saduran dari spekulasi, seperti Al-Farabi.

Kalau pada masa klasik dan pertengahan tidak ada perdebatan tentang apakah umat Islam harus melakukan pengintegrasian atau pemisahan antara agama (Islam) dan negara, maka pada masa kontemporer terdapat perdebatan tentang hal itu. Perdebatan muncul terutama sejak adanya interaksi antara masyarakat Islam dan Barat yang membawa sistem mereka bersamaan dengan penjajahan mereka di sebagian besar negara-negara Muslim. Pada umumnya pemikiran politik Islam kontemporer ini merespon sistem politik Barat, seperti nasionalisme, *nation-state,* demokrasi, sosialisme, dan sebagainya. Respon ini adakalanya menolak sepenuhnya, mendukung sepenuhnya, atau mendukung sebagian dan menolak sebagian. Kelompok pertama (konervatif), menolak sistem Barat, kelompok kedua (modernis) mendukung sebagian secara selektif, dan kelompok ketiga (sekuler) mendukung sepenuhnya.

Membawa konteks negara dan agama ke Indonesia yang dengan beragamnya agama, suku, budaya, sehingga bagaimana sistem menyapa realita di Indonesia. Negara Indonesia dengan mayoritas Islam terbesar di dunia, menjadi faktor utama dalam sistem hukum dan sistem pemerintahan tidak terlepas dari konsep keislamannya. Menyadur ungkapan Masykuri bahwa hal semacam itu tidak terlepas dari sebuah karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan negara. Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal yang skaral dan profan, sehingga Muslim yang taat menolak pemisahan antara negara dan agama. Karena itu sekularisasi yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Bahkan adopsi sistem sekuler, seperti sistem demokrasi dan penegak hak asasi manusia, dalam banyak hal dilakukan dengan pemberian legitimasi keagamaan melalui ijtihad dan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Tanpa legitimasi ide-ide atau sistem sekuler itu tidak akan dapat dukungan sepenuhnya dari warga yang mayoritas beragama Islam. Ijtihad ini merupakan bagian dari modernisasi pemahaman keagamaan (modernisme Islam) agar ajaran-ajaran Islam tetap kompatibel dengan perkembangan masyarakat modern tanpa menyalahi ajaran-ajaran Islam yang bersifat mendasar dan absolut. (Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia., 2011, pp. 7-10).

Melihat konteks Indonesia yang begitu beragam tidak bisa kemudian penerapan sistem pemerintahan berpandangan satu arah dengan dalih siapa yang paling mayoritas. Meskipun sebuah legalitas yang mayoritas itu merupakan suara yang paling di dengar, tapi jangan mengabaikan yang minoritas, mereka semua ialah masyarakat Indonesia. Yang jelas, kini telah terjadi sebuah persinggungan dan kecenderungan pada

demokrasi dan syariatisasi dalam sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia. Demokrasi model Barat yang berdasarkan sekularisme sulit diterima oleh kalangan umat yang sebagian besar penghuni di negeri ini yakni umat Islam, sementara formalisasi syariah secara keseluruhan juga tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di negeri ini karenapun juga sangat sulit dilaksanakan di dalam sebuah negara yang plural seperti Indonesia ini. (Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia., 2011, p. 23).

Mengurai problematika mengenai negara Islam yang di gadang Indonesia akan menjadi negara Islam dengan beberapa antek-antek partai yang sudah siap untuk berdiri. Yang sebenarnya menurut hemat penulis bahwa negara Islam di Indonesia akan berdiri apakah mungkin bisa diterima dari semua kalangan umat Islam di Indonesia. Iya, Indonesia merupakan umat Islam terbesar di dunia, lantas kebesaran itu belum tentu sebuah perjuangan bersama menjadi otoritas pribadi. Di Indonesia bukan hanya Islam, melainkan lahir ratusan agama, bahkan agama lokal, sehingga bagaimana peran umat Islam sebagai agama yang mayoritas di negeri ini harus bisa saling mengayomi, saling menghargai, toleransi, bersifat humanis, semua itu tercipta tidak mudah semua butuh proses. Akhir-akhir ada kasus di Kuningan Jawa Barat yakni di lontarkan kepada Sunda Wiwitan, sahabat Ahmadiyah, dan yang masih baru ialah kasus penyerangan terhadap keluarga Assegaf di Solo dengan kegiatan *midodareni.* Sehingga bagaimana sikap humanis sebagai umat yang mayoritas bisa damai, jangan *grusah grusuh* untuk mendemokan tentang berdirinya negara Islam.

Mengutip Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa sosok Muhammad sebagai pendiri dan teoritisi negara Islam memiliki kedudukan unik selaku ketua dewan pelaksananya. Dalam prakteknya Muhammad ialah bertindak sebagai eksekutif, yudikatif sekaligus legislatif (dengan

berpegang wahyu Ilahi, keputusan peribadi, atau tindakan-tindakan beliau yang kemudian dijadikan sunnah oleh kaum Muslim). Dikutip oleh Asghar, Taha Husein melaporkan bahwa negara yang didirikan oleh Muhammad bukanlah negara teokrasi. Menurutnya, pendapat bahwa negara yang dibangun oleh Rasulullah adalah negara teokrasi tidak lebih dari pernyataan yang tidak berdasar. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang menekankan keesaan Allah, kerasulan Muhammad dan kehidupan yang berkeadilan. Ketika Rasulullah memipin suatu negara semua putusan yang diambil oleh Muhammad tidak didasarkan pada perintah Ilahi. Dalam memutuskan perkara-perkara penting Rasulullah acapkali mempertimbangkan tradisi dan aspirasi masyarakat Arab.

Bila mengamati secara seksama bahwa tidaklah terlampau menyimpang jika berpendapat bahwa Muhammad hanya dapat membuat putusan resmi berdasarkan dukungan, persetujuan, serta tuntutan masyarakat. Seperti diketahu secara seksama bahwa Rasulullah ialah juru runding yang ulung untuk segala perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Namun, sepertinya beliau hanya dimintai bantuannya untuk sebuah persoalan yang sangat penting atau sulit dipecahkan. Sehingga Rsulullah bukan sebagai pemutus yang harus milik Rasulullah, Rasulullah juga mempertimbangkan sedemikian rupa dengan keadaan Arab waktu itu, yakni yang berlaku dalam keadaan normal adalah sistem tradisi Arab kuno—sebuah tradisi yang tidak memiliki hukum tertulis, kekuasaan negara, pertimbangan kelompok etnik atau individu yang menjadi penguasa. (Enginner, 2000, pp. 56-58).

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa negara Islam tidak dapat ditafsirkan sebagai negara yang benar-benar Islami. Rasulullah hanya mewariskan struktur kenegaraan yang sangat sederhana yang lebih didasarkan pada tradisi-tradisi lokal dan ethos masyarakat Arab selama

hidup beliau. Ketika itu agama Islam dan kekuasaan beliau masih terbatas di Jazirah Arab. Ahmad Muhammad menjelaskan dalam tinjauan Asghar bahwa Islam tidak menyusun bentuk pemerintahan yang jelas, tidak pula memberikan rinciannya. Agama ini hanya meletakkan beberapa prinsip dasar yang bersifat umum tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan memungkinkan dibangunnya sebuah negara untuk kesejahteraan masyarakat. Qomarudin Khan menerangkan dalam Asghar bahwa tujuan Al-Quran bukanlah menciptakan sebuah negara, melainkan sebuah masyarakat. Tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri, karena itu apa pun bentuk serta wujud suatu negara, jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qurani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam. (Enginner, 2000, p. 5).

Menyoal mengenai sebuah negara dan agama dalam sebuah sistem pemerintahan memang berdinamika kritis. Muchamad Ali Safa'at menerangkan bahwa agama dan negara merupakan fenomena sosial yang telah berkembang sepanjang peradaban manusia. Keduanya saling mempengaruhi dan saling mengait. Perkembangan pemahaman dan cara beragama memengaruhi konsepsi dan praktik bernegara. Sebaliknya, perkembangan pemikiran manusia mengenai negara dan praktik bernegara juga berpengaruh terhadap pemahaman dan praktik beragama. Faktor sejarah dan sosiokultural yang berbeda-beda memengaruhi pola hubungan negara dan agama antara satu negara dengan negara yang lain. Bahkan ketika pola hubungan negara dan agama telah diformalkan di dalam kerangka konstitusional, hubungan keduanya masih dinamis dan cair. Muchamad Ali Safa'at mengutip, J. Philip Wogaman menyatakan bahwa paling tidak terdapat empat tipe hubungan negara dan agama, yaitu teokrasi, erastianisme, pemisahan gereja—negara yang tegas dan pemisahan gereja—negara yang lentur. (Safa'at, 2018, p. 7).

Menyoal Demokrasi Indonesia dengan Beberapa Tinjauan

Berbicara demokrasi sangat menarik diulas dan dibahas hingga saat ini dalam konteks pandangan para pemikir maupun pengamat negeri maupun dikalangan para akademisi terutama mahasiswa tentang kepemimpinan demokrasi di negeri ini. Banyak perdebatan di dalam negeri ini tentang pembahasan demokrasi dan disitu ada kubu yang pro dan kontra. Demokrasi memang kalau dilihat dari latar belakang sejarahnya ialah berasal dari pemikiran barat yakni Yunani. Hadir sebuah ormas yang berada di Indonesia yang berhaluan atau berlandaskan islam total yakni HTI. Ormas ini di Indonesia kontra dengan ideologi demokrasi, karena mereka berpegang teguh pada kepemimpinan yang berlandaskan negara Islam, namun mereka tidak melihat betapa panjang dan rumitnya sebuah perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan Islam dan agama-agama yang telah berdiri di negeri ini mereka juga mayoritas dari latar belakang orang-orang muslim bahkan ulama', mereka tak canggug untuk membuat sebuah ideologi bangsa yang bisa dimuat oleh semua agama agar agama, masyarakat yang sangat multi di bangsa ini bisa bersatu menyambung tali ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathoniyah sesama rakyat Indonesia.

Dikalangan para intelektual Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi permasalahan demokrasi. Demokrasi yang berada di negeri ini masih butuh untuk di perdebatakan karena kehadiran berbagai ormas islam lainnya yang notabene mereka yang berhaluan islam yang putih. Sehingga demokrasi yang dianggap pas dan relevan menjadi sebuah landasan pendirian dan jalannya sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri ini, masih aja di bincangkan. Dan fokus makalah kelompok kami kali ini ialah tentang pandangan para intelektual muslim

terhadap demokrasi yang ada pada negeri ini yang kali ini antara islam dan demokrasi bertentangan, sehingga banyak penyusup yang mau merobohkan negara ini dengan mau mengganti ideologi kepemimpinan dengan ideologi mereka, sehingga menjadi pro dan kontra.

Asal-usul Demokrasi

Asal kata demokrasi adalah *"demos",* sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat, dan *"Kratio* "atau *"krato"* yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti "pemerintahan oleh rakyat" (*rule by the people*). Dilihat dari sejarahnya,pertama kali, istilah ini digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi. Chleisthenes tokoh pada masa itu dianggap banyak memberi kontribusi dalam pengembangan demokrasi. Chleisthenes adalah tokoh pembaharu Athena yang menggagas sebuah sistem pemerintahan kota. Pada 508 SM, Chleisthenes membagi peran warga Athena ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa *demes* yang mengirimkan wakilnya ke Majelis yang terdiri dari 500 orang wakil. Sejatinya, jauh sebelum bangsa Yunani mengenal demokrasi. Para ilmuwan meyakini, bangsa Sumeria yang tinggal di Mesopotamia juga telah mempraktikkan bentuk-bentuk demokrasi. Konon, masyarakat India Kuno pun telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan mereka, jauh sebelum Yunani dan Romawi. (Hakiki, 2016, pp. 1-2).

Demokrasi sebagai ideology dan sistem kekuasaan telah menjadi landasan dan bingkai kehidupan bermasyarakat dan bernegara hampir di seluruh dunia, baik barat maupun dunia Islam. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi lahir di Yunani pada abad 5 SM, dan didesign ulang oleh para intelektual Eropa pasca renaissance, akibat terjadinya konflik yang panjang antara kaum intelektual dan kaum gerejawan, sebagai bentuk

pemberontakan terhadap kekuasaan otoriter gereja yang kejam sepanjang abad pertengahan. Akhir dari konflik panjang tersebut adalah kesepakatan kompromi yang merujuk kepada doktrin ”Berikanlah hak Tuhan kepada Tuhan dan hak kaisar kepada kaisar!”. Kesepakatan itu melahirkan ideologi baru yang dikenal dengan sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, atau pemisahan agama dari negara.

Demokrasi ramuan Barat tersebut dibangun atas sekularisme yaitu pemisahan agama dari negara,dan kebebasan rakyat yang seluas luasnya dalam beragama (*freedom of relegion*), berpendapat (*freedom of speech*), kepemilikan (*freedom of ownership*), dan berperilaku (*personal freedom*). Kemudian oleh para imperialis barat demokrasi ditransfer ke seluruh negeri jajahan mereka di seluruh dunia, termasuk dunia Islam, dan terjadilah sekularisasi negara negara umat Islam. (Basri, 2015, p. 2). Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Karena definisi ini maka Abraham Lincoln, dalam Bisri menjelaskan salah seorang mantan presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa dalam proses demokrasi mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa. (Hakiki, 2016).

Definisi umum demokrasi sering digunakan oleh para ilmuwan sosial adalah definisi yang dipopulerkan oleh Holden, mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. Rakyat dalam sistem demokrasi dalam kata-kata Holden adalah ‘rakyatlah yang mempunyai hak memutuskan dalam masalah-masalah publik, baik itu yang positif maupun yang negative. Senada dengan argumentasi Holden, Lijphart, seorang ahli ilmu politik mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dikuasai rakyat, dimana seluruh aktivitas pemerintah harus mengakomodasi hak-hak seluruh rakyat secara sama (rata), tidak ada

perbedaan bagi seluruh warga masyarakat. Karakteristik demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang didukung oleh rakyat mayoritas (*a popular majority*); "Demokrasi adalah sebuah sistem dimana rakyat mengatur dirinya sendiri...pemerintahan didukung oleh mayoritas rakyat, pemerintahan menjamin persamaan hak seluruh warganya, dan kedaulatan ada di tangan rakyat....". Ungkapan 'oleh rakyat' yang beberapa kali disebutkan di atas sulit untuk dijelaskan dan diimplementasikan. Hampir tidak ditemukan dan hampir tidak ditemukan dalam realitas karena siapapun yang memerintah sebuah sistem yang demokratis biasanya adalah elit politik bukan rakyat kebanyakan. Menurut pandangan Parry, dalam Ali Nurdin pemerintahan dalam sistem demokrasi memang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi dalam realitas sebenarnya bukanlah dipimpin oleh rakyat kebanyakan tetapi oleh kelompok elit dan kelas tertentu".

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa definisi demokrasi masih diperdebatkan. Demokrasi sangatlah unik dan bervariasi tergantung kepada keunikan sebuah sistem politik, sosial dan budaya di masyarakat. Meskipun demikian, menurut Ranney dan Kendall, walaupun masih kontroversi, mereka sepakat bahwa ada hal-hal yang bisa disetujui dan disepakati dalam demokrasi dan ada pula hal-hal yang tidak bisa disepakati. (Nurdin, Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam Dan Demokrasi, 2016, pp. 4-5).

Apakah Konsep Yang Mulanya Warisan Barat Ini Dapat Sesuai Dengan Islam Dan Bisa Diterapkan Di Negara Islam

Menurut pendapat penulis konsep demokrasi yang berasal dari warisan barat ini bisa diterapkan di negara Islam. Namun, tidak semua konsep demokrasi itu bisa diambil, mungkin hanya nilai-nilai yang bersifat umum. Menolak demokrasi dengan alasan bahwa istilah ini datang dari barat dan syarat akan muatan misi dan demokrasi juga dianggap lebih mengusung sisi mayoritas dan meninggalkan minoritas, adalah pendapat

yang keliru (tidak objektif). Bukan kah kita telah diajarkan oleh Nabi kita bahwa mencari hikmah boleh dimana saja. Dan hikmah itu mungkin saja datang dari negeri Barat—tidak selamanya dari Timur (negara mayoritas Islam/muslim).

Salah satu keberatan lain yang cukup kasat mata adalah bahwa sistem ini sama sekali tidak praktis apabila jumlah masyarakat telah membesar. Oleh karena itu, Jean Jacques Rousseau beserta filsuf politik lain menyempurnakannya dengan teori demokrasi perwakilan, sistem pemilihan para wakil rakyat sebagai pemerintah. Sistem perwakilan ini telah menjadi norma berharga dan prinsip yang diterima di dunia sehingga memaksa banyak cendekiawan muslim menciptakan teori demokratisasi Islam. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Karena definisi ini maka Abraham Lincoln, mengatakan bahwa dalam proses demokrasi mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan Sadek J. Sulaiman, dalam Kiki Muhammad mengatakan bahwa prinsip dasar demokrasi adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apapun bentuk deskriminasi manusia, baik yang berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi. (Hakiki, 2016, p. 3).

Mengetahui Makna Islam dan Demokrasi Menurut Intelektual Muslim

Demokrasi menurut pandangan intelektual Muslim baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pandangan cendekia Muslim tentang demokrasi meski terjadi silang pandangan kaum muslimin dalam masalah demokrasi, dan secara umum ada tiga pandangan yang sangat kontradiktif: Menurut Abu Muhammad Ashim Al-Maqdisi dalam bukunya *Ad-*

Dimuqratiyah Diinun (agama demokrasi): “ketahuilah bahwa istilah keji”demokrasi”berasal dari bahasa Yunani bukan berasala dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan, kekuasaan atau hukum. Dengan demikian arti demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut para penganutnya,ini merupakan ciri yang paling khas di dalam sistem demokrasi dan atas dasar itu pula mereka senantiasa memuja mujanya. Padahal wahai para saudaraku setauhid, ia adalah ciri yang paling prinsipil di dalam kekafiran, kesyirikkan dan kebatilan ia sangat bertentangan dan berlawanan dengan diinul Islam serta millatul tauhid.

Menurut Abdul Mun’im Musthafa Halimah, Abu Bashir dalam bukunya Thaghut, bahwa DPR, MPR dan sejenisnya sebagai Thaghut akbar: ia menulis: diantara kelancangan para wakil rakyat terhadap Allah adalah bahwa mreka mengkhususkan bagi diri mereka sendiri dan bagi rakyat mereka majelis-majelis pembuat undang-undang, mereka menamakan DPR atau MPR. Menurut beberapa pendapat ada tiga ketegori sudut pandang melihat demokrasi, *pandangan pertama,* Ali Ghufran alias Mukhlas, yang banyak dikagumi dan diikuti oleh para tokoh, terutma setelah dieksekusi, telah menilai pemerintahan Indonesia dengan penilaian seluruh pemerintahan di Indonesia kafir, ia menuliskan dalam risalah Tadzkirahnya sebagai berikut “bagi seorang alim yang munshif obyektif yang senantiasa memperhatikan urusan Islam dan kaum muslimin, Insya Allah sudah tidak asing lagi baginya bahwa penguasa dan pemerintah di negeri ini telah melakukan berbagai kekafiran yang kufur akbar, kekafiran itu ada yang bentuknya ucapan, ada yang berupa perbuatan dan ada pula yang berupa I’tiqad atau keyakinan.

Pandangan kedua, yang melihat demokrasi tidak semua kufur dan boleh memanfaatkannya dalam koridor tidak bertentangan dengan Islam, diantara mereka Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Jasim Al-Yasin, Syekh Hasan Al-Banna, Dr. Salman Al-Audah, Dr Abdur Rahman Abdul khalik, Dr

Umar Asyqar, Dr. Fathi Yakun, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Manna’ Al Qathan. Disebutkan oleh Syekh Salman dalam fatwanya ketika ditanya tentang keikut sertaan Islamiyyin dalam pemilu, beliau mengatakan “sesungguhnya saya memadukan suara saya dengan syekh yang engkau sebutkan fatwanya tentang bolehnya ikut memberikan suara, bahkan disyariatkannya dalam bab meringankan bahaya dan memilih yang terbaik, walaupun dalam masalah ini banyak variabelnya, akan tetapi memberikan suara punya pengaruh walaupun terbatas, dalam bab mengecilkan skala keburukan dan menguranginya, memberikan bantahan kepada pelaku kebatilan dan menyingkapnya dan proaktif dalam melontarkan solusi yang sesuai dan berjalan dengan islam, dan menerangkan efeknya dalam kebaikan manusia dan penerimaan mereka akan solusi Islam.

Yusuf Qardahawi melihat bahwa Demokrasi dalam politik adalah arti rakyat bebas memilih pemimpinnya dan menolak hukum dictator sesuai dengan hukum Islam. Dan beliau berkata:”yang kami maksudkan dari demokrasi adalah sisi politik darinya dan intinya rakyatlah yang memilih orang yang memimpinnya dan tidak dipaksakan oleh penguasa tanpa kerelaannya, dan ini yang ditetapkan oleh islam melalui perintah syura dan bai’at mencela firaun dan penguasa otoriter, rakyatlah yang memilih yang kuat yang pinter yang terpercaya dan mengikuti perintah dan menjaga perintah untuk mengikuti mayoritas tangan Allah bersama jamaah.

Pandangan ketiga, adalah mereka yang memandang demokrasi adalah halal dalam segala kondisinya, dengan mengikuti suara terbanyak tanpa melihat bertentangan tidaknya dengan syari’at Allah. Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas kaum muslimin yang ikut dalam demokrasi dan partai sekuler yang didirikan oleh kaum muslimin abangan. (Basri, 2015, pp. 9-15).

Mengenai tema Islam dan kebangsaan ini ada tiga aliran yang berpendapat tentang hubungan antara Islam dengan ketatanegaraan.

Aliran *pertama,* berpendirian Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan Islam adalah agama yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan bernegara (tokohnya; Hasan Al-Banna, Sayyid Qutub, Abu ala al-Maududi). Aliran *kedua,* berpendirian bahwa agama Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, alasannya bahwa nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara (tokohnya Ali Abdul Al-Raziq dan Thaha Husein). Aliran *ketiga,* menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara (tokoh-tokohnya Muhammad Husein Haikal).

Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa negara adalah perlu untuk menegakkan syari'ah tetapi eksistensi negara hanyalah alat belaka dan bukan dan bukan institusi agama itu sendiri: "mengatur urusan" umat manusia adalah salah satu dari kewajiban keagamaan terpenting, tetapi hal itu tidak berarti bahwa negara tidak dapat tegak tanpa agama. Harun Nasution mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan satu pun tentang keharusan mendirikan negara Islam. Kemudian ia mengatakan, bukan hanya soal negara Islam, bahkan soal negara saja, tidak ada "ayat atau hadits" yang dengan tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam.

Menurut Nurcholis Madjid, meskipun tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islamis. Karena itu, masyarakat Islam adalah masyarkat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Abdurahman Wahid mengemukakan bahwa dalam Islam sama sekali tidak memiliki bentuk negara. Yang penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan, alasannya Islam mengenal pemerintahan definitif. Secara filosofis kewajiban membentuk negara Islam tidak terdapat, namun sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarkatnya yang penuh Islamis. Karena itu, masyarakat Islam adalah adalah masyarkat yang mengikuti perkembangan zaman di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. (Abdullah, 2014, pp. 24-28).

Kemunculan Demokrasi sebagai Isu Sentral dalam Setiap Episode Sejarah Peradaban Manusia.

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia dan merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia sejagad, karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku, bangsa, agama dan kebudayaan. Menanggapi permasalahan ini intelektual muslim saling berbeda pendapat. Menurut Syaikh Fadhallah Nuri, dalam Kiki Muhammad demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya sangatlah tidak mungkin dalam Islam. Dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Karena itu, ia menegaskan bahwa demokrasi sangatlah bertentangan dalam Islam. Nada mengecam terhadap demokrasi juga disampaiakan oleh Sayyid Qutub ia

mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Ali Benhadji seorang pemimpin FIS (*front islamique da salut*) mengatakan bahwa konsep demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo-Kristen yang harus diganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inhern dalam Islam. Kata Benhadji mulai melihat sistem demokrasi adalah sistem yang cacat.

Menurut Fahmi Huwaidi, dalam Kiki Muhammad demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Muhammad Husein Haikal berpendapat bahwa kebebasan, persaudaraan dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Menurut Amin Rais salah seorang cendekiawan Indonesia yang berkata terhadapa demokrasi, bahwa ia tidak melihat adanya pertentangan antara Islam (musyawarah) dengan demokrasi. Yusuf Al-Qardhawy, ia mengatakan bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangn dengan Islam, bahkan ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam. (Hakiki, 2016, pp. 4-7).

Islam dan demokrasi merupakan dua konsep dari entitas kultur yang berbeda. Maka ketika keduanya bertemu, betapapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara relative bersesuaian, namun tak pelak menimbulkan gesekan-gesekan tajam. Mengutip Winengan, Natsir menguraikan Islam mempunyai konsep dan karakteristik sendiri. Islam tidak harus 100% demokratis atau 100% otokratis. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun Natsir di kenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, namun dia tetap mendukung kedaulatan Tuhan. Sejalan dengan pemikiran Natsir, Ismail Suny adalah salah satu dari intelektual Muslim yang masih memegangi ide kedaulatan Tuhan. Menurutnya kedaulatan yang hakiki berada pada Tuhan, sementara otoritas rakyat adalah kepercayaan suci yang harus berada dalam batas-

batas kehendak Tuhan. Menurutnya kedaulatan rakyat sebagaimana yang juga dipahami di Indonesia, pada dasarnya merupakan penerapan kedaulatan Tuhan oleh semua rakyat sebagai hamba-Nya, dimana implementasi aturan-aturan Tuhan dalam kehidupan sosial dan politik diimplementasikan oleh rakyat melalui para wakil mereka.

Sementara Jalaludin Rakhmat memandang dalam Winengan bahwa demokrasi sebagai istilah yang mempunyai pengertian berbeda-beda. Dia mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip, partisipasi politik dan hak asasi manusia. Jadi Suny, Abdurraoef, dan Rakhmat mendukung demokrasi tetapi mereka pada dasarnya setuju tentang kedaulatan Tuhan yang diimplementasikan dengan kedaulatan rakyat. Pandangan apakah Islam dan demokrasi kompatibel melahirkan dua kubu yang mencoba menafsirkan teks al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Seperti yang dikutip Winengan, Maududi berpendapat bahwa kebutuhan akan terciptanya negara islam adalah sesuatu yang natural atau sunatullah, "hal ini merupakan bagian dari ideologi yang luas tapi terintegrasi, yaitu prinsip kedaulatan tuhan sang pencipta alam. Demokrasi tidak kompatibel dengan Islam, bahkan demokrasi bisa di pandang bertentangan dengan ajaran Islam karena mempercayai adanya kedaulatan manusia selain kedaulatan Tuhan. Pandangan Maududi di latar belakangi oleh gurunya yakni Sayyid Qutb yang menolak dengan adanya sebuah konsep kepemimpinan demokrasi. (Winengan, 2005, pp. 209-211).

Berbeda dengan pandangan yang Maududi dan Gurunya, kelompok muslim yang dikenal dengan sebutan moderat, liberal atau reformis, percaya bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai yang mendukung demokrasi. Sehingga bagi kelompok ini Islam dan demokrasi adalah kompatibel. Fachruddin mengidentifikasikan kelompok ini sebagai kalangan"...liberalis, Modernis, atau reformis, yang berpendapat bahwa demokrasi bukanlah konsep monolitik tetapi memiliki berbagai 'wajah' dan karenanya variasi

bentuk demokrasi bisa dikembangkan baik itu pada masyarakat muslim maupun non-muslim". Pandangan kaum moderat dalam sejarahnya telah dipopulerkan oleh para sarjana muslim seperti Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi. Ibnu Taimiyah percaya bahwa agama dan negara mempunyai hubungan mutualisme; disatu sisi tanpa sebuah negara yang legal dan kuat, agama bisa ada dalam bahaya; dan disisi lainnya negara tanpa agama bisa menjadi institusi tirani. (Nurdin, Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam Dan Demokrasi, 2016, pp. 8-12).

Konsep Demokrasi

Wahyuni melaporkan bahwa sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja atau kaum bangsawan, kaum ensiklopedia mengemukakan teori kontrak sosial, bahwa kekuasaan penguasa negara adalah berasal dari warga negaranya yang direlakan dan dilimpahkan kepada sang penguasa untuk digunakan demi melindungi kepentingan hidup masyarakat secara bersama. Selanjutnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga melindungi hak-hak asasi manusia, muncul doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) oleh Wahyuni, John Locke menguraikan sebagai berikut;

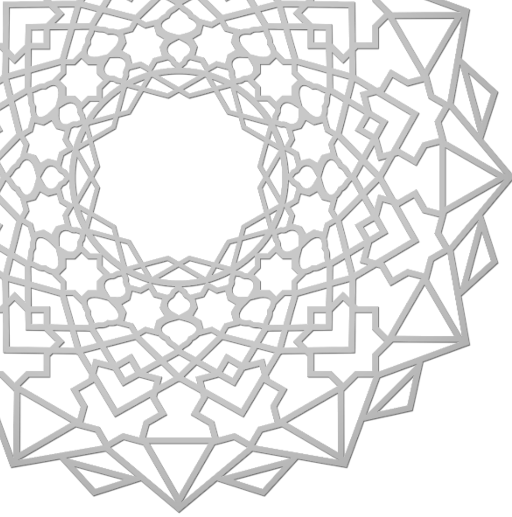
1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang dan peraturan
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang tersebut.
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang menyatakan hubungan dengan negara luar serta menyatakan perang dan

damai, membuat perserikatan dan segala tindakan badan-badan di luar negeri.

Doktrin ini banyak mempengaruhi para perumus UUD negara baru merdeka walaupun tetap tidak menganutnya secara penuh. USA dan Inggris pun tidak menerapkan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan murni. Di USA ada *cheks dan balances* (pengawasan dan keseimbangan) guna menjamin keseimbangan kekuasaan, misalnya presiden tidak dapat dijatuhkan kongres dan sebaliknya kongres tidak dapat dibubarkan presiden. Para hakim Mahkamah Agung diangkat presiden, tetapi dapat diberhentikan kongres apabila hakim tersebut terbukti melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat memveto RUU dan kongres, tetapi RUU dapat diberlakukan apabila 2/3 suara majelis kongres setuju.Kini konsep pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan lagi, kecuali konsep pembagian kekuasaan. Artinya secara prinsip ketiga bidang kekuasaan itu diakui, akan tetapi diantara ketiganya ada keterkaitan hubungan kekuasaan dan kerjasama yang saling mendukung, seperti halnya yang dianut di Indonesia.

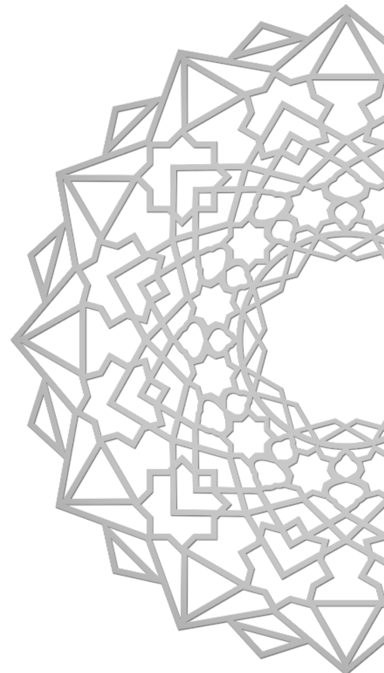
Dalam Wahyuni, Gagriel Almond dan Sidney Verba menguraikan bahwa Dimensi lain konsep demokrasi adalah berkaitan dengan pemerintahan yang bertumpu pada partisipasi rakyat, yang melibatkan rakyat dalam pembuatan keputusan dari segi politik. Dengan kata lain, demokrasi adalah satu prinsip tentang bagaimana kita membentuk suatu proses politik dengan menggunakan sumberdaya politik, dimana rakyatlah yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebuah negara berdasarkan toleransi, sikap saling mempercayai dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara demokratik. Ketiga elemen ini penting sebagai dasar untuk melakukan kompromi, mengakomodasi berbagai kepentingan dan memberikan kebebasan individu dan masyarakat. (Wahyuni, 2014, pp. 3-4).

Winengan menjelaskan istilah demokrasi telah diterima oleh hampir semua pemerintahan di dunia. Akibatnya adalah menjamurnya penggunaan kata demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosialis, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Perubahan penggunaan semacam itu di satu sisi dimaksudkan untuk membawa konsep demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu, di sisi lain untuk menjustifikasi sistem politik yang diajukan oleh pemerintah tertentu. Dalam konteks negara-negara Muslim, banyak di antara intelektual Islam telah mengamati dan mendiskusikan kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Bahkan pemerintahan di negara-negara Muslim mengklaim bahwa sistem politik mereka sedang bergerak kearah yang demokratis, meskipun ditafsirkan dengan cara sendiri-sendiri. Sedangkan meningkatnya partisipasi gerakan-gerakan Islam dalam proses demokratisasi pada akhir 1980-an dan 1990-an yang terus menuju ke pusat-pusat kekuasaan seakan menunjukkan gejala kecenderungan kepada kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Namun bersamaan dengan gejala itu, sebenarnya muncul problem filosofis terutama karena demokrasi dipandang berdasarkan pada sekularisme, sedangkan Islam adalah agama yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Akibatnya,dalam kenyataan muncul berbagai responsatau bentuk pemikiran dikalangan para ulama, intelektual, dan aktivis Muslim terhadap kontradiksi Islam dengan istilah atau konsep demokrasi, termasuk intelektual Muslim yang ada di Indonesia. Dalam tulisan ini, pembahasan tentang pemikiran intelektual muslim Indonesia dalam mengkaji kontradiksi Islam dengan konsep demokrasi lebih difokuskan pada persoalan tentang kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan. (Winengan, 2005, pp. 203-204).



Bab II

Toleransi Dalam Islam



Toleransi dalam sudut pandang umat Islam yang memang mayoritas di Indonesia terkhusus dan di dunia pada umunya. Kemayoritasan Islam di seleuruh penjuru dunia, jangan kemudian menyudutkan posisi di mana ada agama lain yang turut hadir. Sehingga bagaimana bentuk dalam merealisasikan nilai-nilai keharmonisan dalam membangun keharmonisan dengan beragamnya agama di dunia dan di Indonesia. Konteks Indonesia saja, sering terjadi keributan antarumat agama maupun intraagama. Terjadi juga ketika sebuah kerusuhan mengenai Gereja Yasmin di Bogor, kerusuhan Gereja Bethel di Situbondo dan penyegelan Gereja di Sumberwiringin Bondowoso dan seluruh pelosok negeri ini. Persinggungan yang kemudian menjadi problem ialah bagaimana turut hadirnya sosok pemimpin masing-masing agama dalam menghalau keeksklusivan beragama ini. Dalam hemat penulis bahwa era postmodern seperti ini peran masing-masing agama menjadi sebuah hal yang paling penting dalam merajut keeksklusivan dalam beragama. Jangakauan sebagai tokoh agama mungkin belum bisa sepenuhnya mewakili hati masing-masing jamaahnya, sehingga terjadilah pengucilan.

Kesadaran terhadap kompleksnya agama yang hadir mewarnai negeri ini ialah salah satu jalan membangun keindahan. Sadar dalam hidup beragama, sadar dalam perlunya membangun keberbedaan menjadi keharmonisan. Terutama terletak pada peran pemimpin masing-masing agama, jangan kemudian membawa agama pada sebuah kepentingan yang sifatnya politis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dengan saduran tulisan Irwan Masduqi mengenai pandangan intelektual Islam dalam memandang toleransi.

1. Mohammed Arkoun (1 Februari 1928-14 September 2010)

   Mohammed Arkoun lahir di Al-Jazair dan merupakan tokoh yang banyak menuliskan tentang toleransi,

pemikiran-pemikiran Islam, Islam dan negara dan tentang Al-Qur'an. Arkoun berusaha mengakui bahwa dalam tradisi Islam terdapat elemen yang ekslusif-intoleran sekaligus inklusif-toleran. Banyak sekali elemen-elemen intoleran dan hanya sedikit sekali ulama elit yang mengenal konsep toleransi yang sejajar dengan konsep toleransi modern. Arkoun menegaskan bahwa konsep toleransi modern baru dikenal dalam tradisi Islam pada abad ke-19. Dengan demikian toleransi merupakan konsep yang baru dalam sejarah Islam.

Toleransi dan intoleransi merupakan fenomena yang dapat dicermati secara langsung di dalam realitas kehidupan umat Islam. Namun, sejauh ini belum ada kitab-kitab kuno yang menjelakan konsep toleransi dan intoleransi secara eksplisit dalam tradisi Islam. Di era modern pun, wacana toleransi masih menjadi isu langka di masyarakat Arab yang hingga kini masih di hegemoni oleh teologi abad pertengahan. Toleransi masih menjadi barang asing bagi dunia Arab, sebab belum ada faktor-faktor sosiologi kultural yang mendorong masyarakatanya untuk mengimplementasikan wacana toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab kenapa begitu banyak komunitas Yahudi, Katholik, Protestan, Ortodoks Yunani, Ortodoks Armenia dan Ortodoks Spanyol memilih meninggalkan Maroko Algeria, Tunisia, Iran dan Mesir menuju negara Barat. Bahkan Algeria sudah tidak lagi mengakui sebagai negara yang pluralitas dan dikuasai kaum Malikiyah byang hendak akan menyingkirkan kaum minoritas 'Ibadiyah. Beginilah realitas

dunia Islam, tak terkecuali di Indonesia, di mana para pemeluk Islam masih terkungkung dalam fanatisme dan ortodoksi sehingga wacana pluralisme dan inklusivisme masih dimusuhi bahkan diteror. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011, p. 48).

Dalam membahas isu toleransi dan intoleransi, Arkoun membandingkan tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen untuk mengukur sejauh mana sikap toleran yang ditunjukkan masing-masing tradisi dan firksi-friksi dalam tradisi internal agama-agama tersebut. Dia hendak memperluas analisis kritis-filosofisnya agar mencakup batas-batas epistemologis nalar semua agama secara umum. Semua tradisi agama menawarkan ajaran-ajaran dan semboyan-semboyan yang terbangun di atas sistem nalar tertentu. Ajaran dan semboyan semua agama mengalami proses perjalanan sejarah yang panjang: dari periode oral (*marhalah safahi*) pada masa nabi-nabi hingga periode kodifikasi (*marhalah tadwin*) pada masa generasi penerus. Dalam artian tidak semua pada masa nabi ajaran dan semboyan dapat tertuliskan. Dalam proses perjalanan sejarah, tentu ada ajaran yang hilang, ditambahkan, diperdebatkan dan bahkan dimanipulasi. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011).

Dalam melihat konteks keindonesiaan penulis menyadur dari tulisan Sidurrahman dan Arifinsyah bahwa Makna kemajemukan dengan tinjauan kerukunan anatarumat beragama sangat begitu penting diurai dengan telaah masing-masing agama. Saidurrahman dan Arifinsyah melaporkan, dalam sudut pandang agama Hindu bahwa konsep kerukunan

merujuk pada kitab suci Veda, di mana mengamanatkan untuk menumbuhkembangkan kerukunan umat beragama, toleransi, solidaritas dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membeda-bedakannya. Dalam ajaran kitab Veda, masalah kerukunan dijelaskan secara gamblang dalam ajaran: *Tattwam asi, karma phala,* dan *ahimsa.* (Arifinsyah, 2018, p. 71). Dalam sudut pandang agama Buddha untuk membina kerukunan hidup beragama, umat Buddha telah memiliki pedoman yang dapat dijadikan tunutnan kehidupan harmonis yang oleh Buddha disebut enam faktor yang membawa keharmonisan (*Saraniya-dhamma*). *Pertama,* cinta kasih diwujudkan dalam perbuatan. *Kedua,* cinta kasih diwujudkan dalam tutur kata. *Ketiga,* cinta kasih diwujudkan dalam pikiran dan pemikiran. *Keempat,* memberi kesempatan kepada sesama ikut menikmati apa yang diperoleh secara halal. *Kelima,* di depan umum atau pribadi dia menjalankan kehidupan yang bermoral, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang. *Keenam,* di depan umum atau pribadi memiliki yang sama yang bersifat membebaskan dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis tidak bertengkar karena perbedaan pandangan.

Dalam sudut pandang agama Kong Hu Cu bahwa Kong Hu Cu mengajarkan kepada umatnya ialah pemahaman dasar yang dapat membangun sebuah hidup berkerukunan adalah tidak membeda-bedakan, para anggota masyarakatnya diikat dalam pemahaman persaudaraan yang saling tenggang rasa dan tidak membebani satu sama lain. Konsep demikian

diujarkan nabi Kong Hu Cu; “Di empat penjuru samudra, kita semua manusia adalah bersaudara. Dan seorang yang berperi cinta kasih itu ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak; ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Nabi Kong Hu Cu berpesan; “agar di rumah hendaknya berbakti, di luar rumah hendaknya rendah hati, hati-hati hingga dapat dipercaya, waktu luang digunakan untuk membaca kitab meluaskan pengetahuan.

Dalam agama Kristen memaknai sebuah kemajemukan ialah terciptanya kesatuan pelayanan bersama yang berpusat pada kasih Kristus. Kesatuan pelayanan ini didasarkan atas ketaatan dan kesetiaan kepada misi yang dipercayakan kepada umat yang satu dan yang menerima tugas yang satu dari Kristus. Inti kehidupan pengikut Kristus dalam hubunganya secara totalitas dengan Allah adalah hubungan kasih. Ini adalah hukum terutama dan yang pertama, dan dengan sesama manusia juga kasihi seperti diri sendiri. (Arifinsyah, 2018, p. 79).

Dalam sudut pandang mengenai kemajemukan agama, agama Islam juga mempunyai versi dalam merajut keharmonisan di tengah majemuknya agama. Islam memberikan penjelasan-penjelasan tentang pentingnya membina hubungan baik antara Muslim dan non-Muslim, pentingnya saling menghargai, saling menghormati dan berbuat baik walaupun kepada umat yang lain.ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai asas pemberlakuan konsep kerukunan dalam Islam, antara lain: teks keagamaan Islam sangat toleran dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, hal tersebut dalam mendukung dan menjaga

toleransi beragama di Indonesia. Toleransi menjadi komitmen teologi umat Islam di sebuah negara yang plural seperti Indonesia.

Sehingga jika kembali pada pandangan Arkoun mengenai toleransi terutama dalam dunia Islam terhadap dunia non-Islam. Arkoun menegaskan bahwa toleransi tidak akan terwujud di dunia Islam kecuali setelah mendekonstruksi bangunan ortodoksi teologi tradisional seperti yang pernah terjadi di Eropa modern. Kemunculan toleransi pada tahap berikutnya akan diikuti oleh munculnya apresiasi terhadap konsep HAM, yang di dalamnya semua manusia dinilai mempunyai hak individu tanpa melihat keyakinan agama dan rasnya. Jika semua ini bisa terwujud, diskriminasi dan intoleransi dapat diminimalkan. Namun, realitas berkata lain; dunia Islam justru gagal dalam menanam benih-benih toleransi akibat monopoli-monopoli kebenaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok konservatif. Masing-masing agama dan sekte saling menyesatkan dan tanpa ragu-ragu bermain hakim sendiri dengan menyerupai tempat-tempat ibadah milik aliran lain.

2. Mohammed Abed al-Jabri (1936-2010)

Mohammed Abed al-Jabri lahir di Turki dan profesor pemikiran Islam dan filsafat di Universitas Muhammad V, Rabat. Al-Jabri sering dijuluki sebagai *new averroism.* Karena memperjuangkan dalam menarasikan tentang toleransi dari sisi filsafat dan agama dari pandangan Ibn Rusyd. Dalam perspektif Abed al-Jabri, toleransi—yang memang dari Barat—harus diadaptasikan dengan budaya Arab-Islam dengan mencari padanan konseptualnya dari

tradisi klasik Islam. Adaptasi konseptual ini sangat mendesak guna menghadapi tantangan kontemporer berupa radikalisme agama. Dalam perspektif Abed al-Jabri, akar-akar toleransi Islam klasik dapat ditemukan dalam pemikiran golongan Murji'ah, Qodariyah dan filsafat Ibn Rusyd. Pemikiran golongan Murji'ah dan Qodariyah berpusat pada dua poros, yaitu toleransi dan kebebasan berkehendak (*free will*). Konsep toleransi golongan Murji'ah dan Qodariyah tercermin dari definisi mereka tentang iman, di mana definisi itu muncul pada saat terjadinya perseteruan politik antara Ali dan Muawiyah. Menyikapi konflik politik tersebut, golongan Murji'ah dan Qodariyah mengambil sikap netral dengan cara membedakan antara iman dan amal serta tidak mengakafirkan orang-orang terlibat dalam konflik, sikap ini sangat bertentangan dengan Khawarij yang sangat radikal dalam mengafirkan orang, karena pengafiran yang di lakukan Khawarij berdasarkan pemikiran teologis yang mengintegrasikan iman dan amal.

Mohammed Abed al-Jabri dalam merekonstruksi toleransi dari sudut pandang Ibn Rusyd dengan kekuatan filsafat dan agama. Kemudian Al-Jabri membawa hubungan antara filsafat dan toleransi pada gumulan yang akur. Tujuan filsafat berupa mencari kebenaran tidak bermaksdu memonopoli kebenaran. Sebab, selama orang mencari kebenaran, maka otomatis dia mengakui adanya beragam kemungkinan kebenaran. Filsafat adalah medan untuk berijtihad sedangkan toleransi diterapkan untuk menjaga hasil-hasil ijtihad.

Pandangan lain bahwa Abed al-Jabri menyayangkan sebuah konsep toleransi dari Eropa yang dinilai syarat akan dengan tujuan ideologis dan politis. Untuk itu, tantangan kontemporer kita adalah bagaimana caranya merekonstruksi konsep toleransi yang lebih bersifat etis ketimbang ideologis-politis. Toleransi etis adalah upaya meminimalkan hegemoni kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Toleransi etis diharapkan dapat menjadi obat mujarab bagi problem radikalisme agama dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Toleransi etis harus diwujudkan dalam konteks dialog antaragama maupun intragam, sebab pluralitas agama dan aliran-alirannya merupakan fenomena kemanusiaan yang tidak dapat diingkari. Toleransi etis tidak hanya terbatas dalam filsafat dan agama, tapi harus diperluas dalam bidang politik. Artinya, toleransi etis tidak sekadar menentang intoleransi dalam bentuk radikalisme agama yang disebabkan penerapan agama secara tekstual, tetapi juga hendak menentang intoleransi dalam bentuk radikal politik. Dalam bidang politik, demokratisasi membutuhkan pondasi toleransi berupaka kesadaran menghormati perbedaan dan hak mengutarakan aspirasi secara bebas. Toleransi etis-demokratis berarti memberikan hak dan penghormatan kepada seluruh kelompok minoritas untuk menghadiri dan menyampaikan aspirasinya.

Al-Jabri berkata, dunia yang terbangun di atas intoleransi dan kezaliman ini sangat membutuhkan keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak pihak lain yang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, baik pihak lain tersebut berupa

individu, minoritas kelompok agama, minoritas suku atau negara. Tidak ada artinya meneriakkan slogan toleransi jika tidak dibarengi dengan keadilan yang berpijak dari upaya menghormati hak-hak orang lain. Filsafat toleransi etis yang digagas oleh Mohammed Abed al-Jabri tidak hanya sekadar toleransi antaragama dan intraagama, tetapi toleransi antarperadaban.

3. Gamal al-Banna (lahir 15 Desember 1920)

Gamal al-Banna lahir pada tanggal 15 Desember 1920 di Mesir dan beliau merupakan tokoh pemikir yang progresif yang sudah menulis lebih dari 100 buku mengenai isu-isu pluralisme agama, kebebasan berpikir, gender dan sekularisme dan masih banyak lagi. Gamal al-Banna merupakan adik bungsu dari Hasan al-Banna yang merupakan pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Gamal melalui penafsiran rasionalnya terhadap Islam ingin menjelaskan kebenaran Islam yang autentik dari pesan Al-Quran dan Hadits. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011).

Pada awalnya Gamal merupakan aktivis dari Ikhwanul Muslimin yang ekslusif. Namun, dari setelah perenungan yang amat sangat panjang, sehingga Gamal mencoba berubah untuk berfikir lebih inklusif dalam melihat realitas umat agama lain. Gamal al-Banna menegaskan dalam Irwan bahwa Al-Quran melarang masing-masing kelompok agama mengklaim sebagai umat yang paling utama seraya merendahkan kelompok agama lain. Kelompok-kelompok agama tidak boleh mengklaim dirinya adalah adalah ahli surga sementara kelompok lain adalah ahli

neraka. Klaim-klaim seperti ini sama saja dengan merampas hak Allah. Sudah saatnya para dai Islam mengetahui bahwa mereka tidak dituntut untuk mengislamkan non-Muslim. Mereka tidak berhak mengklaim bahwa selain orang Islam akan masuk neraka karena kunci-kunci surga dan neraka tidak berada di tangan mereka. Sikap seperti ini merupakan pandangan keras terhadap wewenang Allah. Para dai hanya bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka kemudian membiarkan mereka menentukan keyakinan mereka sendiri. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011).

Inklusivisme pemikiran Gamal al-Banna menganjurkan agar kaum Muslimin tidak merendahkan kelompok lain karena belum tentu kaum Muslimin lebih baik dibandingkan non-Muslim. Gamal al-Banna setuju denga slogan yang cukup populer bahwa “Kami menemukan Islam di Barat dan kami menemukan kaum Muslim di Timur”. Gamal al-Banna membangun konsep pluralisme di atas argumentasi teologis bahwa tauhid artinya adalah hanya Allah yang tunggal. Segala sesuatu selain Allah pasti beragam. Alam semesta, elemen-elemen masyarakat dan ajaran agama sangat beragam. Tetapi Allah hanya satu, dengan demikian barang siapa mengakui ke-Esa-an Allah, maka dia harus mengakui pula keberagaman entitas selain Allah, tidak terkecuali keberagaman agama. Spirit pluralis tersebut di perkuat dengan semangat Piagam Madinah yang di canangkan oleh Rasulullah Saw guna membangun masyarakat yang plural, yang di dalamnya terdapat beberapa kaum seperti Islam (Anshar, Muhajirin), Yahudi dan

penganut agama lain di Madinah yang disatukan dalam satu komunitas (*Ummat Wahidah*). Aslati menerangkan dalam Piagam Madinah ada sikap melindungi dan saling tolong-menolong tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan juga muncul dalam sejumlah Hadis dan praktik Nabi. Bahkan sikap ini dianggap sebagai bagian yang melibatkan Tuhan. (Aslati, 2012, p. 4).

4. Hasan Hanafi (1935)

Hasan Hanafi merupakan professor di Universitas Kairo, dan ketika masa mudanya bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Dalam pandangan Hasan Hanafi lebih melihat bahwa fundamentalisme jangan hanya di pandang yang berpakaian jubah, bercelana cingkrang, berjenggot dan getol menyuarakan negara Islam. Dalam sisi pandangan Hasan Hanafi fundamentalisme ada dua arah yakni positif dan negatif. Fundamentalisme Islam merupakan istilah yang sangat popular di negeri Barat untuk mengidentifikasikan kebangkitan dan reformasi Islam. Namun, sejatinya istilah tersebut tidak dapat merepresentasikan gerakan politik tertentu dalam sejarah Islam. Ada beberapa tokoh-tokoh dalam gerakan yang di tulis oleh Hasan Hanafi sebagai promotor gerakan fundamentalisme Islam, antara lain Ahmad bin Hanbal, Ibn Taimiyah, Muhammad Ibn Abd Wahab, Al-Syaukani dan pada masa modern kembali disuarakan oleh para reformis sekaliber Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Rida, Muhammad Abduh, Al-Kawakibi, Ibn Badis dan lainnya.

Melihat deretan tokoh-tokoh tersebut, bahwa fundamentalisme bukanlah semata-mata sebuah gerakan

konservatif, regresif dan anti modernis. Di antara mereka banyak yang mengajak untuk mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang nilai-nilai kebebasan dan sistem demokrasi sembari menolak fanatisme dan eksklusivisme. Hasan Hanafi memandang bahwa fundamentalisme Islam itu ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya antara lain: *Pertama,* berkaitan erat dengan gerakan perlawanan terhadap imprealisme; *kedua,* dakwahnya mampu menyentuh kalangan pedagang, petani, dan pelajar; *ketiga,* struktur organisasinya dapat bekerja secara efektif; *keempat,* tolong menolong antaranggota; *kelima,* memiliki semangat patriotisme; *keenam,* terbuka dalam menerima pengalaman dari peradaban lain tanpa harus mengorbankan autentisitas tradisinya sendiri; *ketujuh,* memiliki program-program untuk mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan, kedamaian, kesatuan, kebebasan dan independen dari intervensi asing. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011, p. 89).

Sisi negatif dalam fundamentalisme Islam antara lain, *Pertama,* lebih cenderung dogmatis ketimbang rasionalis; *kedua,* dihegemoni oleh konsep kedaulatan Tuhan; *ketiga,* berambisi menegakkan negara Islam dan menerapkan syariat Islam dalam sebuah negara tanpa melihat kondisi masyarakat; *keempat,* terburu-buru melakukan perubahan sosial dengan cara kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan tanpa mau menunggu proses gradual; *kelima,* terperangkap dalam paradigma holistik yang mengajukan konsep berislam *kaffah* atau kafir; *keenam,* doktrin-doktrin fundamentalisme telah mengakibatkan para

anggotanya menentang sistem dan undang-undang; *ketujuh,* kelompok-kelompok fundamentalisme terjebak pada eksklusivisme.

5. Mohammed Sahrour

   Membincangkan Sahrour tidak terlepas dari sebuah *statement* mengenai sebuah pandangan terhadap teororisme. Muhammad Sahrour lahir di Salibiyah, Damaskus. Sejak kecil hingga menyandang gelar professor nya, Sahrour menamatkannya di sekolah dan perguruan tinggi sekuler (umum). Sahrour tidak pernah bergabung dengan institusi manapun, tapi dia belajar dengan giat dan autodidak dalam bidang keilmuwan Islam. Sahrour dengan sangat berani melakukan pembacaan kritis terhadap sumber agama dan mendekonstruksi *episteme* pemikiran konservatif yang sangat hegemonik dalam kebudayaan Islam.

   Pandangan mengenai teorisme juga mencoba dibedah dan diulas oleh Sahrour. Terorisme adalah tak tik dan bentuk kekerasan dari komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat dan pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik. Para teroris dengan memanfaatkan publikasi media massa, sengaja menciptakan ketakutan dan keresahan yang mendalam di masyarakat. Teroris yang antidemokrasi melakukan teror untuk membuktikan kegagalan demokrasi dan memaksakan khilafah Islamiyah sebagai alternatifnya.

   Sahrour menilai terorisme memiliki akar di dalam pemikiran Islam klasik. Sejak akhir periode Dinasti Umayyah dan awal periode Dinasti Abbasiyah, banyak gagasan dalam fiqih

Islam yang ditulis untuk memenuhi kepentingan penguasa yang despotis dan konservatif. Akibatnya banyak pendapat-pendapat yang radikal mengenai kebebasan beragama, seperti ketentuan eksekusi terhadap pelaku apostasi (murtad). Eksekusi ini dianggap oleh hukum Islam memandang Islam garang dan ekslusif, sehingga Sahrour mendekonstruksi sebuah pemikiran fiqih Islam yang inklusif dan toleran. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011).

Sahrour mengajak umat Islam untuk kembali pada sebuah hukum peperangan yang bersifat defensif sesuai al-Quran. Teologi peperangan ofensif harus dilenturkan dan dijinakkan dengan mereintrepretasikan konsep mati syahid. Sahrour menegaskan tidak ada dasar yang kuat bagi penyempitan makna mati syahid hanya untuk orang yang gugur di medan perang. Nabi Muhammad Saw, pun mengkritik para sahabatnya yang mempersempit makna mati syahid hanya untuk korban peperangan. Nabi dengan jelas menegaskan bahwa mati syahid terdiri atas gugur di medan perang *fi sabilillah,* mati di atas tempat tidur akibat luka perang, mati akibat wabah, mati mempertahankan hartanya, membela keluarga, membela agama, mencari ilmu, mencari rezeki.

Karena istilah dan konsep mati syahid bukan ialah bukan meledakkan bom di jalan, meledakkan bom di badan dengan dalih untuk memperjuangkan Islam dan mati untuk merebut bidadari 70 di surga. Karena pandangan yang begitu dangkal mencoba dikonstruksi oleh para teoris dengan mencoba membela agama dengan mati syahid, peperangan fisik, bom dan menegakkan khilafah, tapi tidak tahu kondisi dan

keadaan yang ada pada setiap daerah yang didudukinya. Qomaruddin Khan mengatakan bahwa dengan umat Islam membaca al-Quran, mengahafal al-Quran atau dalam kata lain masyarakat Qurani dan secara tidak langsung bahwa suatu negeri tersebut bisa dikatakan sebagai negeri Islam. (Enginner, 2000, p. 59).

6. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi sosok cendekiawan muslim asal Mesir yang lahir di Saft Turab pada 9 September 1926. Qaradawi sangat responsif menyikapi sebuah isu-isu sosial keagamaan yang muncul di dunia Islam melalui karya-karya fatwanya. Penulis kali ini mengambil sebuah sisi dimana Yusuf al-Qaradawi melihat dan memandang sebuah makna toleransi terhadap ucapan selamat natal. Dirasa bahwa poin ini merupakan poin yang klasik yang masih eksis dan masih hangat untuk diulas dengan sudah menjelang sebuah peradaban baru abad-30. Ucapan natal sering menjadi sebuah perbincangan dari lintas ulama Muslim di Indonesia maupun di dunia Islam internasional. Memaknai terhadap selamat natal kepada uamt non-muslim masih saja menimbulkan debat dan mengambil urgensi dari pengucapan secara teologis. Yusuf al-Qaradawi menyikapi dengan mempercayai bahwa moderatisme merupakan jembatan penghubung antara ekstrem kanan dan kiri. Moderatisme merupakan solusi yang tepat bagi radikalisme dan ekstremisme. Selain mendorong inklusifisme dalam bermazhab, tapi juga penganjuran inklusifisme terhadap non-muslim. Yusuf al-Qaradawi berfatwa bahwa mengucapkan selamat natal adalah bentuk penghormatan yang terpuji. Disitu ada sebuah makna

perubahan dalam konteks sosio-politik yang merupakan realitas perkembangan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Semua perkara meniscayakan perkembangan dinamis dan tidak ada perkara yang statis. Pola interaksi dengan non-muslim pun senantiasa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat sehingga menuntut perubahan sebuah hukum.

Al-Qaradawi memperbolehkan untuk mengucapkan selamat natal kepada non-muslim dengan tujuan untuk menjalin hubungan harmonis. Dalam menyikapi persoalan sosial keagamaan, pemahaman tekstual sangat dihindari oleh Yusuf al-Qaradawi. Dia lebih mengedepankan pemahaman yang substansial dengan mempertimbangkan tujuan universal Islam. Salah satu tujuan universal Islam ialah terwujudnya keadilan dan perdamaian. Allah berfirman : *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.* (QS AL-Mumtahanah 60:8). Untuk itu al-Qaradawi berpendapat bahwa mengucapkan selamat natal merupakan sebuah sarana untuk merealisasikan universal Islam.

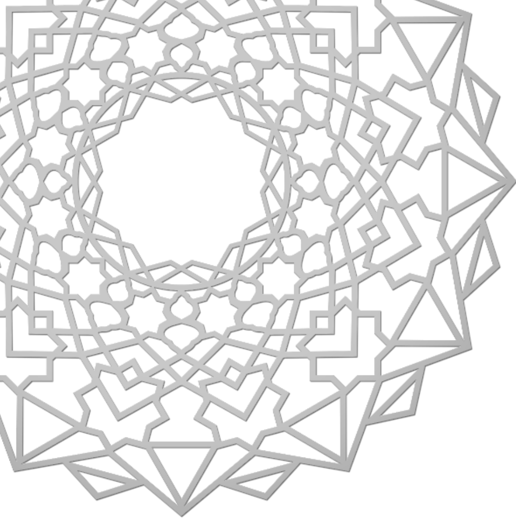
7. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau lebih akrab di sapa Gus Dur—sebuah panggilan di suatu pondok pesantren karena putera kyai. Kali ini penulis akan mengulas sebuah pandangan Gus Dur tentang kebhinnekaan. Tidak lain sebuah jiwa toleransi yang di dapat pada diri seorang Gus Dur ialah pada sebuah ajaran sufi yang menekankan pada gerak spiritual dan

metafisik hati untuk bisa menggerakkan hati bersifat toleransi. Sisi makna sufisme menempati posisi sentral yang menggerakkan budaya toleransi di lingkungan pesantren. Nuansa sufistik yang kental di pesantren tentu memengaruhi sebuah pandangan Gus Dur tentang pluralitik dan toleran. Sufisme mengajarkan toleransi, moderatisme, kooksistensi dan terhadap nilai-nilai humanistik.

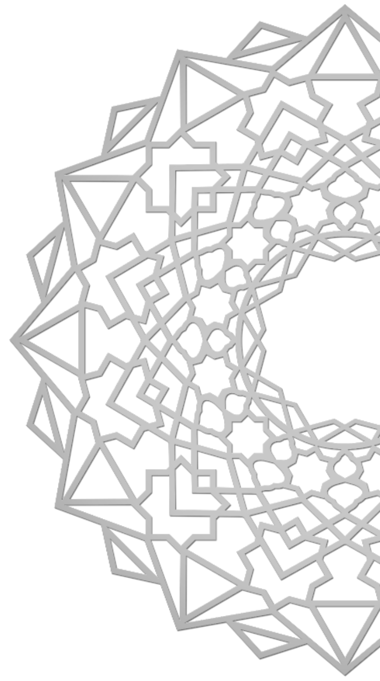
Toleransi ala Gus Dur didukung dengan sebuah semboyan yang memang populer di kalangan pesantren yakni "perbedaan umat Islam ialah rahmat". Perbedaan seyogianya tidak menimbulkan perpecahan, permusuhan. Perbedaan justru harus bisa hadir sebagai bentuk kasih sayang di tengah-tengah kebhinnekaan ini. Prinsip keislaman ini kemudian bersinergi dengan prinsip kebhinnekaan di Indonesia ini. Sehingga keberislaman daripada Gus Dur tidak mempersoal mengenai perbedaan agama, keyakinan, etnis, warna kulit dan posisi sosial.

Menurut Gus Dur, Al-Quran jelas menegaskan bahwa agama adalah wilayah privat yang tidak bisa diintervensi atau dipaksakan. Tuhan tidak berkehendak untuk menjadikan suatu umat menjadi seragam, karena senantiasa untuk bisa saling mengenal satu sama lain dengan perbedaan pendapat. Bagi Gus Dur, pluralisme adalah kesadaran yang mengakui keragaman kaum Muslim dan keragaman manusia—ada yang Muslim dan non-Muslim. Prinsip inilah yang kemudian ditanamkan di benak generasi bangsa demi menyongsong perdamaian hidup berdampingan antarpemeluk agama.



Bab III

Khilafah Nusantara Dengan Sudut Dua Arah



Membahas Khilafah tidak terlepas dari sebuah bayang-bayang gerakan radikalisme Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Khilafah (bahasa Arab: *Al-Khilāfah*) didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Secara umum, sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai Khilafah apabila menerapkan Islam sebagai Ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan, meskipun dengan penamaan atau struktur yang berbeda, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Sehingga pada penerapannya, ketika sebuah Negara Khilafah berdiri (atas persetujuan seluruh umat Islam), kemudian dibai'atnya seorang Khalifah, maka pendirian Negara Khilafah maupun pembai'atan Khalifah lain setelahnya menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad tentang pembai'atan Khalifah. (https://id.wikipedia.org/., 2020).

Khilafah memang mempunyai tujuan yakni memasukan sebuah sistem pemerintahan dalam sebuah negara terutama negara Islam. Namun, khilafah ini mempunyai sudut pandang yang berbeda untuk era hari ini, banyak gerombolan gerakan-gerakan radikalisme, fundamentalisme negatif yang ingin menerapkan negara Islam dengan hukum syariah dan pan-Islamisme. Ini merupakan hal yang mungkin belum begitu dipahami secara geografisnya, terutama di Indonesia. Rasulullah tidak ada anjuran secara pasti untuk kemudian mendirikan negara Islam. Ahmad Muhammad menjelaskan dalam tinjauan Asghar bahwa Islam tidak menyusun bentuk pemerintahan yang jelas, tidak pula memberikan rinciannya. Agama ini

hanya meletakkan beberapa prinsip dasar yang bersifat umum tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan memungkinkan dibangunnya sebuah negara untuk kesejahteraan masyarakat. Qomarudin Khan menerangkan dalam Asghar bahwa tujuan Al-Quran bukanlah menciptakan sebuah negara, melainkan sebuah masyarakat. Tidak adanya bentuk negara yang baku dalam Islam membawa hikmah tersendiri, karena itu apa pun bentuk serta wujud suatu negara, jika di dalamnya terbentuk sebuah masyarakat Qurani, maka itu pun sudah merupakan tanda-tanda negara Islam. (Enginner, 2000, p. 59).

Dalam pendangan penulis ketika menulis khilafah teringat sebuah gerakan Islam yang minoritas di Indonesia yakni Ahmadiyah. Ahmadiyah ini terutama JAI (Jamaat Ahmadiyah Indonesia) merupakan dalam sistem pemerintahan ialah khilafah yang berpusat di London. Dan semua anggota berbaiat kepada khalifah yang sekarang di jabat oleh Masroor Ahmad. Namun, berbeda makna lagi ketika khilafah di sandarkan pada sistem pemerintahan politik negeri. Semua tidak lepas dari gerakan radikalisme HTI, yang mana HTI ini ialah sebuah gerakan partai politik yang mempunyai tujuan untuk mendirikan negara Islam. Sehingga kenapa di penjuru dunia yang memang kemajemukan masyarakatnya menolak? Karena tidak sesuai dengan perjuangan yang diusung untuk mendirikan negara Islam, pun Indonesia yang juga menolaknya dan menghapus organisasinya.

Komarudin Hidayat melaporkan dalam resensi bukunya bahwa gagasan kekhalifahan digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai mitos. Di dalam pembahasan mengenai mitos modern, mitos berfungsi merampok atau mencuri konsep, bahasa, atau apapun yang digunakan di dalam banyak hal. Menurut Barthes, mitos adalah sistem komunikasi, ia adalah se-buah pesan ... mitos tidak bisa menjadi sebuah objek, konsep, atau

ide; mitos adalah cara penandaan (signification), sebuah bentuk. Sebagaimana dikatakan Sahal, bagi kelompok-kelompok yang mengidolakan kekhi-lafahan, mereka mengidolakan masa lalu. Dengan kata lain, menurutnya, masa depan bagi kelompok-kelompok ini adalah masa lalu. Mereka mengatakan bahwa penegakan khilafah adalah solusi bagi segala persoalan umat. Pemutlakan terhadap khilafah semacam itu pada gilirannya membuat mereka tidak mampu membedakan mana yang merupakan instrument (khilafah) dan mana yang tujuan (pemerintahan yang adil). (Hidayat, 2015, p. 201).

Kelompok-kelompok yang mengusung khilafah ini menggunakan cerita mengenai kejayaan Islam di masa lalu sebagai cara untuk menularkan semangat khilafah. Hal ini bisa dengan cepat menjalar pada umat Islam di Indonesia karena sebagian umat Islam di Indonesia sulit membedakan antara Islamisme dan Arabisme. Hidayat mengatakan bahwa setiap gerakan yang bernuansa politik ke-agamaan dengan menggunakan idiom Arab yang memiliki asosiasi dengan sejarah kejayaan Islam di masa lalu, seperti "khilafah" dengan mudah direspons umat Islam dengan semangat jihad. Jika merujuk pada mitos yang dikatakan oleh Barthes, kelompok ini membentuk sebuah tipe wicara dengan meminjam konsep-konsep ideal masalalu untuk mencapai kepentingan kelompok mereka di masa kini. Secara Bahasa, mereka mendistorsi keagungan Islam masa lalu sebagai tipe wicara untuk membangkitkan semangat dan keyakinan masyarakat bahwa seakan-akan khilafah adalah solusi bagi segala persoalan yang ada di masyarakat.

Indonesia merupakan negara-bangsa (nation state) yang memiliki komitmen kuat untuk melindungi dan memfasilitasi kehidupan beragama, Misrawi mengatakan bahwapada hakikatnya Nabi Muhammad Saw. tidak per-nah mewajibkan sistem khilafah diadopsi secara mentah-mentah sebagai satu-satunya sis-tem dalam Islam. Umat Islam diberikan

keleluasaan untuk menggunakan sistem yang co-cok dengan identitas dan realitas sosial-politik pada tempat mereka hidup. Untuk konteks Indonesia sebagai negara-bangsa yang sangat plural, gagasan mengenai sistem Islam yang konteks-tual ini menjadi penting. Bagi Misrawi, tugas kita sekarang adalah membongkar nalar mereka (pengusung ideologi khilafah) sembari memberikan pemaknaan baru terhadap ideologi khilafah dan syariat dalam konteks kekinian, khususnya Indonesia. (Hidayat, 2015).

Gagasan tentang kekhilafahan Islam telah menghadirkan berbagai perdebatan dan diskusi yang hingga hari ini terus berlanjut. Sebagian orang menganggap bahwa kekhilafahan adalah bentuk kehidupan beragama dan bernegara yang ideal. Akan tetapi, di sisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa kekhilafahan sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas"udi misalnya secara tegas mengatakan bahwa d-alam kontks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk "khilafah" yang sah menurut Islam/Al-Quran. Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran. Menurutnya, agenda bangsa Indonesia, termasuk atau terutama umat Islamnya sebagai mayoritas, bukan lagi mempertanyakan keab-sahan konsepsional negara kita, tetapi mengamalkannya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sudah saatnya kita tidak lagi mempersoalkan "wadah", tetapi mengamalkan keislaman kita untuk mencapai tujuan yang baik, yang digariskan oleh Islam dan Al-Quran.

Menyadur ungkapan mengenai khilafah dari sisi sejarahnya, agar bisa membingkai secara utuh mengenai khilafah. Henny menjelaskan bahwa; (Yusalia, 2016, pp. 139-143). Secara praktis, konsep Khilafah Islamiyah menjadi terminologi pada masa setelah Rasulullah SAW,

tepatnya di masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan kepemimpinan suku-suku setelah itu. Definisi yang sudah dijelaskan di bagian awal tulisan ini memang telah memperlihatkan bahwa khilafah adalah pemerintahan sesudah Rasul. Artinya, konsep khilafah memiliki rangkaian erat dengan kepemimpinan Muhammad SAW. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah al-Munawarah. Atas dasar ini tegaklah dasar, pilar, struktur, pasukan, serta hubungan ke dalam dan ke luar negeri Islam. Rasulullah SAW diyakini berhasil mendirikan negara yang berlandaskan pada azas akidah Islam, yaitu dua kalimat kunci: *La Illaha Illallah, Muhammadur Rasulullah* (Tiada Ilah kecuali Allah, Muhammad utusan Allah). Kalangan pendukung penerapan Khilafah Islamiyah percaya bahwa atas dasar inilah Rasul membangun pemerintahan, mengatur, dan mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia.Dari penjelasan singkat itu, kita sepakati bahwa era Rasul adalah era pemerintahan Islam. Dengan kata lain, pandangan yang mengatakan bahwa zaman Rasul bukanlah bentuk sebuah negara, akan berbeda pandangan dengan makalah ini. Asumsinya diawali dengan keyakinan bahwa zaman Rasul adalah bentuk pemerintahan Islam yang melengkapi diri dengan struktur dan susunan pemerintahan tersendiri. Kenyataan bahwa era Rasul adalah sebuah bentuk pemerintahan, terbukti dengan adanya pasukan-pasukan, wali untuk daerah tertentu, serta para amir. Beliau pernah menempatkan Utab bin Usaid sebagai wali di Mekkah, Bazan bin Sasan sebagai wali di Yaman, Mu'ad bin Jabal al-Khazraji sebagai wali di Janad, Khalid bin Walid sebagai amil di Shun'a, Abu Dujanah menjadi wali di Madinah. Semua wali dan amir tersebut mendasarkan diri pada sebuah "konstitusi" dasar yaitu Al Qur'an dan dijabarkan melalui Sunnah.

Dua fase perkembangan Islam dapat dilihat terjadi pada era kenabian ini. Fase yang menjadi titik sentral perkembangan umat Islam

selanjutnya. Fase ini yaitu, masa sebelum dan sesudah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Fase pertama tidak terlalu menjadi kajian dalam politik Islam karena ini adalah masa peletakan dasar-dasar keislaman. Boleh dikatakan ini adalah tumbuhnya embrio masyarakat Islam dan penetapan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Baru pada fase kedua, bangunan umat Islam berhasil dibentuk dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general bisa dijabarkan secara mendetail. Pada masa ini juga jamaah Islam telah menguasai urusannya sendiri dan telah hidup dalam era kebebasan dan independensi. Setelah Rasulullah wafat, dimulailah era kekhalifahan. Masa ini disebut juga dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama adalah Abu Bakar as Siddieq (632 –634 M), dilanjutkan oleh Umar ibn al-Khatab (634 –644 M), Utsman ibn Affan (644 –656 M), Ali ibn Abi Talib (656 –661 M). Pada masa ini wilayah pemerintahan Islam meliputi seluruh Jazirah Arab – dalam hitungan sekarang meliputi 7 negara –yaitu, ArabSaudi, Yaman Utara/Selatan, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain.

Permulaan dari penetapan institusi kekhalifahan adalah pertemuan di Saqifah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam, para sahabat, dan pemimpin sekte saat itu. Pertemuan yang mirip dengan muktamar luar biasa ini berlangsung dalam suasana dialog yang bebas dan terbuka. Hasil akhirnya adalah sebuah keputusan politik yang berpengaruh besar terhadap perjalanan umat Islam selanjutnya, yaitu berdirinya institusi kekhalifahan sebagai model pemerintahan Islam. Pertemuan ini juga yang kemudian menyepakati Abu Bakar as Siddieq sebagai khalifah pertama bagi dunia Islam setelah wafatnya nabi Muhammad saw. Dasar pemilihan Abu Bakar adalah karena mempunyai kedudukan keagamaan yang tinggi dibandingkan dengan sahabat lain, pihak yang pertama masuk Islam, telah berjasa besar dalam membela Islam, imannya teguh, serta sifat dan pribadinya yang sempurna bagi insan muslim. Terlihat bahwa pemilihan Abu Bakar bukan

berdasarkan aspek lain, seperti adat istiadat bangsa Arab yang memegang kuat kekuatan sekte dan suku.Masa-masa kekhalifahan di era ini, mulai memperlihatkan dinamika pemerintahan Islam. Konflik dan pertentangan mulai terjadi di antara sesama umat. Pertikaian yang kerap terjadi adalah perbedaan pandangan yang berujung pada konflik fisik antar suku. Terbukti, dari keempat khulafaur rasyidin, tiga diantaranya (Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib) mengakhiri masa jabatannya karena terbunuh. Begitupun dengan masa-masa setelah khulafaur rasyidin, yaitu era kepempinan dinasti-dinasti bangsa Arab, pertikaian perebutan jabatan khalifah semakin menguat.

Penggunaan gelar khalifah pasca Khulafa'al-rasyidin kemudian dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah di Damaskus (40-132H/661-750M) dengan 14 khalifah, Dinasti Bani Umayyah di Spanyol (Cordova dan Granada) dengan 57 khalifah (750-1492M), Dinasti Bani Abbas di Baghdad (132-656H'750-1258M) dengan 37 khalifah, Dinasti Fathimiyah di Mesir (297-567HJ/909-1171M) dengan 14 khalifah dan Dinasti Turki Usmani di Istanbul (1299-1922M) dengan 37 khalifah. Khalifah-khalifah tersebut di atas sekaligus telah mengubah sistem dan bentuk pemerintahan dari sistem musyawarah pada masa khulafa al-Rasyidin kepada sistem dan bentuk dinasti dan monarki. Perubahan sistem pemerintahan demokrasi dalam Islam menjadi *Monarkhiheridetis* (kerajaan turun-temurun) terjadi pada awal masa kekuasaan bani Umayyah.

Dalam hemat penulis dengan menyadur Henny bahwa pemerintahan pada zaman khalifah membuktikan hal itu. Sistem pemerintahannya, walaupun memiliki jangkauan luas, namun tetap terpusat pada satu pemimpin. Walaupun terpusat, ia tidak otoriter karena masing-masing wilayah punya kewenangan tertentu, dan hak-hak sipil mendapat penghargaan tinggi. Prinsip yang lebih sering dikenal adalah Syura,

‘Adalah, dan Musyawah. Jika diterjemahkan, ini mirip dengan konsep demokrasi ala barat, namun muatan utamanya tetap pada aspek Islami dengan landasan utama pada Al-Qur’an dan Sunnah. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah terlihat bahwa masing-masing dinasti yang berkuasa kerap terjadi konflik. Peperangan dan perebutan kekuasaan menjadi biasa pada saat itu. Bahkan beberapa khalifah di era Khulafaur Rasyidin, mengakhiri jabatannya karena terbunuh, yaitu Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Hal ini kemudian menjadi penguat alasan bahwa Daulah Khilafah Islamiyah, akan sulit diterapkan dalam konteks multikultur saat ini.

Diungkap mengenai kesejarahan dari khilafah sendiri ketika masa setelah Rasulullah hingga muncul sebuah konsep negara Islam memang menjadi sebuah perjalanan dalam kesejarahan. Setelah Rasulullah wafat itu yang kemudian menjadi sebuah alur di mana mencari sosok pengganti dan kemudian peran bagaimana untuk negara dan sistem apa. Namun, khilafah itu juga tidak bisa dipertahankan ketika Mustafa Kemal sebagai presiden Turki menghapus 3 Maret 1924 setelah pembentukan negara sekuler Turki pada Oktober 1923. Sejak saat itu bahwa institusi khilafah dipandang sebagai supremasi politik dan simbol kesatuan umat Islam telah lenyap.

Ajat Sudrajat melaporkan bahwa konsep khilafah Islamiyah kembai muncul ke permukaan setelah adanya sejumlah kelompok Muslim yang menyuarakannya secara nyaring pentingnya penyelenggaraan penyelenggaraan negara atas dasar syariah. Hal ini dipicu oleh adanya sejumlah kegagalan yang dilakukan para nasionalis sekuler dalam mengelola negara. Di Indonesia slogan-slogan yang mengarah dan menuntut di tegakkannya pemerintahan atas dasar khilafah antara lain dikumandangkan oleh HTI. Di antara slogan yang seringkali mereka kemukakan dan banyak tertulis di pamflet-pamflet atau spanduk-spanduk

yang disebarluaskan adalah berbunyi sudah saatnya khilafah memimpin dunia dengan syariah. Tuntutan mereka adalah agar bentuk negara menggunakan model khilafah sementara penyelenggaraaan negara atau pemerintahan didasarkan pada syariat Islam.

Dikutip oleh Ajat Sudrajat bahwa ajaran Islam, untuk mengatakan bahwa suatu pemerintahan dapat disebut Khilafah Islamiyah atau Negara Islam harus memenuhi beberapa prinsip dan kriteria. Prinsip *pertama* yang harus diyakini dan dipegangi adalah bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah, karena Dia lah yang menciptakannya. Prinsip *kedua* adalah bahwa syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi khilafahnya di bumi ini. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menuurut syariah Islam secara teknis disebut Khilafah al-Islamiyah atau Dar al-Islam. Menurut Qamaruddin Khan dalam Ajat dikatakan bahwa negara yang terikat oleh kaidah yang demikian dapat dinamakan sebagai negara agama (*religious state*).

Lebih jauh dikutip oleh Ajat, Iqbal mengatakan bahwa suatu negara disebut negara Islam apabila memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria itu adalah: *ummah* (masyarakat Muslim), *syariah* (diberlakukannya hukum Islam), dan *khalifah* (kepemimpinan masyarakat Muslim). Berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan dan kedaulatan mutlak ada pada Allah, maka negara Islam harus menjunjung tinggi syariah Islam. Selanjutnya, karena masyarakat Muslim (ummah) harus diperintah menurut hukum atau aturan Islam (syariah), dengan demikian menuntut adanya pemimpin (khalifah) yang akan melaksanakan dan menjalankannya. Tanggung jawab seorang khalifah atau kepala negara adalah melaksanakan syariah Islam dengan dipandu oleh tujuan pembentukan negara Islam (*Khilafah Islamiyah*) yaitu menuju kebahagiaan (*falah*). Negara atau khilafah menjadi sarana untuk

mengantarkan masyarakat Muslim mencapai keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun akherat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegangi ketika menjalankan pemerintahan adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan hak, kemerdekaan, dan solidaritas. (Sudrajat, 2009, pp. 2-7).

Melihat dari sebuah narasi yang penulis paparkan di atas dengan menyadur beberapa tulisan bahwa sebenarnya khilafah itu mempunyai maksud dalam menyatukan seluruh umat Islam dalam panji Islam. Namun, ada pergesaran yang kemudian bahwa khilafah diusung kembali sebagai jalan gerakan radikalisme, menyatukan umat Islam, akan tetapi dengan jalan kekerasan. Dan menolak mentah-mentah negara mana, pemerintah mana yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yakni dari Barat. Itu juga yang terjadi di Indonesia yang mengatakan bahwa pemimpin Indonesia itu *toghut*. Dan sehingga mereka bergerak secara radikalis dengan bermain senjata dan kekerasan dan berjihad di atas nama agama dengan memperjuangkan agama. Dikutip oleh Irwan, Hasan Hanafi berkata, sisi negatif dalam fundamentalisme Islam antara lain, *Pertama,* lebih cenderung dogmatis ketimbang rasionalis; *kedua,* dihegemoni oleh konsep kedaulatan Tuhan; *ketiga,* berambisi menegakkan negara Islam dan menerapkan syariat Islam dalam sebuah negara tanpa melihat kondisi masyarakat; *keempat,* terburu-buru melakukan perubahan sosial dengan cara kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan tanpa mau menunggu proses gradual; *kelima,* terperangkap dalam paradigma holistik yang mengajukan konsep berislam *kaffah* atau kafir; *keenam,* doktrin-doktrin fundamentalisme telah mengakibatkan para anggotanya menentang sistem dan undang-undang; *ketujuh,* kelompok-kelompok fundamentalisme terjebak pada eksklusivisme. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011, p. 90).

Menyadur uraian dari Ahmad Suhendra dalam menelaah makna khilafah dalam sudut pandang JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia). Memang ketika melihat dan menarasikan khilafah memang begitu riskan dan pasti arahnya dan *judge* nya ialah ke HTI atau sistem kepemimpinan dengan konsep syariah dan negara Islam. Namun, ada sudut pandang beda ketika membincangkan khilafah pada sudut pandang Ahmadiyah. Suhendra melaporkan, khilafah merupakan istilah yang menunjukkan pada kekuasaan tertinggi dalam masyarakat Muslim yang menggantikan atau melanjutkan tugas-tugas Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Sebab itu, kepala negara dalam pemerintahan dan kerajan Islam di masa lalu disebut *khalifah*. Khilafah menurut Ibn Khaldun dalam Suhendra, adalah kepemimpinan sesuai dengan tuntutan syari'at untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Adapun menurut Rasyid Rida dalam Suhendra bahwa *khilafah, imamah, imarah* adalah tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat. Setelah khulafa ar-rasyidun, lembaga khilafah dalam sejarah politik Islam terus berlanjut dengan munculnya Dinasti Umayah di Spanyol (756-1031 M), Dinasti Fatimiyah di Mesir (909-1171 M), Dinasti Utsmaniyah di Turki (1299-1924 M), Dinasti Syafawi di Iran (1501-1722 M) dan Dinasti Moghul di India (1526-1858 M). Khilafah ini berakhir sejak Mustafa Kemal Attaturk menghapuskannya pada 3 Maret 1924. Dalam sejarahnya, pasca pelarangan itu muncul upaya untuk menghidupkan kembali lembaga khilafah di dunia Islam.

Pada awal keberadaannya, para pemimpin Islam menyebut diri mereka *khalifah rasul Allah* (pengganti Nabi Allah). pada perkembangannya beberapa pemimpin Muslim memilih untuk menyebut dirinya khalifah Allah atau khalifahsaja.17Istilah khalifah (khilafah) mengalami perkembangan seiring dengan pergolakan politik saat itu.

Menurut kalangan Sunni khalifahsebagai pemimpin politik masyarakat Islam harus dipilih oleh kaum muslim atau perwakilan umat Islam. Kekhalifahan merupakan sebuah lembaga yang non-ilahiah, tidak berdasarkan pewahyuan, yang melanjutkan institusi kenabian. Dengan demikian, khalifah tidak dipilih berdasarkan wahyu atau pewahyuan, tetapi berdasarkan kesepakan atau konsensussecara demokratis. Adapun kalangan Syi'ah memiliki doktrin sendiri terkait khilafah. Khilafah dipahami sebagai sebuah lembaga yang bersifat ketuhanan (ilahiyah) yang menggantikan lembaga kenabian. Khilafah terkait dengan doktrin agama, spiritualdan politik. (Suhendra, 2015, p. 245).

Kalangan JAI berpandangan bahwa pemimpin tunggal dalam masyarakat muslim adalah Mirza Ghulam Ahmad. Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tahun 1908, kepemimpinan di Ahmadiyah digantikan Hakim Maulana Nuruddin sebagai Khalifatul Masih I. Dan doktrin *khalifa al-masih* didasarkan pada wasiat Mirza Ghulam Ahmad. Wafatnya Mirza Ghulam itu yang menandai sistem kekhalifahan mulai dijalankan JAI. Di dalam bukunya yang berjudul Ajaranku, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan, akulah *al-Masih* yang dijanjikan itu dan tidak ada lagi yang lain. Barangsiapa yang baiat kepadaku dengan sesungguh-sungguhnya dan menjadi pengikutku dengan hati setulus-tulusnya dan juga membuat dirinya mabuk di dalam ketaatan kepadaku hingga meninggalkan segala keinginan-keinginan pribadinya, rohku akan memberikan syafaat pada hari-hari yang penuh derita.

Sudut pandang pertama bahwa khilafah menurut Ahmadiyah adalah kepemimpinan sebagai pengganti untuk mengatur kehidupan suatu umat. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan spiritual (rohani). Nanang Sanusi yang merupakan Mubaligh Wilayah JAI menjelaskan, khilafah dalam JAI itu bermakna sebagai pimpinan rohani (spiritual). Jadi

yang dibangunsistem khilafah JAI adalah rohani bukan status sebagai pimpinan politik yang berorientasi pada kekuasaan. Karena khalifah itu representasi dari kepemimpinan dalam Islam. Khilafat adalah satu nizam rohani yang hak-hak kekuasaannya adalah dari atas ke bawah. Nizam khilafat adalah lanjutan dari nizam nubuwah, sedangkan syariat adalah hukum yang permanen. Dengan kata lain, sistem khilafat yang diterapkan selama ini menurut JAI bersifat wad'un ilahiyyun. Walaupun dalam prakteknya tidak sepenuhnya bersifat demikian. Karena dari khalifah II sampai khalifah V merupakan keturunan Mirza Ghulam Ahmad. Itu menunjukkan sistem monarkhi juga berselimut dalam kekhalifahan JAI.Kedudukan khalifah dalam JAI memiliki otoritas penuh terhadap segala urusan agama dan kelembagaan. Khalifah memiliki hak mengatur dan menerbitkan semua urusan jamaah. Sebab itu, secara esensial khalifah tidak harus menjadi kepala negara. Di dalam konteks bernegara, JAI mentaati semua peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dengan catatan tidak bertentangan dengan apa yang telah difatwakan oleh khalifah. Prinsip *sam'an wa ta'atan* sangat dipegang teguh semua JAI. (Suhendra, 2015).

Pada intinya, semua khalifah hanyalah pemimpin rohani. Sehingga dari sudut pandang Ahmadiyah bahwa khilafah itu mereka yang mempin suatu umat Islam seluruh dunia dengan tujuan membina spiritual atau rohani dalam Islam, seperti Ahmadiyah. Bukan kemudian menyandarkan untuk merebut dan mengganti dengan sebuah sistem dan bermain dalam aras politik, dan ketika tidak disetuji berjihad dengan mengebom diri. Itulah dilema makna khilafah yang kini mencuat kembali dengan berbagi sudut pandang makna terutama khilafah sebagai penyandaran makna negatif dan progresif.

Muhtador melaporkan bahwa topik tentang khilafah selalu menjadi perbincangan hangat dikalangan akademisi. Khilafah sebagai sistem

pemerintahan di dunia Islam menjadi bagian dari sejarah kebudayaan Islam, dimana setelah nabi meninggal dunia otoritas keagamaan digantikan oleh sahabat yang mempunyai otoritas keagamaan, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Oleh sebagaian golongan, sistem khilafah harus dipertahankan karena telah membwa kejayaan Islam dengan tanpa merubah model dan cara. Dengan alasan, bahwa sistem khalifah telah menorehkan tintas emas menyatukan umat Islam dunia. Pada lain pihak, khilafah hanya dianggap sebagai sistem lokal-temporal yang pernah ada pada masa Islam awal setelah nabi meninggal, karena kebutuhan umat Islam akan jawaban dari permasalah yang dihadapi, sehingga sistem khilafah pada masa tersebut eksistensinya dianggap mempunyai relevansi.Tetapi perubahan masa telah menuntut umat Islam lebih responsible, namun tidak menghilangkan ajaran yang pernah diajarakan Islam awal.

Dalam hal ini, Ahmadiyah muncul dengan melakukan reinterpretasi atas beberapa ajaran agama dalam menghadapi kompleksitas masalah agama, termasuk sistem khilafah. Khilafah yang didengungkan Ahmadiyah berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh sebagian umat Islam, seperti *Islamic State Iraq and Syiria* (ISIS), Hizbut Tahrir (HT) dan Al-Qaeda. Golongan tersebut memahami khilafah sebagia perjuangan dalam wilayah politik, dan menolak sistem demokrasi yang dipandang sebagai sistem tidak Islami. Perbedaan tersebut terletak pada metode memahami ajaran agama, Ahmadiyah meyakini khalifah tidak berhubungan dengan masalah pemerintahan (politik), tetapi wilayah spiritual (rohani).Meski secara teologis Ahmadiyah mempunyai dasar yang berkaitan dengan ke-mahdi-an, al-masih, mujaddid, kenabian, wahyu, jihad, dan khilafah. Konsep khilafah yang digagas Ahmadiyah memberi warna berbeda dari beberapa organisasi Islam lainnya. Sistem khilafah Ahmadiyah dianggap dapat memberikan

kontribusi atas problem sosial masyarakat Islam, karena khilafah yang ditawarkan hanya berhubungan dengan rohani.

Khilafah dalam sudut pandang Ahmadiyah atau khilafah yang diusung oleh Ahmadiyah ialah khilafah dalam bentuk spiritual, bukan bagian dari sistem demokrasi apapun di dunia ini. Ahmadiyah mempercayai bahwa khilafah harus ditegakkan kembali, tapi bukan yang dimaksud untuk kemudian mendirikan sebuah negara Islam atau jihad dengan kekerasan. Muhtador melaporkan Khalifah adalah bayang-bayang nabi dan karena itu, keberadaan khalifah mengemban misi agar peran dan misi kenabian tetap berlangsung di dunia ini. Oleh karena itu, para anggota jemaah Ahmadiyah mempercayai bahwa sistem kekhalifahan akan bertahan hingga akhir zaman. Menurut mereka bahwa khilafah bukanlah bagian dari sistem demokrasi apapun di dunia ini, melainkan bagian dari sistem spiritual dan keagamaan, karena kewenangan telah diturunkan dari atas dan seorang khalifah selalu didukung dan diberkati Allah yang senantiasa menyertainya. (Muhtador, 2016, pp. 81-85).

Khilafah yang kedua dalam sudut pandang gerakan keagamaan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Ada sebuah gerakan yang bergerak dalam sebuah kepartaian politik kenegaraan, yakni gerakan tersebut Hizbut Tahrir. Nilda melaporkan Hizbut Tahrir merupakan partai politik Islam yang mempunyai misi pembentukan *Khilafah Islamiyyah* sebagai salah satu agenda terbesarnya. Partai politik yang berideologi Islam ini telah tersebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, dengan jargonnya yaitu "Hizbut Tahrir Indonesia; Untuk Melanjutkan Kehidupan Islam". Gerakan ini berupaya menegakkan kembali negara Islam (*al-daulah al-Islamiyyah*) atau disebut juga dengan negara khilafah (*al-daulah al-khilafah*) sehingga dapat merealisasikan syariat Islam sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad, *al-Khulafa al-*

Rasyidun dan khalifah-khalifah Islam lainnya. Pembentukan sebuah negara Islam yang sesuai dengan syariat Islam, tentu tidak lepas dari resepsi mereka terhadap al-Qur'an baik dalam bentuk teks, pemahaman, serta bagaimana al-Qur'an hidup di dalam lingkungan sosial dan masyarakat kelompok HTI.

Nilda menjelaskan kembali dalam profil sejarah Hizbut Tahir nya bahwa Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sebagai partai politik yang berideologi Islam, serta membimbing umat mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah Swt dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir bukanlah organisasi kerohanian, bukan pula lembaga ilmiah, juga bukan lembaga pendidikan dan bukan pula lembaga yang hanya melakukan aktivitas sosial, namun mereka merupakan partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir telah menjadi partai politik Islam yang berkembang luas ke berbagai negara di seluruh dunia karena sistem khilafah yang tidak mengenal batas-batas geografis dan teritorial. Hizbut Tahrir merupakan partai politik yang didirikan sebuah kampung di daerah Haifa, Palestina oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977) pada tahun 1953 M. (Hayati, 2017, pp. 172-173).

Beberapa definisi dasar tentang Hizbut Tahrir bahwa mereka merupakan sebuah gerakan politik yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam dengan menegakkan khilafah Islamiyah. Pernyataan ini berbeda jauh dengan apa yang diusung oleh Ahmadiyah tentang khilafah, sehingga di sini terjadi sebuah *miss* antara sebuah perjuangan konsep khilafah dalam sebuah jihad yang dilakoni pada masing-masing gerakan Islami. Hizbut Tahrir lebih mempresentasikan berdirinya khilafah harus mengganti semua lini sistem pemerintahan dalam sebuah negara dan sedangkan Ahmadiyah memperjuangan tegaknya khilafah karena memperjuangkan apa yang dulu

Rasulullah pernah menerapkannya, tapi bentuknya ialah lebih ke dalam sebuah gerakan spiritualis, bukan politik yang diusung Hizbut Tahrir.

Nilda menjelaskan bahwa ideologi transnasionalisme HTI lebih merepresentasikan pergerakan "sentrifugalisme" Islam, di mana visi politiknya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal *Khilafah Islamiyah*. Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti, posisi konsep negara-bangsa (NKRI) yang sudah dianggap final di Indonesia. Dikutip Nilda, Taqiyuddin al-Nabhaini dalam terjemahan Muhammad Muhsin Rodhi menjelaskan bahwa alasan selanjutnya adalah motif mendirikan Negara Khilafah. Hal ini dilatari oleh runtuhnya Ke-khalifahan Islam terakhir, yakni Turki Utsmani pada tanggal 28 Rajab 1342 H/ 3 Maret 1924 M. Hal ini menjadi motif tersendiri yang melandasi kemunculan gerakan dan aktivitas yang bertujuan mengembalikan Negara Khilafah dan menegakkan hukum Islam. Dalam perspektif Hizbut Tahrir, seluruh undang-undang harus berlandaskan syariat Islam. (Hayati, 2017, p. 176).

Dari sini kemudian bisa di pahami bahwa kenapa jejak khilafah yang kemudian mencuat dan ramai untuk diperbincangan dari semua kalangan bahwa khilafah di Nusantara itu tidak ada. Namun, pengusungan film yang berdurasi 52 menit tersebut memberikan pemandangan tersendiri dan menggejolakkan Nusantara. Dan dalam film tersebut banyak di singgung mengenai hubungan Nusantara dengan Turki Utsmani, sedangkan sebuah kegagalan dalam memperjuangkan khilafah Islamiyah berakhir di Turki dengan dihentikan oleh Mustafa Kemal presiden Turki. Penyinggungan jejak khilafah ini begitu nampak ketika adanya film tersebut, sehingga penyandaran yang mendasar ialah bentuk penyikapan mengenai film tersebut dan megejawantahkan mengenai khilafah di

Nusantara. Perlu di pahami bahwa Nusantara itu tidak hanya Indonesia melihat dalam kacamata geografis, tapi Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan masih banyak lagi, itu sebuah wilayah yang bersekutu dengan nama Nusantara. Namun, kenapa penyandaran dalam film tersebut ialah hanya berkutat pada proses Islamisasi di Indonesia dan itu kurang kompleks dan hanya bercover yang berbolak-balik kearah wilayah Sumatera terkhusus Aceh.

Akar Sejarah Radikalisme dalam Islam

Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam, umumnya terjadi berkaitan dengan persoalan politik, yang kemudian berdampak pada agama sebagai simbol. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan, walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika khalifah Umar berkuasa. Namun gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru di mulai setelah terjadinya perang Shiffin di masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Hal ini di tandai dengan munculnya sebuah gerakan teologis radikal yang disebut dengan *"Khawarij"*. Dalam konteks teologi Islam, Khawarij berpedoman kepada kelompok atau aliran kalam yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dari barisannya, karena ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase (tahkim) ataupun perjanjian damai dengan kelompok pembrontak Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan kekuasaan (khalifah).

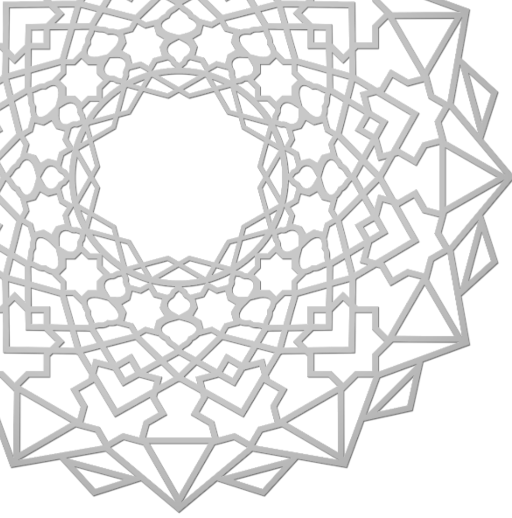
Radikalisme Khawarij sebagai pembrontakan telah terbukti dalam sejarah. Tidak hanya di masa Ali, Khawarij meneruskan perlawananya terhadap kekuasaan Islam resmi, baik di zaman Dinasti Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Oleh karena itu, mereka memilih Imam sendiri dan membentuk pemerintahan kaum Khawarij. Radikalisme gerakan ini bukan saja pada aspek pemahaman, tetapi juga pada aspek tindakan. Khawarij

memahami ajaran Islam secara harfiyah, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi; dan mereka merasa wajib melaksanakannya tanpa perlu penafsiran macam-macam. Pada masa pra-modern, gerakan fundamentalisme radikal muncul pada abad 12 H di Semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad bin Abd al-Wahab (1703-1792) yang kemudian dikenal sebagai gerakan wahabi. Inilah yang kemudian membentuk Salafisme awal, dengan Ibnu Taimiyah sebagai tokoh utamanya. Meski mereka mengklaim mengikuti kaum Salaf, figur-figur terkemuka dari generasi awal Islam hingga abad ke-2 H, tetapi pada praktiknya Salafisme cenderung mengikuti Mazhab Hanbali yang cenderung ketat dan literal. (Abdullah A. , p. 8).

Di era kotemporer, genealogis pemikiran Islam radikal diteruskan oleh Hasan al-Bana dengan mendirikan Ikhwanul Muslimin (IM). Sama halnya dengan wahabi, gerakan IM sama-sama gerakan Islam Radikal yang melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politisnya. Dari IM inilah tokoh-tokoh baru yang mewakili Islam radikal terlahir dan juga banyak para tokoh eks IM mendirikan gerakan-gerakan sempalan yang serupa di berbagai belahan dunia, di antaranya Sayyid Quthb, Abul A'la al-Maududi dengan mendirikan Jama'at-l Islam di Pakistan, Taqiyudin al-nabani dengan mendirikan Hizbut Tahrir, DR. Abdullah Azam. Syaikh AhmadYasin, Usamah bin Ladin dan masih banyak tokoh serta gerakan sempalan yang lahir dari rahim IM. Sayyid Quthb misalnya, tokoh pengganti Hasan al-Bana ini membawa IM menjadi gerakan yang sangat anti terhadap modernitas. Quthb menganggap bahwa modernitas sebagai "Jahiliyah Modern", yaitu modernitas sebagai "barbaritas baru". Konsep "Jahiliyyah modern" inilah yang pada akhirnya dianut oleh Abul A'la al-Maududi yang dengan tegas mengutuk modernitas dan ketidaksesuaiannya dengan dan bahayanya terhadap Islam. (Azra, 2016, p. 128).

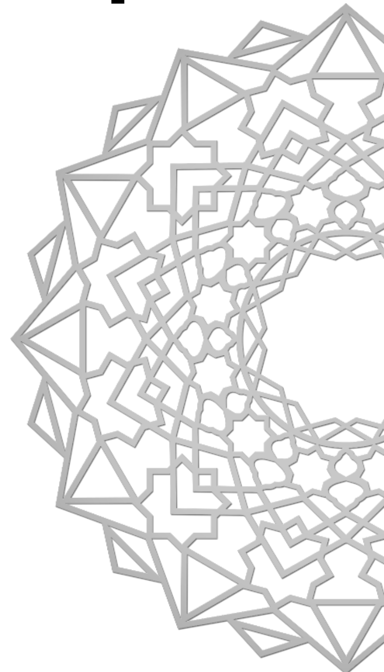
Pada mulanya, gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam serta mengajak kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam (salaf). Namun dalam perkembangan selanjutnya, gerakan Salafiyah tidak hanya menyentuh dimensi purifikasi dan ritual, namun juga mulai menyentuh dimensi intelektual dan politik. Bahkan, sebagaimana dicatat oleh para pengamat terhadap madzhab Hanbali, sejak masa Ibnu Taimiyah, kelompok Islam ini memulai tradisi mengecam hingga mengkafirkan kelompok-kelompok muslim yang tidak mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah. Hal ini tidak hanyaterbatas terhadap kaum syi'ah, yang diserang keras dalam bukunya *Minhaj as-Sunnah,* tetapi juga terhadap kelompok-kelompok Sunni lain seperti Asy'ariyah, Hanafiyah, kaum sufi dan lain-lain. Dengan demikian, tampak fundamentalisme radikal klasik dan pra modern banyak dipengaruhi oleh landasan teologi fundamental yang didasari oleh semangat kebangkitan Islam (*Revivalisme Islam).* (Rodin, 2016, p. 13).

Dari rekaman sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa fundamentalisme lebih menekankan pada pembenaran dalam menggunakan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan sebagi manifestasi dari keimanan. Dari peristiwa semacam itulah, kemudian ada sebagian orang yang membayangkan adanya sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan segala tindakan untuk membela agamanya, meskipun salah jalan, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam universal yang toleran dan akomodatif. Ketika Teks-teks keagamaan dipahami secara dangkal, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan paham dan gerakan radikal. Karena itulah, untuk menangkal gerakan radikal, salah satu langkah yang diperlukan adalah pemahaman yang benar dan komperhensif atas teks-teks keagamaan tersebut.



Bab IV

Fanatisme Beragama dan Berkelompok



Fanatik mengenai sebuah organisasi atau kelompok keagamaan menjadi *cethek* dan keras dalam berpikir dan sulit untuk menerima pemikiran-pemikiran yang lain. Dalam beragama pun juga harus mampu meletakkan sebuah konsep dalam berpikir dan berideologi agar menjadi pemikir yang berhaluan inklusif dengan tidak menerapkan sisi fanatik dalam beragama. Kemajemukan yang ada di Indonesia jadikanlah sebuah panggung yang bagaimana cara menyutradarai dengan alur yang indah dan harmonis. Kesan dan pesan lebih mendidik dan membangun, terutama keberbedaan dalam beragama menjadi sebuah kehidupan yang berarti dan bermakna. Kefanatikan yang sering menjadikan sebuah kelompok-kelompok agama maupun di luarnya, menjadi berpikir jumud dan kurang lentur dalam menerima sebuah hal dan pemikiran yang berbeda dari kelompok lain. Terutama mengenai sebuah konsep berakidah (kalam), di Indonesia yang sering menjadi sebuah ruang perdebatan ialah mengenai sebuah konsep berteologi. Banyak kelompok-kelompok aliran Islam yang kemudian mereka semua dengan pandangam masing-masing mengenai bagaimana beragama Islam, terutama berakidah, di sini yang sering kelindan dan tersulutnya kekonflikan. Kenapa?

Karena banyak aliran teologi yang datang dengan beberapa ormas yang kemudian masuk dan mengaku menjadi satu di antara 73 golongan yang masuk surga (dalam hadits). Dari sinilah yang kemudian menjadikan semua kelompok berlomba-lomba untuk mengakui kelompoknya yang berhak untuk masuk surga. Pertikaian ini lahir dari kefanatikan tersebut yang kemudian menjadi doktrin yang mendaging sehingga terjadilah kontras antar sesama. Mereka mengaku paling benar, mereka mengaku kelompokku yang paling benar, dan kelompokku yang masuk surga, dari stulah kemudian muncul percikan-percikap api konflik yang disebabkan pengakuan *truth claim* pada masing-masing kelompok akan sebuah

kebenaran yang berujung pada sisi kavling surga. Faisal Ismail melaporkan bahwa Islam sebenarnya sudah *final* dalam melihat kondisi pluralitas agama, yakni dengan mengakui keberadaan agama lain, bukan mengakui kebenaran masing-masing. (Ismail, Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama, 2014, p. 18). Dari sini yang sering menjadi sebuah isu sentral dan menuai kekonflikan karena penyebutan kafir dipicu dengan adanya *truth claim.*

Itu merupakan sudut pandang keberbedaan dengan umat agama lain. Memang harus mengakui keberadaan mereka, bukan mengakui kebenaran masing-masing, sehingga di ranah inilah yang sering terjadi konflik antar agama atau antar kelompok Islam. Gamal al-Banna menegaskan dalam Irwan bahwa Al-Quran melarang masing-masing kelompok agama mengklaim sebagai umat yang paling utama seraya merendahkan kelompok agama lain. Kelompok-kelompok agama tidak boleh mengklaim dirinya adalah adalah ahli surga sementara kelompok lain adalah ahli neraka. Klaim-klaim seperti ini sama saja dengan merampas hak Allah. Sudah saatnya para dai Islam mengetahui bahwa mereka tidak dituntut untuk mengislamkan non-Muslim. Mereka tidak berhak mengklaim bahwa selain orang Islam akan masuk neraka karena kunci-kunci surga dan neraka tidak berada di tangan mereka. Sikap seperti ini merupakan pandangan keras terhadap wewenang Allah. Para dai hanya bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka kemudian membiarkan mereka menentukan keyakinan mereka sendiri. (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011, pp. 17-22)

Dikutip Lusy Asa, Ali Fauzi dkk melaporkan bahwa konflik keagamaan sendiri diartikan sebagai perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Skala konflik agama

dibuat berdasarkan teori Galtung mengenai aspek konflik yaitu *contradiction* (perbedaan tujuan), *attitude* (menggambarkan persepsi yang dipengaruhi perasaan), dan *behavior* (perilaku konflik). Skala ini terdiri dari 13 item dengan 9 item yang tergolong mendukung teori (*favorable item*) dan 4 item yang tergolong tidak mendukung teori (*unfavorable item*). Dalam pandangan Rini dalam Lusy Asa bahwa fanatisme didefinisikan sebagai keyakinan yang berlebihan terhadap nilai-nilai atau sesuatu yang tidak berdasar pada akal sehat, sehingga sulit menerima pandangan orang lain. Fanatisme juga dijelaskan sebagai antusiasme atau gairah yang berlebihan, yang tidak didasarkan akal sehat tetapi berdasar pada emosi yang tidak terkontrol. (Akhrani, 2018, p. 43).

Fanatik beragama menjadi sebuah jalan di mana memandang hal-hal yang bersifat kaku, berlebihan dan tidak mempertimbangkan. Fanatik sering hadir pada mereka yang radikal terhadap agama. Menurut hemat penulis bahwa sebenarnya radikal itu merupakan sebuah istilah yang disandarkan oleh kaum Barat terhadap Islam mengenai sejumlah kejadian dan isu-isu yang mengenai kekerasan. Bom salah satunya yang menjadi isu dan peristiwa yang amat sangat ironis di dalam sebuah negara yang memiliki mayoritas umat Islam. Sehingga Barat menilai dan memberi label terutama pada sebuah gerakan-gerakan yang bersifat keras perihal agama, pengeboman liar, dari situlah istilah Radikalisme lahir. Menurut KH.Hasyim Muzadi, perlu dipahami pula pada istilah Radikal, Radikalisme dan Radikalisasi. Radikal: seseorang berpikir radikal atau maksudnya berpikir secara mendalam sampai pada titik akarnya. Radikalisme: radikal yang sudah menjadi paham (ideologi) atau madzhab pemikiran. Radikalisasi: ialah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika melihat ketidakadilan dalam masyarakat. Makna-makna yang disampaikan oleh Hasyim Muzadi merupakan salah satu arti dalam menjawab bahwa

radikalisme itu ragam makna. Menyoal beberapa nama-nama yang berlabuh pada Islam, seperti Islam Radikal, Fanatisme beragama, fundamentalisme Islam dan lainnya.

Menyikapi mengenai radikalisme memang sering di sandarkan kepada umat Islam, karena dengan dalih gerakan-gerakan yang tidak senonoh tersebut. Dalam hemat penulis bahwa sebenarnya Islam itu agama indah, agama suci, agama yang harmonis, agama yang damai, tapi kenapa kemudian ada segelintir kelompok yang menegasikan untuk tidak pro dengan sebuah pemerintahan atau sistem politik negeri hingga ada pemberontakan menjadi sebuah konflik-kisruh agama dengan sebuah aliansi agama sebagai sebuah gerakan yang radikal yang sehingga sebuah labeh besandar kepada mereka bertajuk gerakan radikalisme. Senyampang itu penyandaran nama dan label radikalisme ialah karena mereka ketika berperang menggunakan lafal *Allahuakbar* dan bendera berlafal *laa illa ha illa Allah,* dan itu sebabnya ada dari sebuah kelompok yang menamai mereka sebuah gerakan radikalisme. Pada dasarnya Islam yang indah, menjadi hitam pekat karena ulah mereka yang memberi label dan gerakan aksi radikal tersebut.

Fanatik beragama menjadikan jumud dalam berpikir dan stagnasi pada aras di mana ada sebuah harmoni. Yang sering muncul pada kefanatikan beragama maupun berkelompok ialah mencuatnya konflik di antara kedua kubu. Fanatik memang suatu pemandangan yang tak elok untuk terus di pelihara di Indonesia. Kenapa? Karena dengan heterogennya agama, kelompok agama, suku, etnis dan tradisi yang menjadikan mereka akan berselancar di atas sebauh nama untuk perpecahan negeri. Yang sepatutnya untuk bisa saling menyatukan dan membangun keharmonisan, malahan dipecah oleh sebuah kefanatikan yang intoleran kepada keadaan yang ada di Indonesia. Imam Hanafi mengatakan bahwa konflik

sesungguhnya menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman. Eksistensi konflik sangat urgen sekali dalam kerangka peningkatan kualitas kehidupan manusia. Kehidupan tidak dapat berjalan dengan tegak tanpa ada konflik, sehingga yang perlu bagi manusia adalah bagaimana cara mereka memadukan dan mencari solusi agar konflik tersebut tidak menimbulkan kehancuran (kerusakan), namun sebaliknya dapat membantu manusia mewujudkan keseimbangan dan tumbuhnya pola introspeksi diri dalam sebuah komunitas masyarakat. (Hanafi, 2018, p. 48).

Imam Hanafi melaporkan Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa bangsa ini hidup di negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Negara senantiasa mengapresiasi keberagaman budaya dan agama (pluralisme). Meskipun untuk mewujudkan sikap toleransi, dialog lintas budaya dan agama, selalu mendapat berbagai tantangan, negara selalu mempunyai niat dan iktikad baik. Keinginan negara yang senantiasa mengedepankan toleransi, multikultural, sering bertolak belakang dengan kondisi faktual terkini, karenamasih banyaknya bukti-bukti intoleransi dalam kehidupan. Intoleransi ini menimbulkan pertentangan atau yang lebih populer disebut konflik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Agama berlaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, muncul pengaruh negatif globalisasi. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama masih sebatas pada tataran teori, sementara pada prakteknya dalam kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai tersebut belum dapat diamalkan sepenuhnya oleh masyarakat. (Hanafi, 2018).

Degradasi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi, persaudaraan, kesetaraan, dan kerukunan, menimbulkan konflik horisontal. Nilai-nilai tersebut sering kali dianggap tidak berperan ketika dihadapkan

pada konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik yang terjadi antara lain adalah konflik antar ras atau suku di Kalimantan, antar kelompok beragama seperti pembakaran gereja atau masjid (peristiwa Ketapang, Jakarta 1998, Kupang, Januari 1999, Gereja GKI Bogor pada Desember 2012); antar jamaah atau madzhab (Ahmadiyah di Cikeusik 6 Februari 2011, Syiah di Sampang, Madura pada Desember 2011); penjarahan, tawuran, pembunuhan, dan pemerkosaan. Berbagai konflik yang telah menimbulkan tindak kriminal tersebut, akan menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Konflik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai agama belum diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan adanya revitalisasi nilai-nilai agama. Sehingga konflik agama itu dapat diminimalisir.

Seperti yang dilansir dalam *tribunnews.com* bahwa banyak tragedi yang telah dirangkum dalam potret perjalanan sejarah nasional yang beragama konflik terjadi dengan isu-isu agama. Di Indonesia isu agama menjadi isu sentral yang menyebabkan terjadinya beberapa konflik. Seperti kejadian yang pernah dialami saudara-saudara kita yaitu konflik antar agama di kota Ambon Maluku yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1999, selanjutnya kerusuhan di Poso Sulawesi Tengah yang merupakan contoh konflik agama yang berdampak cukup serius dan berlarut larut karena kurang cepatnya penanganan, Poso I terjadi antara 25-29 Desember 1998, Poso II terjadi antara 17-21 April 2000 serta Poso III terjadi antara 16 Mei hingga 15 Juni 2000.

Dari konflik tersebut sampai sekarang tidak diketahui pasti seberapa besar korban dan kerugian yang diderita masyarakat, dan yang pasti kejadian tersebut menimbulkan trauma serta penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya. Contoh terbaru yang masih hangat dalam benak kita dan menjadi pemberitaan utama di media massa nasional

yaitu penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama di berbagai daerah. Walaupun itu belum tentu dilakukan atas nama agama, namun persepsi yang terbentuk di masyarakat kejadian tersebut merupakan upaya untuk membenturkan umat agama satu dengan yang lainnya. Apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani dengan cepat dan tuntas oleh aparat keamanan maka dikhawatirkan masyarakat bisa terprovokasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah bangsa Indonesia. (tribunnews.com).

Seperti juga yang terjadi di sebuah daerah-daerah di Jawa Timur khususnya pernah tercatat sebuah kasus di salah satu kabupaten yakni Jember sekitar ada lima konflik keagamaan yang muncul di Jember di antaranya aliran Qodriatul Qosimiyah, kemudian pesantren Rabbani, lalu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i, dan konflik Syiah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Konflik pembakaran Musholla warga LDII di Tanggul Jember tahun 2008, pengerusakkan Pesantren Rabbani Jember tahun 2011, pengerusakkan Pesantren di Pasuruan tahun 2011, konflik ajaran Syiah di Puger Jember, konflik Thoriqoh Wahidiyah di Jember. Itu merupakan sedikit gambaran mengenai sebuah konflik antaragama, antarkelompok yang menjadikan sebuah perpecahan arus di mana kehidupan antarumat agama di Indonesia. Terutama faktor fanatik terhadap suatu golongan yang menjadikan kekakuan dalam melihat suatu kelompok lain. Indonesia yang beragam ini harus bisa disatukan dengan keharmonisan, jangan berfanatik untuk saling memecah belah. (https://ampkompas.com.cdn.ampproject.org., 2013).

Mengutip Imam Hanafi, Imam Subkhan berpendapat bahwa konflik dapat diminimalisir bila ada agenda ketulusan membangun dialog dan membuka prasangka di tingkat basis, negara juga punya kewajiban

menjamin hak-hak warganya. Misalnya hak untuk hidup aman tanpa ancaman dalam menjalankan kepercayaan dan agamanya, jaminan kebebasan beribadah, berpendapat dan berkumpul. Namun, melihat fakta ketidakberdayaan penegak hukum menghadapi kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak mereka sehingga melanggar hak orang lain. Jalan yang paling mungkin adalah kembali ke praktik keseharian, yaitu wacana dan relasi kemanusiaan yang kita selami sehari-hari, yang terkadang dianggap remeh, namun sesungguhnya punya peran besar dalam membangun kelenturan sosial atau yang dikenal dengan istilah toleransi dan pluralisme, yang tidak dibebani oleh narasi-narasi. (Hanafi, 2018, p. 50).

Fanatisme dalam Dua Arah

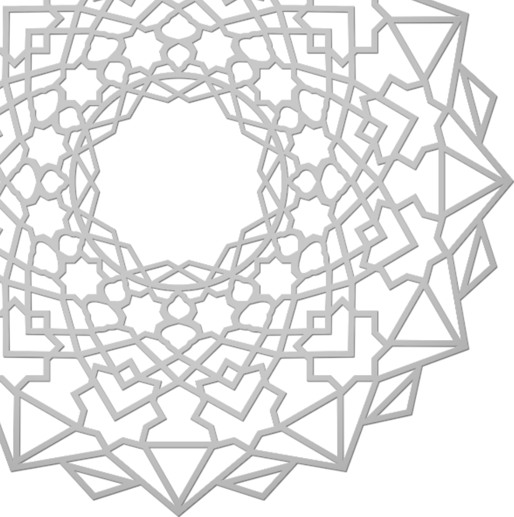
Membincangkan masalah fanatik terhadap agama atau kelompok tidak terlepas dari sebuah peran dari doktrin. Fanataik dalam beragama atau bermadzab akan menjadikan diri kita berpandangan hanya satu sudut pandang dan tidak bisa *move on* sehingga timbullah benih-benih fanatik pada kelompok golongan yang kemudian ketika kelompok tersebut melaksanakan suatu kegiatan mudah untuk menganggap kafir, bidah atau sebutan buruk lainnya sebelum mereka mengetahui esensi maknanya. Keyakinan dipastiakn 100 % mengajarkan mengenai sebuah akidah dan doktrin pada semua umatnya, tapi terlepas dari itu semua bahwa setiap indvidu memiliki hak untuk bagaimana menyambung dan belajar kepada umat lain dari sisi humanismenya, sosialnya, bukan teologisnya. Alangkah baiknya kalau sering adanya ruang perjumpaan yang damai, menghadirkan beragam tokoh agama, pemuda lintas iman dan jurnalis atau yang partisipan lainnya yang bisa turut andil dalam membangun keharmonisan antarpemeluk agama di Indonesia khususnya. Dari sinilah kemudian akan terbangun pada sisi manusia untuk saling melihat agama lain dari sudut pandang langsung kepada tokohnya. Dan jangan ada ketertutupan pada

masing-masing agama, harusnya bisa bertukar pikiran untuk saling tanya jawab agar terdapat *balancing* dari semua pihak untuk saling memecahkan permasalahan. Ketika semua beragama dari apapun agama kalian, coba cari sisi dimana agama mengajarkan sisi kemanusiaan, ketika kita semua bisa membagi kasih, inklusifitas beragama kenapa harus eksklusif beragama.

Sehingga penulis pada poin ini akan ulas bahwa fanatisme dalam beragama atau bermadzhab itu ada dua sudut pandang, yakni fanatisme positif dan fanatisme negatif. Fanatik positif; adapun fanatik positif ialah fanatik terhadap agamanya sendiri dengan meyakini dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama tersebut. Dalam artian semakin kita cinta akan agama tersebut semakin tumbuh pula rasa memaknai pada agama lain. Dan seharusnya ini menjadi sebuah implikasi yang bagus untuk merajut keharmonisan. Bukan malah kita saklek kepada agama atau kelompok agama. Namun, harus mampu mencari sisi-sisi dimana agama mengajarkan tentang kemanusiaan. Dengan ragamnya agama di negeri ini, pun harus di pahami secara realitas dengan damai, jangan malah berfanatik, paling benar sendiri, itu merupakan mencari sebuah konflik dalam selimut. Harusnya bisa membangun keharmonisan.

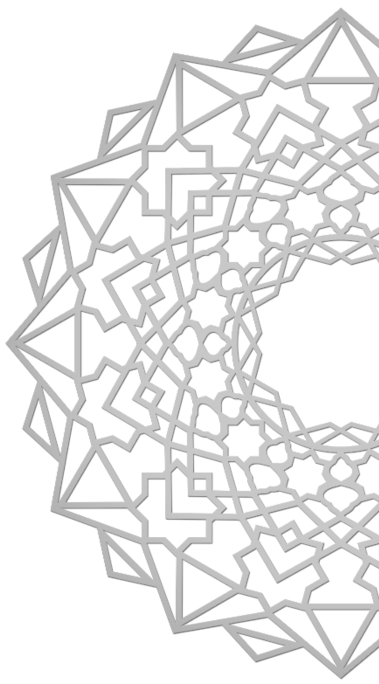
Fanatik negatif; fanatik yang merupakan bentuk kurang bagus, kenapa? Karena mereka menunjukkan sebuah perspektif yang kurang etis dalam merespon kehadiran agama atau kelompok lain. Mereka mencari sebuah kebenaran di dunia ini dan mencari kursi kebenaran di atas seluruh agama di muka bumi. Yang kemudian muncul *truth claim* pada masing-masing kelompok yang menyebabkan konflik antarumat agama atau antarkelompok di dalam agama. Sangat riskan ketika harus menginterpretasikan sebuah makna mengakui keberadaaan agama lain, padahal dengan mengakui keberadaaan mereka tersebut menjadikan sebuah rajutan-rajutan harmonis dan menumbuhkan benih-benih kedamaian.

Namun, apalah daya ketika fanatik agama atau madzhab di bawa ke aras negatif dan mencari kebenaran pada masing-masing. Gamal al-Banna menegaskan dalam Irwan bahwa Al-Quran melarang masing-masing kelompok agama mengklaim sebagai umat yang paling utama seraya merendahkan kelompok agama lain. Kelompok-kelompok agama tidak boleh mengklaim dirinya adalah adalah ahli surga sementara kelompok lain adalah ahli neraka. Klaim-klaim seperti ini sama saja dengan merampas hak Allah. Sudah saatnya para dai Islam mengetahui bahwa mereka tidak dituntut untuk mengislamkan non-Muslim. Mereka tidak berhak mengklaim bahwa selain orang Islam akan masuk neraka karena kunci-kunci surga dan neraka tidak berada di tangan mereka. Sikap seperti ini merupakan pandangan keras terhadap wewenang Allah. Para dai hanya bertugas untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka kemudian membiarkan mereka menentukan keyakinan mereka sendiri. (Ismail, Islam, Konstitusional dan Pluralisme; memperkuat fondasi kebangsaan dan merawat relasi kebhinekaan, 2019, p. 71).



Bab V

Era Peradaban



Islam di Indonesia harus bisa dan mampu membangun kesolidaritasan antar semua lini kehidupan umat agama. Tidak bisa di pungkiri bahwa kehidupan yang sudah menjadi sebuah kemajemukan di negeri ini harus terus terpelihara dengan indah. Islam sebagai mayoritas sepatutnya untuk bisa terus mengayomi dengan agama-agama lain dengan bersikap toleransi. Mengakui keberadaan mereka ialah merupakan cara yang arif dan bijak dalam membangun keharmonisan antarumat agama di Indonesia. Ke *final* an ini harus bisa menjadi sebuah narasi yang utuh dan mampu mengakomodir seluruh pemeluk agama di aras nasional-transisional hingga lokal. Keberjibakuan yang sering di bawa ke arus teologis sering menimbulkan perpecahan yang tidak ada ujungnya. Peringgungan yang kadang harusnya tersudahi malah terakumulasi menjadi rekonsiliasi konflik nuansa hati. Harusnya bisa tentram dan damai, hadirnya agama-agama di muka bumi ini ialah bentuk keberagaman yang Tuhan berikan, kenapa kemudian kita semua mengelak dan membiarkan keterserakahan ini menjadi hak milik satu agama?

Jangan jadikan perbedaan di antara kita semua, pemeluk agama menjadi pecah belah karena ulah yang tidak sepatutnya di lontarkan. Rezim Orde Baru yang sudah menyita kungkungan beberapa umat agama, sisi ekonomi, aras politik merasa memikul beban dengan tekanan tangan besi sang otoriter. Tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem *sekuler*, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas umat Islam dan adapun ada penghayat agama lokal maupun agama lain, sehingga ini bukan aras bagaimana sistem *sekuler* bermain di kubangan ibu pertiwi. Menoleh ke sistem *islami,* apakah juga bisa dengan kemajemukan Indonesia yang memang tidak bisa di pisahkan dari sosok-sosok penghuni negeri ini. Jangan kemudian mengakomodir bahwa hak-hak yang tak sepatutnya di lontarkan kemudian menjadi sebuah perpecahan dan bukan lagi menjadi

sebuah negara yang berpedoman kebebasan agama, malahan penekanan agama. Mana sikap kepedulian, mana sikap penghargaan dan apa itu yang diajarkan oleh Nabiyuna Muhammad Saw dan Al-Quran.

Sehingga keharmonisan yang harus menjadi sebuah senjata utama ialah memberi ruang gerak yang aktif kepada semua elemen dan kehadiran mereka itu ada dan nyata. Jangan memberika *statement* mengkirikan bahwa surga milik golongan kami dan neraka itu milikmu. Jangan mengambil hak-hak Allah mengenai surga dan neraka, kita semua bukan pengkavling surga atau neraka, Allah sang maha penentu. Dalam artian bahwa kehidupan yang hendak dicapai di negeri ini, bagaimana kehadiran yang memang benar-benar hadir menjadi sebuah salah satu kehidupan yang *wasath* ialah bagaimana menyikapi keberbedaan dengan kedinginan sikap dan ruang. Nomenklatur konflik, ekstrimisme, fanatisme dan radikalisme buang dan tanamkan inklusivisme, humanisme dalam melihat pluralitas yang melengkapi makhluk-makhluk Tuhan yang di turunkan di bumi pertiwi ini.

Tidak ada waktu untuk mengembalikan diri dengan menoleh atau mundur jauh kebelakang ketika masa-masa lampau. Sudah saatnya sebuah era-peradaban baru lahir, era-peradaban yang moderat berkemajuan mereproduksi, inilah yang akan menjadi kubangan bergelombang yang menghantarkan 100 tahun Indonesia merdeka. Menyongsong era-berperadaban baru dalam moderasi-kemajuan beragama di Indonesia, jangan menjadikan sisi perbedaan menjadi sisi di mana sebuah problem. Saatnya saling bergandengan, membangun dan berdamai bersama ditengah-tengah membangun umat agama yang berperadaban. Melihat realitas yang sudah terbangun lama dan memang dari Tuhan sudah mencipta Indonesia dengan penuh keragaman, maka hanya perlu pengopenan yang indah. Fanatisme ber mazhab baik agama, jangan menjadikan kemandekan dan keterselisihan dalam hidup beragama.

Inklusifitas Islam: Sebuah Rumus dalam Membangun Peradaban Islam Harmonis

Sebagai rumah bersama dalam beragama, Indonesia harus memberikan banyak ruang-ruang yang bisa diisi dengan naunsa atmosfir beragama yang indah. Terutama sudut ini lebih mengarah kepada pelaku dalam kegiatan yakni umat, baik Islam maupun agama lain. Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk oleh hampir sebagian masyarakat Indonesia harus bisa menjadi payung untuk berteduh bersama. Moderasi yang akhir-akhir ini menjadi formula dalam merajut harmonis sosial beragama dengan pondasi dasar dari kajian agama, termasuk Islam. Korespondensi yang aktif dan saling berinteraksi, baik sesama atau ekstra, harus bisa saling berbagi kisah sejarah, dengan tujuan akhir untuk membangun bersama dalam peradaban yang maju. Fanatis, ini sering tumbuh dan berkembang, pada individu atau kelompok Islam, karena pemicu terhadap doktrinal agama yang salah dalam kajian kontekstualnya. Sehingga yang terjadi ialah kekerasan, eksklusifitas beragama, fanatisme beragama, radikalitas beragama hingga mengakibatkan ummat dan bangsa maupun agama, karena salah pada tataran tafsir yang masih belum tahap makna dalam (spiritualitas).

Khusna Amal melaporkan bahwa organisasi keagamaan berhaluan moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan juga masyarakat bangsa yang mempunyai misi membentuk *nation building* non-etnis, non-sektarian, dan inklusif—adalah menguatnya ideologi trans-nasionalisme. Kalau dalam bidang ekonomi-politik, ideologi transnasionalisme mengejawantah dalam bentuk kebangkitan kuasa neo-liberalisme yang ditandai oleh dominasi korporasi global/fundamentalisme pasar. Dalam kehidupan sosial-agama, ideologi transnasionalisme terekspresikan dalam bentuk *religious extrimism* (*global Islamism, Hindu,*

evangelism) ataupun *ideological extrimism* yang akhir-akhir ini cenderung menguat. (Amal 2018, hal. 3).

Lebih lanjut lagi Amal menjelaskan bahwa fenomena radikalisme yang mengambil identitas agama di tanah air juga cenderung mengalami peningkatan dari pada penyusutan. Kekerasan fisik yang dilakukan sekelompok umat Islam terhadap komunitas Ahamadiyah di Bogor, Lombok, dan Jakarta baru-baru ini, penyerangan massa FPI terhadap massa FKKB dalam kasus kekerasan Monas beberapa waktu lalu, dan aneka kekerasan baik fisik, psikologis, politis, maupun teologis, yang dilakukan sekelompok umat atas umat yang lain, dan semakin maraknya pemahaman agama yang eksklusif-formalistik, merupakan sederetan fakta yang menegaskan betapa grafik radikalisme agama di tanah air juga mengalami peningkatan daripada penurunan. (Amal 2018). Di luar semua organisasi ini, mungkin juga ada Muslim yang terkena kekerasan agama atau euforia agama, berpartisipasi dalam Aksi Bela Islam. Jadi, bangun jiwa humanis, harmonis dalam beragama, terutama Islam sebagai agama mayoritas, berikan sudut sisi yang indah akan ruh-ruh Islam untuk hidup bersama. (Amal, Explaining Islamic Populism In South East Asia: An Indonesian Muslim Intellectuals Perspective 2020, hal.584).

Bertolak dari isu agama dan kelompok Islam, bahwa kelas menengah santri juga ikutserta memainkan peran politik sebagai masyarakat sosial *civil society*. Politik disini bukan sebuah tujuan yang praktis, harapan penulis ialah politik kulturalistik yang mengakui dan menghargai sebuah kemajemukan. Kolektivitas atau kesamaan identitas ini masih menjadi sebuah rajutan jiwa bersama dalam membangun politik. Dalam kelompok-kelompok sosial atas dasar perbedaan identitas (agama, etnik, gender, seks, status sosial) dan kelas (ekonomi kuat, sedang, lemah), santri baru masih memiliki kesadaran politik untuk membangun kolektivitas—kesamaan

identitas (*identity in difference*) dalam perbedaan dan keberagamaan dalam kebersamaan identitas (*difference in identity*). (Amal, Kelas Menengah NU 2015, hal. vii).

Dalam sebuah pengakuan dan menjunjung tinggi atas hak, kearifan dan keutamaan dalam hidup berdampingan, harus ada realisasi yang bisa menyatukan persepsi untuk membangun, pandangan ini bisa diartikan pula dengan populisme sosial. Hidup dengan pluralitas tetangga, kelompok dan lainnya, menjadi sebuah fenomena yang secara historisisme tidak bisa dielakkan, itulah realitas yang harus bisa diejawanthkan akan prosesi dalam hidup pranata sosial bermasyarakat. Terutama dalam sebuah kelompok Islam, misalnya NU, dalam sebuah ritus nya atau amaliahnya, sering melibatkan sebuah konsensus bersama utnuk keterikatan akan seluruh anggota. Pengusungan nama tradisionalis dan nasionalis, menjadi basis yang tidak bisa dihilangkan pada badan dan jiwa NU. Meskipun era ini, tidak begitu eksplisit menonjol pada raga (nasionalismenya, tradisionalismenya), melainkan pada sisi karya, batin, akal-pemikirannya lah yang menjadi landasan dalam membangun jiwa nasionalismenya. Khusna Amal dkk, melaporkan bahwa:

> Included here are Islamic groups which, in their social activ-ism, also frequently intersect with the issue of populism. The peaceful mass mobilization carried out by Nahdlatul Ulama (NU) organization in the istighatsah Kubra recently, for example, which raised the issue of nationalism, tolerance and diversity, could be classified as a populist movement which at the same time used popular issues and media. Such a popular movement can be found in Indonesian Islamic organizations in its long history, especially since the era of colonialism and it continues to exist in the post-colonial period. During the era of colonialism, NU even success-fully mobilized the masses (their santri or students) in large numbers using the spirit or religious issues. Resolusi jihad was a kind of populist movement launched by NU in mobilizing the

> masses (people) to fight against the colonial elite. (M. Khusna Amal 2020, hal. 38).

Setidaknya bisa ditafsirkan bahwa kelompok Islam yang memiliki basis kuat, seperti NU juga mempunyai sebuah mobilisasi massa dalam membangun kondusifitas umat. Mobilisasi massa damai yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di istighatsah Kubra akhir-akhir ini, misalnya yang mengangkat isu nasionalisme, toleransi dan keberagaman, dapat digolongkan sebagai gerakan kerakyatan yang sekaligus memanfaatkan isu dan media kerakyatan. Pada masa penjajahan, NU bahkan berhasil memobilisasi massa (santri atau santri) secara penuh dalam jumlah besar dengan menggunakan isu-isu spirit atau agama dan termasuk seruan aksi yang di komandani oleh beliau KH. Hasyim Asy'ari yakni yang dikenal dengan seruan Resolusi jihad.

Inklusifitas dalam berislam, harus bisa menonjolkan sisi tenggang rasa untuk menghadirkan ruh Islam. apa sih fungsinya berislam keras, kalau indah, harmonis, damai bisa diciptakan, disampaikan? Negara memberi fasilitas penuh pada sebuah konsep keindahan beragama, baik kepada kelompok mayoritas, minoritas harus bisa terayomi bersama. Khusna Amal menguraikan:

> The state is an inclusive concept that encompasses all aspects of policy-making and the application of laws. In comparison, the government is an agent or institution that implements state policies in a political society. However, there are institutions other than the government which become part of the state, including administrative institutions of the state or bureaucracy, the military and the police, the judiciary, the governments in the regions, and parliamentary assemblies. Therefore, the government is an agent of the state, through which the state's purposes are formulated and executed. (Amal, Towards A Deliberative Conflict Resolution? A Reflection On State Inclusive Response To Sunni-Shi'a Tension In Indonesia's Democracy 2020, hal. 230).

Pernyataan di atas sudah nampak jelas bahwa negara harus bisa menjadi inklusifitas pada semua tataran dan kebijakan yang ada, termasuk agama dan keyakinan. Pemicu yang sering terjadi dalam sebuah gerakan, konfrontasi bernuansa agama ialah adanya fanatis doktrinal yang dibawa ke aras nasional dan tidak mau dialogis dalam sebuah penyelesaian problematis, misalnya seperti radikalis berbentuk aksi pada aksi 212 di Jakarta, itu pemicu atmosfir agama dalam sentimen yang kaku dan itu masih marak terjadi, era hari ini lebih *soft* yakni bermain dengan media massa, sosial media. Terutama mereka ribut mengenai ritus budaya yang bernuansa ini itu yang kemudian ini salah satu pemicu munculnya konflik ritus, Khusna Amal menjelaskan kembali:

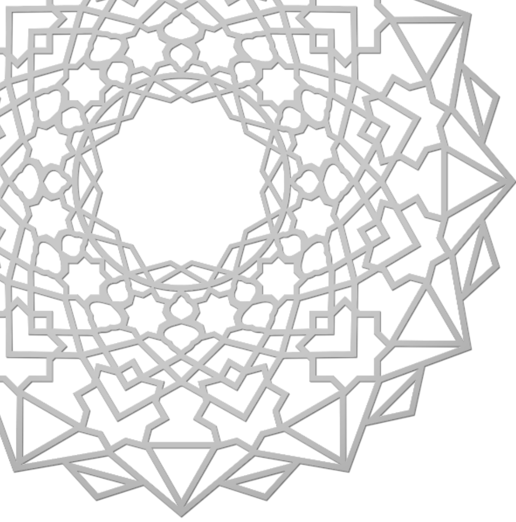
> Although it was prevalent, the use of religious sectarian issues was proved effective enough to trigger cross-group Muslims' emotions to be involved in the mass rally. Framing such an issue reminds individuals of the successful 212 movements in Jakarta. Both shared the use of religious sentiment to mobilize the mass to influence the government's policy. Over a mass of 3500 people was relatively big for a regency. The anti-Milad Fatimah protest was recorded as the largest Islamic rally in the history of refusal protest against Shi'a in Bondowoso. It was also in this protest that the alliance of various conservative and radical Islam groups could be realized. One of the shared elements that united them in a religious coalition was the anti-Shi'a sentiment. (Amal, Towards A Deliberative Conflict Resolution? A Reflection On State Inclusive Response To Sunni-Shi'a Tension In Indonesia's Democracy 2020, hal. 233).

Hidup dalam kubangan heterogenitas atau pluralistik, multikulturalistik di Indonesia ialah sudah sebuah hukum Allah yang telah dianugerahkan kepada bangsa ini. Harus bersyukur yang sangat berlimpah kepada Allah, dengan Indonesia sebagai surga budaya, agama, seni, etnis, bahasa bahkan dialek berbicara itu pun berbeda. Kepluralitasan ini, patut

untuk terus dibina dan dirawat sebagai salah satu rumus yang bisa membumisasikan prosesi dalam hidup kedepan yang berkeindahan dengan menjelmakan konsep ruh-ruh dalam Islam. Khusna Amal menjelaskan bahwa pluralisme memiliki kemiripan dan bahkan kesamaan nama dengan salah satu perspektif teoritik dalam studi poitik, yakni perspektif pluralisme-liberalisme. Pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru, mengingat gagasan-gagasan dalam perspektif ini memang banyak diwarnai oleh pemikiran kaum pluralis-liberalis. Beberapa persamaan yang terdapat dalam kedua perspektif tersebut antara lain adalah bahwa institusi negara itu harus dipisahkan dari agama, negara harus bersikap netral terhadap agama yang plural, negara memiliki fungsi dan peran, salah satunva, memediasi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial dan keagamaan agar tidak terjadi konflik yang dapat menggoyahkan stabilitas sosial, dan beberapa persamaan lainnya. Dilihat dari pokok-pokok pikiran plural is di atas, jelas bahwa perspektif ini sesungguhnya turut memperkuat pandangan sekularisme karena mendukung pemisahan negara dari institusi agama secara tegas. Meski demikian, para proponen pluralis tidak sepakat jika pemisahan negara dengan agama ini mengandung pengertian agama dimarginalisasikan, diceraikan, dan dikotak ke dalam ruang privat. (Amal, Islam Dan Nation-State: Memetakan Kembali Pergulatan Ideologi Kebangsaan Islam Indonesia dalam Reaktualisasi Pancasila Menyoal Identitas, Globalisasi, Dan Diskursus Negara-Bangsa 2015, hal. 363).

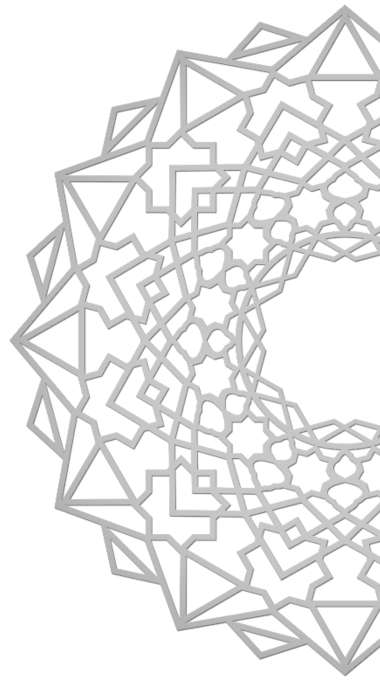
Dalam penerangan istilah *Pluralism* diatas bahwa Khusna Amal ingin membawa terma tersebut pada tataran politik kenegaraan yang kemudian disandarkan kepada isu-isu liberalism atau sekulerism. Namun, kritis penulis terhadap pluralism harus bisa menempatkan sebuah posisi di mana arti sisi teologis dan sisi sosial. Bahwa pluralism itu bermakna luas, bisa politik, agama, negara. Dalam hal ini penulis, meyakini bahwa

pluralism bukan menyatukan agama-agama menjadi sebuah ajaran yang sama, melainkan istilah terma pluralisme itu sebuah paham yang mencoba mengejawantahkan realitas kehidupan keberagaman agama dalam sudut pandang kemajemukan agama, bukan sinkretisme agama.[]



Bab VI

Indonesia Ialah Kita



Indonesia dengan nuansa beragamnya agama, suku, etnis dan budaya tidak menyurutkan peran-peran ulama dalam merekontruksi aras di mana kerapuhan umat. Era hari ini, era yang semakin runyamnya masa. Dimana banyak generasi yang sudah mulai mengkonsumsi penuh dalam satu hari sekitar 90% interaksi dengan dunia maya (daring). Terutama peran media sosial yang harus lebih lagi menunjukkan konten-konten yang positif dan damai. Yang paling mendasar ialah mengenai ajaran Islam pada seluruh kalangan. Banyak kaum sekarang mengkonsumsi terhadap media sosial dengan masif, terutama membuka portal-portal tentang seputar dunia Islam. Banyak kekhawatiran tersendiri bagi kalangan ulama atau kyai sebagai ambassador keilmuwan tentang Islam. Islam yang diharapakan ialah tetap ajaran yang mengajak ke arah moderat bukan ekstrim, itu masih terus akan dipertahankan Islam di Indonesia.

Peran sebuah ormas Islam untuk berkolaborasi dalam membangun dan membina kedamaian negeri ini merupakan sebuah penyatuan menyiarkan Islam dengan damai. Dalam pandangan penulis ada dua peran ormas Islam yang besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut menjadi *soko bumi* dalam mengajarkan Islam yang wasathy dan inklusif. Kehadiran dari kedua kubu organisasi Islam moderat ini menjadi sebuah transportasi dalam penyampaian Islam yang diharapkan untuk masa depan Indonesia dan dunia, yakni Islam wasathy. Keberperanan daripada organisasi Islam antara NU dan Muhammadiyah di Indonesia tidak akan pernah lengkang dalam mempertahankan ideologi pancasila sebagai *finally* dari sebuah konsensus dalam mencari sebuah arti kebhinnekaan di negeri ini.

Menjadi sebuah organisasi Islam yang kental dengan nuansa moderasi beragama, Muhammadiyah dan NU senantiasa menjadi sebuah garda dan gerbang dalam membangun umat Islam yang moderat. Indonesia

dengan corak dann ragamnya ormas Islam tidak menyurutkan eksistensi dari kedua ormas tersebut. Namun, juga masih banyak ormas Islam yang mempunyai peran pula dalam ikut serta dalam menyuarakan moderasi Islam dalam membangun keharmonisan. Seperti Al-Washilah, Perti, yang juga membangun dalam menyuarakan Islam yang menekankan dalam kemoderatan. Menurut Ahmad Sanusi dalam Majalah BNPT menjelaskan bahwa kalau memang benar-benar masyarakat Indonesia menghayati tentang misalnya sila pertama pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan dimaknai hingga meresap dalam jiwa, maka tidak akan ada di Indonesia ini yang namanya radikalisme atau terorisme.

Peran sebuah ormas Islam dalam merajut keharmonisan sangat perlu dan membantu. Kenapa? Pasalnya ialah, mereka mempunyai sebuah sosok *leader* yang mampu men*guide* seluruh jamaahnya menjadi pengikut yang setia. Tokoh agama menjadi sosok sentral dalam menganulir seluruh anjangsana dan perjumpaan keagamaan. Luring menjadi aspek pertemuan yang mempertemukan spiritual dan sosial dari semua insan. Namun, hari ini banyak sebuah kajian, pertemuan yang di sajikan secara daring. Semua untuk mempermudah dalam berdakwah, terutama dakwah Islam yang *wasathy*, moderat dan inklusif. Membangun peradaban umat yang maju, progresif dengan bersikap moderat dan arif dalam hidup beragama. Bermedia sosial dalam berdakwah menjadi salah satu strategi untuk memperkenalkan Islam yang indah dan inklusif. Memperjelaskan juga mengenai terorisme, radikalisme yang sampai hari ini masih menjadi ketakutan akut di dalam tubuh umat Islam maupun agama lain.

Media sosial menjadi salah satu kubangan yang masif digunakan oleh semua kalangan. Terutama pemuda, kaum yang juga masih rentan dengan asupan-asupan radikalisme dan terorisme. Terutama asupan terhadap media sosial yang sering membaca-membaca konten-konten yang

berbau agama, tapi nuansanya doktrin, khilafah dan lainnya yang sejenis. Apalagi yang membaca pemuda yang tidak mengenal dalam tentang agama, ketika di media sosial bermunculan banyaknya konten yang menawarkan ngaji online, bimbingan rohani dengan ustad-ustad yang belum jelas, dan akhirnya terprovokasi masuk dan di konsumsi mentah.

Bermedia dengan Damai

Akun sosial media menjadi sebuah incaran sebagai penyebar berita dan konten radikal seperti *facebook, instagram, twitter, youtube* menjadi persinggahan primer bagi kalangan muda. Bermedia yang damai menjadi kearifan dalam menyongsong generasi yang terfiltrasi penuh akan literasi dengan membuang jauh-jauh hoakisasi dalam bermedia. Era yang semakin berkembang dan maju, menjadikan sebuah gerak sosial secara aksi semakin mudah. Iya..kita semua tinggal menghubungi dalam sebuah grup WA atau grup online media lainnya dengan hanya berkabar via online kita semua sudah bisa mengumpulkan semua orang. Sehingga penyikapan terhadap media harus mennggunakan arus yang positif dan arif.

Nuansa agama, budaya dan sosial, setidaknya bisa menjadi wakil ketika menangkal gerakan-gerakan radikal di media online. Gerakan radikal hari-hari ini gencar dengan menyuarakan jihad di jalan Allah, tapi hasilnya ialah ngebom, konten-konten media yang dibanjiri propaganda arus negative dengan berjihad ialah mati syahid dan ditunggu oleh bidadari di syurga. Kalau tujuan yang dilontarkan seperti itu, maka salah kaprah ketika harus mengartikan jihad sebagai perjuangan di medan perang dengan mengangkat senjata dan saling membunuh sesama umat manusia dan yang diperjuangakan ialah sebuah realitas yang tidak mungkin bisa dilaksanakan, seperti jihad mendirikan Negara Islam di Indonesia. Mengutip Irwan Masduqi, Fathullah Gullen mengatakan, Islam bukan agama kekerasan, oleh

karena itu makna jihad harus dipahami secara tepat. Menurut Gullen jihad adalah upaya untuk membela diri atau penyucian jiwa dalam rangka menghilangkan rintangan antara Allah dan pilihan bebas manusia.

Sejarah Islam penuh dengan contoh yang menunjukkan bagaimana prinsip ini telah diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam bentangan sejarah, tentu saja ada kondisi-kondisi darurat tertentu saat perang tidak dapat dihindari lagi. Sayangnya, ayat jihad dalam al-Quran—yang diturunkan dalam kondisi darurat—dipahami secara reduktif dan tekstual oleh para teroris yang dangkal pola pikirnya. Jihad yang pada dasarnya merupakan upaya *defensif* (membela diri) pada akhirnya berubah menjadi *ofensif* makna perang yang tak manusiawi. Bagi Gullen, orang-orang radikal tidak memahami makna sebenarnya spirit Islam. Mereka gagal menetapkan keseimbangan yang tetap antara apa yang primer (perdamaian) dan apa yang skunder (perang dalam keadaan darurat). (Masduqi, Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011, hal. 154).

Konsep yang penulis kemukakan tentang jihad dari sudut pandang Gullen setidaknya ada sebuah frame yang positif tentang apa itu jihad. Jadi tidak semerta-merta jihad itu mengangkat senjata, berperang, ngebom di mana-mana dengan dalih untuk terwujudnya negara khilafah, perpecahan lah yang terjadi. Konsep khilafah yang diusung dengan harapan tegaknya kepemimpinan dengan sistem Islami, penulis kutip dalam pandangan Masykuri Abdillah. Masykuri Abdillah melaporkan bahwa dalam konteks hukum Islam, pada saat ini hanya sedikit negara Muslim yang mengadopsi hukum Islam (syariah) secara keseluruhan. Sebagian besar mereka hanya mengadopsi hukum keluarga dan ekonomi Islam sebagai hukum positif. Karena itu, di banyak negara Muslim kini masih ada upaya-upaya untuk melakukan re-Islamisasi hukum, meski tidak seluruhnya. Namun, upaya-upaya ini tidak mudah diwujudkan, karena di antara umat Islam sendiri

terdapat perbedaan-perbedaan tentang pelaksanaan hukum Islam dalam suatu negara, yang juga di antara mereka ada yang menolak dengan alasan karena banyak ketentuan hukum Islam yang tidak sejalan dengan HAM dan demokrasi. Kemudian yang jelas, ada sebuah kecenderungan yakni antara demokrasi dan syariatisasi. Demokrasi model Barat yakni sekularisme jika diterapkan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan sulit diterima, sedangkan menggunakan konsep formalisasi syariah secara keseluruhan juga sulit dilaksanakan dalam negara yang plural seperti Indonesia. (Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia, 2011, hal. 23).

Jadi, bermedialah dengan damai dan menarasikan konten-konten penuh dengan keindahan. Janganlah saling ujar kebencian, karena faktor ketidaksamaan, sehingga memunculkan konflik batin maupun fisik. Pencarian sebuah kebenaran dalam masing-masing, sudah bukan lagi arah yang bisa membangun, harusnya saling menghargai satu sama lain, karena kemanusiaan ialah pertama.

Arus Baru Indonesia Yang Kuat dan Harmonis

Indonesia harus bisa berdiri diatas kaki sendiri dengan tanpa mengemis dengan negara lain. Boleh kita semua belajar kepada siapapun, ke negara manapun, dan kapanpun. Namun, jangan pernah lupa akan Indonesia, bahwa ketika sebuah konsep yang kita semua dapatkan dari luar, tetapi tidak bisa belajar dan melihat realitas di Indonesia, sepertinya gagal. Indonesia yang mejemuk dan beragam, harusnya bisa memaknai akan rahmat-Nya yang indah menjadi penyatu dan peragam untuk kemajuan.

Hari ini, muncul beragam partai politik di Indonesia, baik aliansi dari parati sosialis, nasionalis dan islamis. Semua pada intinya ialah

mempunyai tujuan untuk ikut serta berpartisipasi untuk memajukan Indonesia dari sudut pemeritntahan dan mengembangkan dari sisi sosial, edukasi, budaya dari afiliasi politik. Pada era pemilihan presiden Jokowi yang ke-2, muncul partai-partai baru yang lolos dalam seleksi dan ikut serta berpesta demokrasi untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden kelak dan memimpin Indonesia 5 tahun kedepan?

Ada sekitar 5 partai baru yang muncul sebagai gelombang baru dalam dunia kepartaian di Indonesia. Ada Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan hak suara dalam kedudukan di kursi pemerintahan dalam kedukungannya dan keberpihakannya serta keberperannanya terhadap Indonesia dengan menyumbangsihkan paradigma pemikiran dan aksi untuk kemajuan dalam menyongsong Indonesia yang lebih maju, pembaharu dan berkeadilan dengan menjadi bagian dari koalisi dalam sebuah kedudukan di pemerintahan. Beragam janji, visi dan misi menjadi sebuah ikatan spiritual emosional dalam melululantahkan sebuah keyakinan dalam memikat untuk *work together* dalam berkoalisi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dan di tahun ini, muncul sebuah kericuhan yang terjadi di kubu partai PAN, yakni dalam pengkultusan terhadap sosok pemimpin partai antara Zulkifli Hasan dan Amien Rais. Sehingga dalam deklarasi yang di lantunkan oleh Amien Rais dalam mendirikan partai baru. Di lansir dari *detik.news,* Sihombing menuliskan bahwa partai baru yang akan lahir dalam rajutan dari seorang politisi senior Amien Rais ini lebih bernuansa Islami. Partai baru ini lahir bukan hanya karena kecewa dengan partai lama, tapi sesungguhnya kehadiran partai baru ini sebagai jawaban atas kebuntuan rakyat yang sudah sangat kecewa dengan partai-partai lama yang sudah tidak lagi menyuarakan kepentingan rakyat yang kini sedang menjepit rakyat. (Sihombing, 2020).

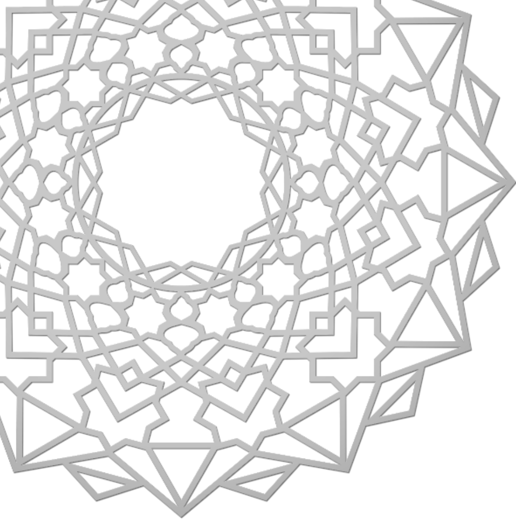
Namun, sebelum munculnya Partai Ummat yang di komandekani oleh Amien Rais, muncul sebuah Partai Gelora yang dipimpin oleh Anis Mata. Kemunculan partai-partai ini merupakan bentuk penyeimbang dengan adanya partai-partai lama. Amien Rais dan Anis Mata, merupakan tokoh-tokoh politisi dari partai lama, karena juga tidak ada kecocokan dan tidak kemistri yang baik, sehingga kedua tokoh ini melepaskan diri dari partai yang telah membawa namanya terkenal dengan mendirikan partai sendiri. Dengan hemat penulis, bahwa semoga dengan hadirnya partai-partai politik dengan aliansi gerakan pembaharuan berspirit Islam ini, bisa menghantarkan kemaslahatan umat (rakyat) di seluruh pelosok negeri ini bisa merdeka dan sejahtera.

Dalil-dalil kampanye dan deklarasi merupakan gencatan awal dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat luas. Keeksistensian daripada partai kedepan ialah ketika ada suara sekitar 7 % yang bisa masuk dan membawa partai-partai baru tersebut masuk ke parlemen. Beradu argument dan mencetuskan terobosan baru dalam arus ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, politik yang berkeadilan dan berkemajuan. Keseimbangan dalam pemikiran yang di gagas untuk arah baru Indonesia yang lebih maju, antara partai lama dan baru harus bisa sinergi. Jangan ada berat sebelah dalam memikirkan apa yang akan di programkan. Gerak dasar sebagai seorang politisi dalam hemat penulis ialah pemikiran dan gagasan. Namun, tak khayal apabila hasil buah pikiran tersebut teraplikasikan dengan tindakan atau aksi partai untuk menjemput kemerdekaan, kesejahteraan rakyat.

Semua dipastikan akan kembali kepada rakyat. Dengan banyaknya partai dengan logo, nama yang berbeda-beda bisa ditafsirkan bahwa dalam visi-misi partai politik ialah sama, yakni mensejahterakan rakyat, menciptakan keadilan, berpihak ke rakyat, dan intinya semua dikembalikan ke rakyat. Dengan dimulai dari memilih *leader* dari usungan partai yang

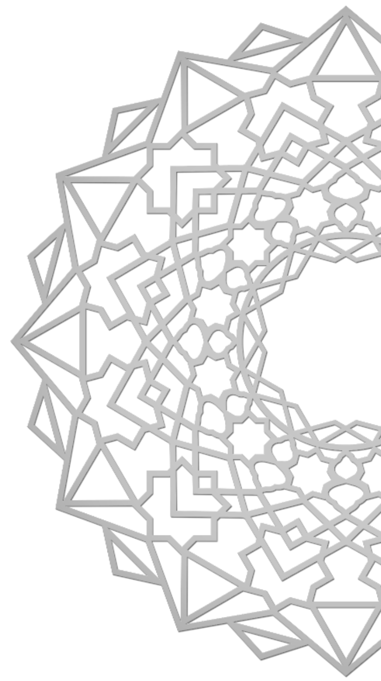
berkoalisi untuk menciptakan bersama-sama sebuah gagasan dalam membangun bersama untuk Indonesia maju. Dari sebuah dorongan dari partai untuk pemimpin dan untuk negeri dan kembali untuk rakyat. Itulah Indonesia, begitu majemuknya partai sebagai sebuah perantara dalam membangun Indonesia dari sisi usungan sebuah lembaga.

Politik di Indonesia harus bisa melihat realitas yang ada dengan keadaan kondisi masyarakat. Banyak partai yang lahir di negeri ini, akan tetapi minim perjuangan dan visi-misi yang komprehensif dan kolektif untuk berkesinambungan. Banyak bermunculan partai dengan dalih untuk menyejahtrakan rakyat. Namun, tak khayal bahwa munculmya partai-partai tersebut dengan seiring tumbuhnya bangsa ini, semakin kecil suara tersebut. Pasalanya generasi yang hari ini anti terhadap politik, lembaga bernuansa politik, dan semua yang berbau politik. Dalam hemat penulis bahwa politik keparataian yang tumbuh dan berkembang di negeri ini harus bisa mampu meneropong dan melihat terobosan untuk berpolitik.[]



Bab VII

Konsolidasi Keberagamaan Era Post-Modern



Konsolidasi antara beberapa umat dan beberapa komunitas memang sangat penting untuk terus mengurusi yang namanya perdamaian. Pembangunan tidak hanya terfokus kepada pihak-pihak formalitas, seperti pemerintah, menteri. Namun, di aras bawah ada ratusan pejuang lewat komunitas untuk kesejahteraan masyarakat dan kedamaian negeri. Perjuangan mereka membutuhkan sebuah wadah yang bisa menyatukan suara untuk membangun keharmonisan dari berbagai ras, suku, budaya dan agama di Indonesia.

Eksistensi mereka sangat dibutuhkan sebagai bentuk perwujudan masa depan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Aliansi dan jalur kiri dalam membrangus sisi di mana di pandang penggabungan agama, pluralisme merupakan ketidakbenaran dalam arti dan makna yang disandarkan. Pemandangan yang tak elok dari sisi kiri jangan digunakan memandang untuk sisi kanan. Maksud yang perlu dibidik ialah dari komponen makna sosiologis-humanis bukan komponen makna teologisnya.

Mengejawantahkan keadaan yang majemuk dengan berbagai hal yang tidak bisa dibendung dari massa yang semakin global, menjadikan kebaikan akhlak ialah pijakan dan pijaran awal untuk masa depan. Restorasi yang akan merubah dari lini keberbagaian persinggungan harus terus terdistribusikan oleh kaula-kaula muda yang akan mengerakan dunia untuk damai. *Agent of Peace* setidaknya menjadi *new platform* untuk merancang masa depan Indonesia yang cinta dan kasih terhadap kelompok-kelompok yang dianggap minoritas, termarjinalkan dan asing.

Sisi kemanusiaan ialah sisi paling *wahid* dalam membentuk dan menciptakan karakter insan yang berbudi dan luhur akan akhlak. Soekarno mengatakan *the Mankind is One* dan Gus Dur juga pernah menuliskan bahwa belajar agama carilah makna dari arti kemanusiaan. Sehingga

kemanusiaan ialah kunci awal untuk meligitimasi arus yang komprehensif ini dengan kepiawaian para pihak-pihak yang tak bertanggung jawab akan kekerasan media maupun dunia nyata. Terkikisnya akhlak yang membudikan manusia menjadi insan yang luhur sudah tak nampak di era-era postmodern ini.

Ketercanggihan media dengan arus globalisasi yang keras harus bisa mengendalikan diri agar tidak terperosok di dunia lembah hitam. Ancaman eksklusif dan diskriminasi agama, etnis guna untuk keberlangsungan hidup, menadikan mereka berselancar tanpa etika dalam bermedia. Menuliskan berbagai keburukan dalam satu dudut pandang agama, yang kemudian melihat saudara yang tak seiman harus dibunuh, ini kan sudah jauh dari fitrah manusia yang berakhlakul karimah. Mereka tak pernah nampak semesta wajahnya, tapi tulisan-tulisannya di media membuat geram.

Ironisnya banyak diantara kaum yang tidak tahu agama yang secara mendalam, tapi ketika mereka tahu akan ada sebuah baiat yang mudah secara daring, mereka langsung jihad. Dan paling parah lagi akan ada doktrinal dogmatis yang terkungkung akan tekstualitas yang angkuh dan terkesan kaku, sehingga ekslusifitaslah sebagai bentuk implikasi dari keberbelajaran agama tersebut. Sehingga sebuah bentuk pemandang yang berbeda selalu membuat mereka mengatakan negatif kepada kelompok lain yang tak satu rumpun teologis. []

Peradaban Islam Era-Millenial

Membangun peradaban Islam dalam keilmuwam yang harus terus di bina dan bumikan akan sebuah nilai-nilai keislaman yang humanis dan inklusif terhadap semua kalangan. Banyak sebuah pandangan bahwa Islam itu ekslusif terhadap agama lain. Pandangan seperti Nampak ketika awal mula Islam yang belum bisa mengejawantahkan terhadapa sebuah relaitas

keadaan. Tektualitas terhadap ajaran yang masih terafirmasi dalam sebuah pemahaman yang saklek dan stagnan dengan merujuk sesuai absolusitas nash. Kemudian aplikasi daripada itu mereka sering memaknai dengan saling menjerumuskan kedalam lubang-lubang kesalahan. Sehingga terjadilah sebuah saling mengolok teologissentris tentang amalan dalam setiap keislaman. Nampaknya rekosntruksi historisitas menjadi sebuah label bagaimana pemkanaan Islam harus bisa menjadi makna yang indah pada semua kalangan.

Bentuk-bentuk baru dalam kelompok Islam yang sering menjadi gubahan-gubahan baru dalam menyerukan Islam yang progresif. Namun, progresifnya ialah dalam atah yang bagaimana ? kalau dalam arah Islam progresif yang negative akan berdampak pada ekslusifitas kelompok Islam yang lain. Misalnya kelompok khawarij yang kekeh terhadap sebuah ajarannya kala itu, sehingga kelompok lain dianggap sesat dan kafir. Bahwa nabi Muhammad saw. tidak pernah memberikan sebuah contoh tindakan yang untuk mengatakan kafir atau buruk kepada sesama. Ketika rasulullah dimusuhi oleh kaum kafir quraisy kala itu, apakah rasulullah marah dan kemudian menimpakan kembali sebuah kemarahan kepada pihak yang membenci? Tidak, Rasulullah tidak marah, bahkan Rasulullah membalasanya dengan keindahan dan penuh kasih sayang. Karena Rasulullah ialah representasi daripada Islam, Islam yang damai dan indah. Ketika Rasulullah di timpakan makanan di wajahnya, beliau tidak marah, bahkan Rasulullah membalasanya dengan menyuapinya dengan halus, karena Rasulullah menganggap semua ialah kaumnya, sehingga beliau kasihan dengan semua kaumnya dari manapun itu.

Rasulullah dalam memperjuangkan Islam ialah dengan nuansa yang damai dan indah. Namun, ada kalanya Rasulullah juga mempin sebagai panglima perang dalam membela agama Islam. Dalam rentetan perang yang

Rasulullah pimpin bukan berarti kemudian kita semua menggunakan cara yang kasar dan keras dalam membela agama Islam. Kontekstualisasi di era ini, jihad yang digunakan bukan jihad yang berbentuk fisik, mengeluarkan pedang dan saling membunuh. Namun, bagaimana Islam itu bisa menjadi sebuah agama yang pemersatu umat, bukan pemecah umat. Makna yang salah ialah kurangnya rekontektualisasi Islam dalam realitas sebagai pengejawantahan kehidupan yang penuh dengan keberagaman. Terutama di Indonesia dengan mayoritasnya Islam jangan kemudian memangkan diri atau egoisentris menjadi sebuah kemenangan yang menolak agama lain atau masukkan kelompok lain.

Memaknai bahwa Islam progresif itu menjadi makna yang terus signifikansi dalam praktikum peribadatannya maupun amalannya. Banyak kelompok-kelompok Islam lahir dengan beberapa konteks yang berhaluan Islam pembaharuan. Gerakan-gerakan ini menjadi sebuah daya dobrak bahwa Islam jangan mengalamai kemandekan atau kejumudan dalam bergeran dan berpikir untuk arah baru Islam sebagai perdaban dunia, juga termasuk Indonesia. Meski gerakan Isla tidak terwujud dengan sebuah keilmuwan *bil Lisan*, tapi masih banyak cara dalam menyampaikan perspektif kemajuan Islam dalam mendakwahkan Islam dengan *bil amal.* Tidak semerta-merta hanya sebuah dakwah dari panggung ke panggung sebagai ciri menyiarkan Islam, akan tetapi harus ada sebuah inovasi yang baru dalam mendakwahkan Islam, dan itu yang kemudian bisa termaknai dengan Islam yang progresif berkemajuan dengan konsep pembaharuan. Semua itu juga untuk kepentingan ummat, dan tidak ada kesalahan dalam Islam, hanya beberapa penyampaian mereka penuh dengan kekerasan dan makna yang disharmonisitas. Sehingga Islam terkesan kaku dan keras dalam menghadapi ragamnya perbedaan di lapangan terkait kekulturan Islam dalam keseharian.

Banyak kelompok-kelompok Islam yang lahir dengan gebrakan sebagai Islam yang progresif untuk kemajuan dalam mengurangi kejumudan. Arus pembaharuan Islam menjadikan Islam semakin berkembang dengan penuh kemajuan dari beberapa komponen yang digeluti. Arus globalisasi menjadi arus bagaimana Islam harus juga menyesuaiakan dengan kondisi saat ini. Yang sering menjadi prakarsa daripada muncuknya gerakan-gerakan Islam yang progresif ialah munculnya kaum-kaum muda dengan pemikiran modernitas. Kepekaan dari pada intelektualitas yang sering menjadi rujukan akan landasan retorika dan dialektika ialah menyaduran pandangan dari pemikir-pemikir pembaharuan dalam Islam antara lain, Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghan, Rasyid Rida, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim. Penyaduran daripada pemikiran tokoh-tokoh tersebut menjadikan sebuah wajah baru dengan wadah baru bagi Islam di Indonesia sebagai arah baru untuk kemajuan daripada pandangan dan gerakan Islam yang progresif.

Kemajuan dalam berkonsep bahwa wajah dan warna baru Islam akan nampak ketika sebuah kelompok Islam mampu merumuskan dan mengejawantahkan rekontektualisasi dan rekonsiliasi akan makna dalam setiap lafadz dalam nash sebagai perwujudan dalam membangun keharmonisan ummat di seluruh dunia. Sisi kemanusia ialah sisi yang paling primer dalam membangun ummat yang bertasamuh dengan antarumat agama. Namun, sisi kemanusian dalam beragama sering diabaikan dan pemaknaan yang lamban. Kajian keislaman yang paling mutakhir ialah ketika sisi kemanusiaan di kaji dari koneksitas akan Al-quran dan hadits. Agar apa? Agar pemaknaan dalam nash al-quran mengenai penyikapan istilah kafir atau makna yang belum terjamah oleh pemikiran kaum awam bisa terpahami. Jadi tidak mentah memahami dengan tektualitas dan

implikasinya ialah sering mengatakan salah dan neraka bagi umat Islam lain yang tidak mempraktikkan sesuai al-quran.

Gerakan Islam kontemporer menjadikan sebuah gerakan yang memiliki arus kemajuan dan pembaharuan. Faisal Ismail melaporkan bahwa ada sebuah gerakan kaum muda di Minang yang di prakarsai oleh Haji Miskin. Yang sepulang dari haji membawa konsep pemahaman Islam Wahhabi. Kemudian muncul awal abad ke-19 sebuah kelompok pembaharu yakni kaum Padri dan Kaum Muda. Kedua kaum ini ialah sama-sama isinya ialah kaula muda yang memperjuangkan Islam sesuai abad ke-3 H atau ketika masa Nabi Muhammad dan sahabatnya. Islam yang diusung oleh kelompok muda ini Islam yang lurus atau puritanisme. Karena melihat Minang waktu itu para kaum tua masih mempraktikkan kegiatan-kegiatan yang dianggap menyimpang dari Islam. Sehingga mereka melawan yang kemudian terjadi perang Padri (1921-1937). Pun Kaum Muda yang di mana di dalamnya isinya para intelektual muda Minang yang mengusung sebuah gerakan Islam puritan. Saduran kuat dalam landasan berpikir menggunakan pemikiran antara lain Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghan, Rasyid Rida, Ibn Taimiyah. Yang di Minang diprakarsai oleh Jamil Jambek, Abdullah dan kawan-kawan.

Kaum Muda dan Kaum Padri berhasil berhasil dalam menyebarkan Islam yang putih ala nabi. Keberhasilan tersebut hingga saat ini tidak ada sebuah ritualitas agama di tanah Minang. Kemudian itu yang menyebabkan mudah nya menerima dan masuknya Muhammadiyah ke tanah Minang. Karena gerakan Muhammadiyah se visi dengan gerakan Islam di tanah Minang.

Gerakan Islam Pembaharu Arus Hijrah Islam Indonesia

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* harus bisa memberikan sebuah cahaya kemanfaatan kepada agama lain. Memelihara jiwa dan nyawa *haflu al-nafs* ialah tugas dari semua agama bukan hanya Islam. Namun, dalam sudut pandang Islam bahwa umat manusia sebagai khalifah di muka bumi harus hidup saling mengasihi dan menjaga jiwa saudaranya. Perbedaan agama, suku, budaya dan warna kulit bukan sebuah alasan dalam diri seorang Muslim untuk memberikan stigmatisasi bahwa ketidakperluan dengan pihak lain. Bukan begitu, kemayoritasan sering menjadikan satu pihak untuk menang sendiri dengan jumlah yang banyak. Sering kemarjinalisasian antarumat agama maupun kelompok Islam terjadi konflik karena adanya disinformasi. Sejatinya sebagai seorang khalifah di muka bumi ialah untuk tidak membuat kerusakan dan membuat kekerasan. Harusnya menciptakan sebuah perekat untuk perdamaian dan keharmonisan untuk menjaga pluralistiknya akan realitas yang ada di negeri ini.

Terutama kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia yang begitu beragamnya, sehingga arus pemikiran tengah ialah salah satu kunci dalam membangun keharmonisan. Banyak kelompok-kelompok Islam beraliansi dengan fundamentalitas Islam yang keras dan kaku sebagai rujukan gerakan kelompoknya. Melihat Indonesia yang begitu beragamnya agama, budaya dan ras, menjadikan Islam pun berkembang dengan nuansa kulturalistik yang unik. Akulturasi menjadi kekhasan daripada Islam yang bercorak ala Nusantara. Intrakoneksi maupun ekstrakoneksi dengan kelompok Islam lain menjadi sebuah keharusan melihat realitas umat di Indonesia. Etnografi dengan kekulturan masyarakat Indonesia memang membentuk karakter masing-masing umat yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Itu yang kemudian menjadikan pergerakan Islam di

Indonesia mengalami beragam dinamika corak fundamentalitas-teologis pada akidah dan amalan pada setiap orbitnya madzhab Islam di Indonesia.

Hijrah Islam Indonesia dalam Pemikiran Haedar Nashir

Indonesia anugerah Tuhan termahal yang patut disyukuri oleh seluruh elite dan warga bangsa. Para pendiri bangsa dengan kearifan luhur mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai "Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Ada kuasa Tuhan menyertai kehadiran Indonesia di muka bumi. Di antara nikmat Allah yang tercurah bagi Indonesia, ialah kehadiran umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Bersama umat agama dan golongan lainnya, umat Islam sepanjang sejarahnya telah banyak berkorban dan memberi yang terbaik untuk negeri ini. Pancasila, menurut Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara, merupakan hadiah terbesr umat Islam bagi Indonesia.

Jangan ada pihak yang mempertentangkan umat Islam dan Indonesia. Apalagi menjadikan umat terbesar ini terpinggirkan dan tidak berdaya. Jika umat Islam sebagai pilar utama lemah atau hancur, maka runtuhlan Indonesia. Negara pun berkewajiban melindungi penduduk agama terbesar ini, laksana anak berbuat baik kepada orangtuanya. Sebaliknya, umat Islam dengan seluruh komponennya juga penting menjaga Indonesia layaknya ibu yang melahirkan dan membesarkan anaknya dengan cinta seluas samudra. Ketika saat ini umat Islam menyambut tahun baru Hijriyah 1442 di tengah perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, selayaknya hadir komitmen kolektif bagaimana menjadikan umat Islam Indonesia bersama komponen bangsa lainnya semakin meraskan hidup tenteram, aman, dan sentausa di negeri yang dilahirkannya. Menjadi tuan di negerinya sendiri, serta tidak terpinggirkan dan seolah menumpang di negeri orang.

Umat Islam pun wajib merasa memiliki Indonesia jiwaraga, tidak tergoda rumput tetangga. Seraya bertanggungjawab bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negeri idaman yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan para pejuang dan pendiri Indonesia. Aktif memberi solusi dan tidak senang bila negeri ini dirundung masalah dan nestapa. Bila Indonesia jatuh, umat Islam pun runtuh.

Islam Indonesia

Islam Indonesia menjadi mayoritas merupakan karunia Allah yang termahal. Para penyebar Islam di seluruh penjuru kepulauan telah berjasa besar menjadikan Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Menjadikan Islam mayoritas bukan pekerjaan mudah, tetapi melalui proses Islamisasi kultural yang masif, lentur, damai, serta sarat perjuangan yang penuh dinamika disertai ilmu dan kearifan yang tinggi. Para penyebar Islam sejak fase awal abad ke-7 dan era kedua abad ke-13 dari golongan ulama, saudagar, dan elite kerajaan telah berjasa sangat besar menjadikan Indonesia berpenduduk muslim terbesar. Penyebar Islam kultural itu bukan hanya di Jawa dan dilakukan satu kelompok figur semata tetapi merata di seluruh kepulauan Indonesia oleh banyak varian figur saudagar, ulama, dan elite penting lainnya. Jejaknya mengubah peta kepemelukan agama menjadi mayoritas muslim tanpa paksaan dan kekerasan. Padahal saat itu masyarakat di kepulauan luas ini mayoritas animisme dan penganut Hindu yang telah mengakar kuat.

Dobbin (2008) mencatat, Islam masuk ke Indonesia berhadapan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang bertumpu pada stratum masayarakat petani yang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme. Dalam telaahan Benda (1974), Islam masuk ke Nusantara ketika agama Hindu telah mengakar kuat dalam masyarakat setempat. Kala itu terutama

di Jawa telah berlangsung proses “Hinduisasi” atau lebih tepat “Indianisasi” yang tembus secara mendalam dan meninggalkan bekas lama sekali. Bagaimana para penyebar Islam yang menurut catatan sejarah berasal dari Arab dan India, masuk dan mengubah alam pikiran masyarakat adat dan kepercayaan setempat menjadi Islam. Secara teologis tentu Islamisasi generasi awal itu benar-benar mempraktikkan cara dakwah bil-hikmah, mauidhah hasanah, dan mujadalah dengan ihsan (QS An-Nahl: 125). Sutau pendekatan dakwah yang arif, edukatif, dan dialogis yang menyentuh hati manusia secara tulus sebagaimana diajarkan Allah dan Nabi akhir zaman. Bukan dakwah yang menghukum, menghujat, memusuhi, menyesat-nyesatkan, dan gampang mengkafirkan dengan kecenderungan sebagai polisi kebenaran.

Secara sosiologis, para penyebar Islam itu memiliki pendekatan sosio-antropologis sekaligus agen sosial yang dapat diterima oleh komunitas setempat. Dakwah yang bersahaja tanpa keangkuhan diri yang elitis. Inilah proses Islamisai masyarakat Indonesia yang bercorak kultural. Menurut Kartodirdjo (1993), Islamisasi di kepulauan Indonesia merupakan bentuk penyebaran Islam melalui proses sosial-kultural dan sosial-ekonomi yang dilakukan para penyebar dan saudagar Muslim di kepulauan Nusantara. Proses Islamisasi yang kultural itu telah melahirkan umat Islam Indonesia generasi awal berabad-abad sebagai kaum muslim moderat. Akibat dari Islamisasi yang damai dan kultural itu, Islam Indonesia menampilkan karakter dan wajah yang moderat, lembut, toleran, dan adaptif dalam multikultur (Esposito, 1997). Proses Islamisai dan pembentukan Islam tengahan, damai, dan toleran ini berlangsung lama dan terus bersambumg dalam dinamika kontinyuitas dan diskontinyuitas yang tidak sederhana (Abdullah, 1974).

Kehadiran gerakan Islam moderen awal abad ke-20 seperti Muhammadiyah, juga memiliki persambungan atau kontinyuitas dengan Islam Indonesia gelombang awal plus nilai-nilai pembaruan. Meskipun sering dikaitkan dengan pembaruan Islam di Timur Tengah, Kyai Ahmad Dahlan justru menampilkan karakter Islam moderat dan modern yang mengindonesia. Di dalamnya menurut Nakamura (1983) dan Van Niel (1984) terdapat orientasi kultural. Kyai Dahlan dalam pengakuan tokoh ilmuwan dan budayan Prof R. Ng. Purbatjaraka, pernah membolehkan kaum muslim abangan yang belum bisa shalat menggunakan bacaan Arab dengan bahasa Jawa sampai berkemampuan. Deliar Noer (1996) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern yang fleksibel, berbeda dengan lainnya. Bukan Muhammadiyah yang keras dan galak!

Transformasi Baru

Dalam lintasan sosio-historis yang panjang dan penuh pergumulan, memang menjadi suatu diskontinyuitas (keterputusan) bila di kemudian hari ada fase “pengerasan” atau puritanisasi-ekstrem dalam proses Islamisasi di Indonesia, termasuk pasca reformasi. Proses Islamisasi yang keras, hitam-putih, tertutup, garang, dan tidak jarang takfiri yang sering menimbulkan konflik keras bukan hanya dengan sasaran dakwah tetapi juga dengan sesama umat dan golongan lain seperti ini terjadi dalam sejumlah fase dulu hingga kini dengan dalih dan faktor yang kompleks. Namun, Islamisasi dan dakwah seperti itu tidak menjadi harapan bagi masa depan Islam. Boleh jadi penurunan jumlah kepemelukan Islam sebagaimana sering menjadi isu akhir-akhir ini yang perlu dibaca datanya secara valid dan seksama antara lain karena strategi dan model dakwah yang mengeras itu, sehingga kalah luwes dan tidak mampu bersaing dengan pihak lain. Ibarat menjual barang bagus tidak dengan pemasaran yang elok, sebagaimana pepatah at-thariqu

khayra min al-maddah, bahwa cara itu jauh lebih penting ketimbang isi materi.

Umat Islam Indonesia saat ini jika ingin mempertahakan posisi dan memperluas keberadaannya di bumi Indonesia, perlu melakukan reorientasi dakwah dan pemikiran keislaman agar proses pertumbuhan keislaman mutakhir selain mampu berkembang sesuai tuntutan zaman, sekaligus tidak memutus matarantai dan arus utama Islam Indonesia yang berwajah kultural dan dinamis. Seraya melakukan pembaruan pemikiran Islam dalam pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam multiperspektif; serta strategi dan model Islamisai atau dakwah yang lebih inovatif dan memahami kondisi sosio-psikologis, sosio-kultural, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan konteks sosiologis-antropologis umat maupun masyarakat luas yang sejatinya kompleks dan tidak sederhana.

Reorientasi sekaligus transformasi Islam yang diniscayakan saat ini adalah Islam yang menampilkan wajah sekaligus karakter dan cita rahmatan lil-‘alamim. Islam yang diawali dengan risalah Iqra. Islam dan risalah dakwah sebagaimana diteladankan oleh Nabi Muhammad yang berhasil mengubah bangsa Arab Jahiliyah menjadi al-Madinah al-Munawwarah, serta setelah itu lahir kejayaan peradaban Islam berabad-abad lamanya di ranah global. Itulah model utama Islamisasi dan dakwah Islam yang kemudian dikontekstualisasikan dalam pemikiran dan strategi dakwah dalam situasi kekinian di mana Islam dan kaum muslimin hadir secara membumi.

Islam masa depan sejalan dengan perkembangan zaman yang mengarah pada multikulturalisme yang membuana, meniscayakan transformasi yang kontinyu dari karakternya yang moderat dan kultural sekaligus beradaptasi dengan tuntutan dunia posmodern abad ke-21 yang

meniscayakan nilai-nilai baru yang maju dan inklusif. Dalam apresiasi Esposito (1997), pengalaman yang menakjubkan tentang Islamisasi kultural di Indonesia akan tumbuh memainkan peran dalam kepemimpinan di dunia Muslim. Majalah Time (23/9/1996), bahkan memprediksikan sebagai "The New Face of Islam", yang menerangi jalan menuju sebuah masa depan Islam yang besar.

Karenanya diperlukan transformasi yang dinamis antara persambungan Islam Indonesia di masa lalu dan kini ke masa depan yang adaptif pada perubahan menuju apa yang ditawarkan Tariq Ramadan (2004) sebagai muslim modern yang beradaptasi dengan lingkungan dia berada seperti menjadi Muslim Eropa, Muslim Amerika, dan sebaginya sehingga membumi di kawasannya. Islam perlu beradaptasi dengan lingkungan di mana kaum muslim hidup, bukan mengambil jarak dan berkonfrontasi, seperti kearifan pepatah Minang dan Melayu "Di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung". Islam yang membumi itu tentu tanpa terputus dari dan bahkan tetap terkoneksi dengan watak kesemestaan Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin.

Dalam transformasi baru itu boleh jadi perlu pula proses revitalisasi kultural dari Islam generasi awal yang cenderung kultus pada tradisi, patrimonial (relasi tuan-hamba), feodalistik (darah-biru), dan komunalitas (kerumunan) sebagaimana dilukiskam budaywan ternama WS Rendra sebagai budaya "kasur tua". Transformasi Islam tersebut sekaligus tidak mencerabut kebudayaan Indonesia secara serampangan dalam puritanisasi yang naif atau ekstrem. Proses transformasi dan revitalisasi Islam Indonesia yang mengindonesia, moderat, dan berkemajuan menjadi suatu keniscayaan jika Islam Indonesia berambisi menghadirkan model Islam ke pentas dunia dalam misi Islam rahmatan lil-'alamin.

Proses transformasi itu mensyaratkan umat Islam Indonesia tidak membiarkan dirinya bangga berlebihan pada Islam Indonesia aseli “kasur tua”, sebaliknya Islam “luar” yang angkuh diri dan mencerabut keindonesiaan. Bersamaan itu penting menghilangkan apa yang disebut Carol Kersten (2019) sebagai muslim apologetics dan siege mentality. Kondisi dan mentalitas yang merasa terkepung, terzalimi, marjinalisasi, dan situasi korban konspirasi hanya akan membentuk mentalitas “deprivasi relatif”, yakni perasaan terasing dan mengalami perlakuan buruk yang membentuk sikap reaktif-ekstrem. Kondisi tidak positif tersebut dapat menghilangkan kekuatan dan potensi kemandirian untuk hadir sebagai “umatan wasatha li-takunu syuhadaa ‘alan-nas” (QS Al-Baqarah: 143). Bukankah Nabi dan kaum muslimun juga berjuang dengan segala masalah dan rintangan yang sangat berat.

Proses transformasi Islam Indonesia yang membumi dan berkemajuan dapat mengurangi ketegangan dialektis yang selama ini terjadi dalam sejumlah fase sejarah dan perkembangan Islam Indonesia. Sekaligus membuka ruang sosiologis baru bagi rekonstruksi Islam Indonesia dalam memasuki dunia posmodern tanpa kehilangan karakter keislamannya yang mengindonesia dan keindonesiaannya yang Islami dengan tetap terkoneksi dalam watak universalitas Islam. Apalagi kini terjadi proses baru konvergensi Islam santri dan abangan maupun tradisional dan modern yang mengoreksi tesis dialektika Geertz. Optimisme harus dibangun menuju Islam Indonesia masa depan yang moderat, maju, dan membumi di negeri muslim terbesar ini.

Mudah-mudahan integrasi keislaman fase baru ini tidak terinterupsi oleh ledakan politik identitas dan letupan-letupan konflik politik ideologis di tubuh umat Islam maupun kebangsaan yang membuat arah gerak keislaman dan keindonesiaan menjadi mundur ke belakang. Di sinilah

pentingnya keseksamaan mengelola orientasi gerakan-gerakan Islam Indonesia era mutakhir yang sangat beragam plus dinamika kebangsaan yang sarat masalah. Kondisi pelik ini menuntut kearifan para elite muslim maupun elit bangsa pada umumnya untuk tidak mendaur-ulang sentimen-sentimen politik-ideologis era 1950-an yang semestinya dikubur bersama sebagai penanda hijrah umat Islam Indonesia gelombang baru. (Nashir, 2020)

Pemahaman Islam yang Terdegradasi Global

Pemahaman tentang Islam harus utuh dan komplit meskipun tidak begitu komprehensif dalam sisi amalannya. Islam mempunyai tiga konsep dasar dalam memahami nya, yakni sisi akidah, fiqh dan akhlak (tasawuf). Ketiga konsep ini sering menjadi sebuah ajang perdebatan yang tidak akan hentinya ketika pembahasan mengarah kepada sebuah sisi teologi dan madzhab yang saling adanya perbedaan. Masing-masing madzhab mempunyai cara dan corak dalam menekspresikan dan mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya dalam fiqh, kita di Indonesia sering memperdebatkan di arus kultural dengan pemahaman yang konfrontatif dan terkesan menyalahkan. Imam Hanafi dengan model ibadah yang tanpa qunut mencoba diperdebatkan dengan Imam Syafii yang memakai qunut. Metode sholat dengan gerak yang berbeda sudah menjadi perdebatan yang sudah tiada ampun. Ini menceritakan bahwa begitu tidak maunya individu untuk saling menerima dan membuka diri untuk berdiskusi dan saling memahami.

Islam sebagai agama yang besar dan mayoritas di negeri ini dan dunia harusnya bisa menjadi sebuah percontohan yang bisa membawa ke ruang-ruang perdamaian. Islam itu agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, Islam

itu agama yang indah, yang ramah. Menandakan bahwa Islam menjadi sebuah perajut dari kompleksitasnya agama dan problema yang dihadapi dari berbagai agama di belahan dunia maupun di Indonesia. Arus yang sering menjadi titik krusial ialah pada sisi akidah, meskipun fiqh dan tasawuf juga di perdebatkan. Penganutan daripada kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia mereka mempunyai sudut pandang masing-masing dalam penganutan dari ketiga konsep dasar tersebut.

Banyak kelompok Islam yang berdiri di Indonesia yang mengaliansikan kelompoknya menjadi penyebar Islam secara utuh dan sering disebut gerakan puritanisme Islam. Gerakan Islam yang termanifestasikan dalam sebuah kelompok Islam tersebut kadang hanya menggunakan pandangan akidah dan fiqh sebagai fundamen Islam. Akhlak atau tasawuf kadang tidak digunakan dalam kekuatan dasar dalam berislam. Karena ada beberapa pandangan yang mengartikan sisi tasawuf mengandung makna spiritualis yang kadang dipandang kelompok Islam puritan itu menyimpang. Sehingga sebagian kelompok Islam di Indonesia tidak menggunakan pandangan tasawuf dalam fundamentalitas Islam dalam kehidupan.

Tekstualis dan terkesan menekan ataupun menohok ke arah pemahaman fundamentalis Islam negatif itu yang sering digaungkan oleh beberapa kelompok-kelompok Islam yang mempunyai pemahaman kaku tentang Islam. Terkesan mereka sudah merasa benar dan menstigma kelompok Islam lain mengalami perubahan dan jauh dari kebenaran. Pemandangan ini menjadikan eksklusifitas dalam berislam bahwa pemahaman ini menjadi sudut pandang yang terpandang skriptualis yang kaku. Terutama pembahasan mengenai otoritas akal dan rasio yang sering menjadi pergumulan banyak kelompok karena dianggap tidak absoolut dan relatif.

Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa pemahaman tekstual adalah produk dari penalaran atas perkembangan yang cukup lama dalam tradisi Islam. Biasanya pemahaman tekstual dikontradiksikan dengan pemahaman rasional. Salah satu ungkapan yang masyhur *"barangsiapa memahami al-quran dengan rasio, maka ia akan masuk neraka.* Artinya, pemahaman yang benar dan bisa direkomendasikan ke surga adalah pemahaman tekstual. Pemahaman tekstual mengandaikan bahwa kebenaran yang mendapatkan legalitas dari Tuhan adalah kebenaran tekstual yang tidak terjamah oleh manusia. Kebenaran tersebut dianggap sebagai kebenaran absolut, sedangkan kebenaran kontekstual yang merupakan olah pikir, refleksi dan teoritisasi dari manusia dianggap sebagai kebenaran yang bersifat nisbi dan relatif. Pemahaman tekstual dianggap menggunakan penalaran Tuhan, sedangkan pemahaman konstekstual menggunakan penalaran manusia. Atas dasar itu, dipahami secara turun-temurun bahwa yang nisbi harus mengikuti yang absolut. (Novriantoni, 2004, hal. 27)

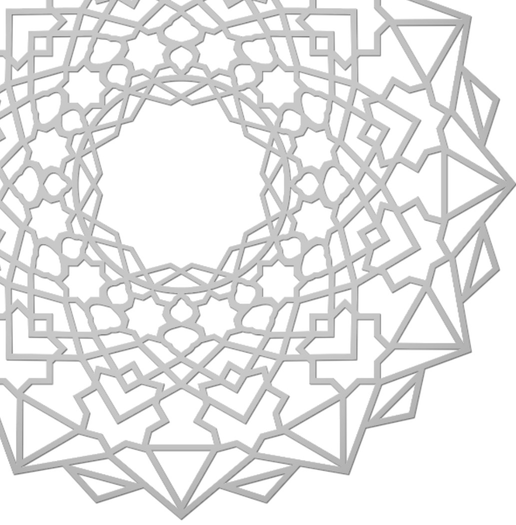
Pemahaman tentang Islam memang perlu dipribumisasikan oleh beberapa kajian yang bisa memberikan nuansa Islam yang ramah dan damai. Nampak pasca reformasi Islam mengalami sebuah kemunculan beberapa partai-partai Islam yang memberikan bentuk tekanan daripada kubu-kubu dan kelas sosial yang muncul. Islam yang memberikan perkembangan yang maju untuk keumatan menjadi jalan demokrasi dan rekonstruksi Islam yang berpolitik. Islam nampak menunjukkan sebuah nama baru dalam gelombang perpolitikkan negeri setelah usai Orde Baru berpangku. Keseriusan dalam menegakkan panji-panji Islam sudah terkonstruksi oleh beberapa pandangan tokoh-tokoh Orde Baru seperti Kahar Mudzakkar, Kartosuwiryo dan Daud Baureeh. Meskipun mereka tidak berhasil dalam membentuk amandemen yang legal, tapi mereka bisa memberikan gebrakan-gebrakan gelombang Islam untuk menjadi ideologi

Indonesia. Perjumpaan beberapa partai-partai telah menjadi sebuah pertemuan yang bisa memberikan daya tukar pikiran dalam membentuk dan menginisiasi ideologi dan kepemerintahan Indonesia usai Orde Baru. Antara nasionalis, sosialis dan Islamis menjadi sebuah roda-roda politik untuk menggerakan bangsa dan negara ini menjadi negara sebagai arah baru dalam menuju peradaban negara yang maju.

Di Indonesia berkembang begitu banyak kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan kelompoknya ialah Islam yang putih, lurus dan murni. Namun, mereka realitasnya banyak mengatakan banyak kelompok Islam di Indonesia ini prakteknya bukan Islam seperti di Arab. Nah ini, ini yang menjadi sebuah perbincangan yang menstigma bahwa Islam yang ada di Indonesia itu salah bahkan sesat. Banyak kelompok-kelompok Islam yang lahir dengan nuansa seperti itu, tetapi praktenya mereka tiada akhlak yang berbudi dengan melihat perbedaan. Klasifikasinya ialah bukan kesamaan dengan kultur dan arus yang sama pula, akan tetapi melihat kontek yang menjadi sebuah rajutan dalam membumikan Islam ke wilayah yang menjadi lokus Islam itu hadir. Persinggungan ini yang menjadi perdebatan panjang mengenai aliansi Islam yang murni, tapi tidak mencontohkan akhlak dan budi yang baik dalam melihat kemajemukan.

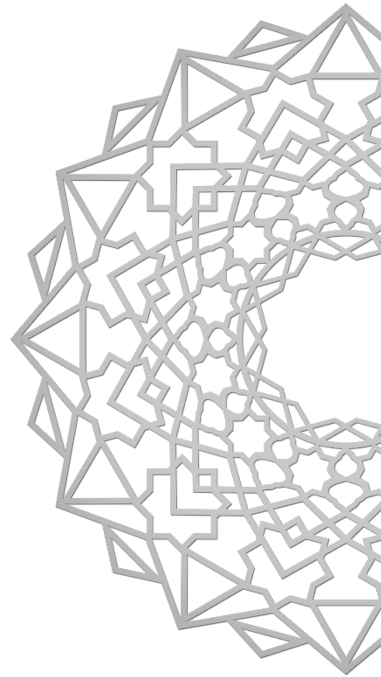
Kemudian ini perlu yang namanya rekonstekstualisasi akan makna dan nilai-nilai Islam yang indah dan harmonis. Sejatinya Islam itu mengayomi bukan menindaki dengan keras. Ayat pedang jangan sampai digunakan ditempat yang bukan tempatnya, itu akan menjadi kesalahkaprahan yang tak berujung damai. Makna yang bisa diserap dan bisa ambil hikmahnya ialah ujaran para wali, ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara ini dengan cara yang inklusif dan damai, bukan urak-urakan dan saling menyalahkan karena tidak ada kesamaan seperti Islan yang ada di Indonesia dengan Islam yang ada di tanah Arab. Jangan

membawa sebuah konsep budaya kehidupan Islami dalam budaya kehidupan di Indonesia dengan penuh keragaman budayanya. Sikap saling menghargai ialah cara jitu nomor satu dalam menghalau berbagai konspirasi yang negatif akan sandaran mengenai konflik konteks yang mencoba melihat kesamaan dari sudut pandang yang berbeda.[]



Bab VIII

Primordial antara Tradisionalis dan Modernis



Penggunaan diksi tradisionalis menyudutkan kepada sebuah organisasi Islam di Indonesia yang bergerak pada arus tradisi yaitu Nahdlatul Ulama. Ketika pula membincangkan modernis tak penyandaran yang masif ialah terdapat pada organisasi Islam progresif yaitu Muhammadiyah. Pemilihan dua di antara puluhan organisasi Islam yang ada di Indonesia, penulis memilih yakni NU dan Muhammadiyah sebagai rujukan awal dalam mengawal pintu moderasi dan gerakan Islam yang wasathiyah. Arah yang semakin maju dan arus globalisasi media yang semakin canggih, banyak kemudia ujar kebencian dan sudut menyudutkan antara pihak satu dengan yang lainnya menjadi sebuah bahan kemenangan di negeri ini.

Penyeimbangan akan sebuah narasi damai dalam membangun peradaban umat agama di Indonesia harus menjadi sebuah pintu utama untuk membangun keharmonisan. Dalam arus keislaman yang masif dan menjadi gerak roda di Indonesia ini ialah antara NU dan Muhammadiyah. Primordial dan arus kultural yang masih terjaga akan marwah pada masing-masing kedua kelompok tersebut. NU yang mempertahankan menjadi oranisasi yang mampu mengejawantahkan arus globalisasi yang masih mempertahankan kekulturalan dalam menguri-uri budaya dan tradisi masyarakat Indonesia dengan mengakulturasi dengan nuansa Islami.

Pada corak pemikiran di NU masih merawat kesanadan hingga guru sesepuhnya sebagai jalan dan keberkahan akan ilmu untuk masa depan. Marwah yang dimiliki NU di bidang pemikiran ini tidak lain untuk melestarikan sanad dengan sesepuh guru. Pada nuansa bangunan bahwa NU memiliki kekhasan dalam menggembleng para kaumnya yakni dengan pondok pesantren sebagai lembah tidar dalam mendidik para kader-kader kyai, ustad masa depan untuk Islam yang berhaluan *ahlusunnah wal jamaah an-nahdliyah* yang menyebarkan Islam bernuansa damai, sejuk, inklusif dan

ramah. Kader-kader ini di gembleng akan ilmu-ilmu, dan amal-amal untuk menzuhudkan para santri untuk negeri.

Sedangkan Muhammadiyah yang merupakan organisasi Islam yang mempunyai platform Islam berkemajuan memberikan narasi damai dan moderat yang senantiasa untuk membangun peradaban umat Islam yang berkemajuan. Adapaun persinggungan dengan umat lain di Indonesia ini, Muhammadiyah juga memberikan *feadback* yang baik dan inklusif. Gerakan yang hendak dilakukan Muhammadiyah di masa awal, gerakan yang kaku dan saklek dalam melihat realitas Islam yang ada di Indonesia kala itu. Kubangan sekitaran Yogyakarta pada waktu masih dengan praktik Islam dan kaum abangan yang kental akan arus budaya yang menyimpang. Sangat kentara sekali bahwa kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menyuarakan sebagaia gerakan modernis, puritan dan berkemajuan. Banyak sandangan yang dilontarkan terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.

Muhammadiyah yang getol menyuarakan sebuah gerakan yang bernuansa modern dan berkemajuan ini mempunyai banyak julukan. Herman L. Beck melaporkan bahwa Muhammadiyah mempunyai banyak label dalam sebuah gerakan Islam, seperti gerakan puritan, gerakan reformis, gerakan revitalis, gerakan fundamentalistis, gerakan ortodoks, gerakan modernis, dan ada pula yang menyebutnya gerakan pembaharuan. (Beck, 2018, hal. 12). Sehingga nampak berdegradasi komplek dalam tubuh Muhammadiyah mengenai penyematan label-label tentang gerakan-gerakan Islam kepadanya.

Arus Moderatis Gerakan NU dan Muhammadiyah

Moderat ialah penyematan yang pas dan cocok untuk di labelkan kepada gerakan Islam ini, yakni NU dan Muhammadiyah. Pada dasarnya bahwa pendiri-pendiri daripada gerakan ini antara NU dan Muhammadiyah ialah bukan orang-orang biasa. Dalam pendirian organisasi Islam ini, antara KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asyari mempunyai jalan dan jalur yang berbeda, karena melihat konteks dan realitas keadaan masyarakat Indonesia. Esensi dan substansi dari berdirinya perkumpulan antara NU dan Muhammadiyah tidak lain ialah mensyiarkan Islam yang lurus dengan metode penyampaian ala masing-masing ulama.

Karena keadaan Jombang dan sekitarnya pada waktu itu ialah masyarakat desa, KH. Hasyim Asyari mensyiarkan Islam dengan arus tradisionalis sebagai jalan yang dirasa ialah bentuk tanpa adanya kekerasan dalam mengajarkan Islam. Konteks yang ada di Kauman pada waktu itu ialah perkotaan, KH. Ahmad Dahlan dalam menyiarkan Islam ialah dengan nuansa yang modernis dan berkemajuan. Nampak jelas, bahwa sekolah yang dulunya di bangun dengan konsep metode seperti ala Islam dengan ngaji duduk di lantai, tapi dengan konsep berpikir majunya KH. Ahmad Dahlan maka konsep ngaji tradisional beralih menggunakan bangku dan ala Belanda.

Pada dasarnya ialah antara KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asyari mempunyai tujuan yang sama, tapi semua tujuan itu harus bisa tersampaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat waktu itu. Dalam arus sejarahnya bahwa KH. Ahmad Dahlan bergabung dengan Boedi Oetomo sebuah organisasi nasional terpelajar yang bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan ini, juga mempunyai tujuan untuk menyeimbangi

gerakan-gerakan Belanda di Indonesia. Melihat realitas masyarakat Kauman pada waktu itu butuh yang namanya sebuah wadah atau perkumpulan Islam terstruktur, kemudian setelah belajar di Boedi Oetomo dan mengajar di *Kweekschool Gubernamen* di Jetis milik Belanda, KH. Ahmad Dahlan memiliki inisiasi untuk mendirikan perkumpulan bernuansa Islam, kemudian tercetuslah Muhammadiyah. Sehingga madrasah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di rumahnya ialah menggunakan cara dan metode pengajaran ala Belanda yakni menggunakan bangku dan papan tulis.

Dari sini sangat kentara bahwa KH. Ahmad Dahlan mengambil konsep pendidikan ala Belanda yang kemudian dikolaborasikan dengan konsep pendidikan ala Islam yakni Madrasah, yang kemudian berdirilah sekolah modern dengan nuansa madrasah Islamiyah. Ini merupakan bentuk kemajuan dalam bidang pendidikan yang menjadi salah satu tujuan utama dari KH. Ahmad Dahlan dalam menyiarkan Islam dari pendidikan, sebagai langkah awal dan gerbang untuk mengentaskan kebodohan.

Adapun dalam perjalanan KH. Hasyim Asyari dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan di Jombang. Banyak kemudian sebuah halang rintang, dari mulai tidak diperbolehkannya oleh seorang ayah yakni Kyai Asyari untuk mendirikan pesantren di Jombang. Namun, tekad yang kuat kemudian KH. Hasyim Asyari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang sebagai lembaga pendidikan Islam yang tradisional yang menirukan konsep para wali songo dalam mensyiarkan Islam. Kemudian juga persinggungannya dengan Belanda, yakni ketika pesantren sudah berdiri, oleh Belanda pesantren menjadi sasaran untuk di hancurkan karena menjadi sarangnya pemberontak kaum Belanda. Sehingga Belanda curiga terhadap keberadaan pesantren KH. Hasyim Asyari.

Dalam konsep pendidikan yang di komandekani oleh KH. Hasyim Asyari dengan nuansa ala pesantren yakni KH. Hasyim Asyari tidak menghilangkan sama sekali suatu metode ala pesantren, tapi KH. Hasyim mengajarkan bahasa-bahasa asing kepada santrinya. Jadi metode pesantren ialah dengan konsep akulturasi ataupun kolaborasi seperti yang KH. Ahmad Dahlan lakukan. Hanya saja beda pada metode dan konsep secara kelembagaan. Namun, dengan tujuan yang sama yakni mengentaskan para umat Islam dari kebodohan, dengan mendirikan lembaga pendidikan ala Indonesia ialah kunci untuk merangkul semua kaum di Indonesia, bukan hanya kaum elit yang bisa merasakan sekolah, tapi sekolah bisa dirasakan oleh semua kaum di Indonesia, terutama umat Islam.

Ruang Moderat NU dan Muhammadiyah untuk Negeri

NU dan Muhammadiyah menjadi sebuah pintu gerbang dalam membangun peradaban Islam yang moderat dan wasthy. Keindahan Islam di Indonesia nampak ketika umat agama lain juga menyapa dalam keharmonisan atas majemuknya agama dan madzhab di negeri ini. Juga NU dan Muhammadiyah yang saling beriringan senantiasa menjaga keutuhan NKRI ini dengan kekuatan ideologi Pancasila sebagai penopang utama dalam membingkai pluralitas agama dan paham. Yang sebenarnya masih banyak ulasan mengenai organisasi Islam selain NU dan Muhammadiyah yang juga ikut serta dalam menyuarakan akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI ini.

Menurut Hatim Gazali bahwa memang benar antara NU dan Muhammadiyah berhasil menjadikan Islam wasathy sebagai langgam keberislaman masyarakat Muslim pada umumnya di Indonesia. Lihat saja dalam sejumlah tradisi yang masih tetap eksis di kampung-kampung. Bukan

saja mengakui kebhinekaan tradisi lokal, tapi Islam menjadi sebuah sapaan dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan bungkus kebudayaan dan tradisi masyarakat lokal. Perlu kemudian adanya sebuah keseimbangan antara pergerakan NU dan Muhammadiyah dalam melihat tantangan kedepan terhadap arus globalisasi media.

Misalnya Muhammadiyah, tidak boleh menganggap cukup dengan hanya menggarap pendidikan dan rumah sakit dengan mengabaikan dakwah di media sosial. Jika ini terjadi, lembaga-lembaga pendidikan dan rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah akan diisi oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Muhammadiyah. Begitu juga dengan NU, kemampuan penetrasi ke media sosial perlu semakin dikencangkan agar semakin media sosial kita tidak terisi dengan polusi kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan negara. Sehingga perlu adanya sebuah keseimbangan dalam bertarung secara offline maupun online. Ini tentunya merupakan jihad besar. Adapun manfaatnya tentu akan kembali kepada seluruh bangsa Indonesia, yaitu tatanan keberagamaan yang moderat, terbuka, berbasis pada pribumisasi dan berprespektif kemajuan. (Gazali, 2020, hal. 8-10).

NU dan Muhammadiyah menjadi sebuah garda untuk membangun sebuah peradaban maju dan berkepribumian. Harapan sebuah negara dengan gugusan bangsa yang majemuk, membuat keberagaman madzhab, etnis menjadi keharusan dalam kesatuan untuk kemajuan. Rumus untuk memberikan kemajuan antarpemeluk agama ialah sisi di mana *truth claim* harus bisa di hindarkan. Sisi teologis menjadi sisi yang amat sangat sensitif ketika harus di bincangkan dengan kaula-kaula yang fanatis kepada satu titik. Harusnya banyak warna, ialah menjadi penghias dengan beragamnya warna, tapi ironisnya malahan dijadikan ladang untuk ujar kebencian.[]

Santri Untuk Negeri

Santri menjadi salah satu regenerasi dunia Islam yang memberikan sebuah konstribusi dalam intelektual Islam dan penentu arus kemajuannya. Pengadopsian istilah daripada santri sering muncul pada pesantren-pesantren berhaluan moderat dan tradisional. Namun, di era peradaban Islam Indonesia ini, penyebutan santri bukan lagi sebuah doktrinal hanya milik pesantren dari kalangan kaum Sunni Moderat. Akan tetapi lebih jauh lagi bahwa santri sudah menjadi nama yang tak lagi dianggap tabu dan dianggap kaum kolot, kaum bawah, abangan, tradisional, tidak tau apa-apa, tapi hari ini santri bangkit membuktikan dalam dunia Islam sebagai arus di era peradaban baru dalam menyongsong masa depan Islam di Indonesia yang berkemajuan dengan haluan kenusantaraan. Sehingga kata santri juga di sematkan pada kaum-kaum yang sedang belajar di kalangan kaum modernis dan kalangan Islam yang berhaluan kemoderenan.

Santri juga mempunyai peran penting dalam kemajuan Islam di Indonesia maupun di belantika dunia keislaman dan keintelektualan Islam dunia. Ada istilah *"dari santri untuk negeri"* sekarang adopsi kata ini sudah merebak ke berbagai belahan dunia pendidikan Islam, baik pesantren maupun madrasah yayasan, yang ingin mencetak kader-kader bangsa dengan julukan "santri". Santri sebagai revolusi peradaban dalam meletakkan pondasi dasar membangun era yang semakin mengglobal. Mempunyai tujuan dan fungsi bukan pada arus di mana penjamahan dalam dunia keislaman, namun juga merambah ke dunia keduniaan yang bermanfaat untuk masa depan.

Dalam artian santri sudah membuka peluang diri, sudah membuka jalan diri, bahkan sebuah lembaga yang menaunginya juga mempersilahkan bahwa santri bisa berbahasa mancanegara. Edukasi pun bermacam-macam,

organisasi pun beragam, dan bahkan dari kalangan manapun. Mereka sudah mempersiapkan sebagai bagian dari pemikir dunia Islam yang akan mengembangkan peradaban Islam yang mungkin bisa mencontoh peradaban masa Abbasiyah, atau masa periodesasi sejarah Islam abad pertengahan. Lebih jauh lagi bahwa santri bukan hanya berkutat seputar perjalanan seorang anak yang belajar di pesantren, tapi perjalanan tersebut ada sisi spiritualitas juga ada sisi materialis.

Di Indonesia sudah ribuan pesantren berdiri dengan jumlah santri yang mumpuni dengan lulusan yang juga terdapat saluran untuk masuk perguruan tinggi dengan jalur beasiswa santri. Alokasi pemerintah juga semakin melihat sosok pemimpin bangsa yang mempunyai latar belakang santri. Kemenag pun sudah membentuk lembaga pendidikan pesantren dan UU tentang pesantren pun sudah teramandemen. Sehingga semakin nyata bahwa santri mempunyai peran untuk memakmurkan negeri, dan sudah nampak bahwa banyak santri yang menjadi bagian pemikir untuk kemajuan negeri ini dengan mendudukan dan mendakukan diri sebagai pengatur kebijakan komponen-komponen di negeri ini.[]

Distinsi yang Negatif

Perdamaian merupakan sebuah cara yang paling arif dalam merajut keharmonisan untuk masa depan kehidupan yang beragam. Terutama antarpemeluk agama yang semakin runyam dan eksklusif dalam beragama. Banyak umat agama yang saling menindas satu sama lain karena tujuan kebenaran sepihak untuk legalitas yang masyhur. Misalnya Islam yang tertindas di negeri seberang, seperti Islam Uyghur di Cina, Islam Rohingnya di Myanmar, Islam di India dan akhir-akhir ini di negara Prancis, Islam di boikot. Sehingga beberapa produk untuk tidak di jual belikan, bahkan

perayaan tradisi Islam di Prancis dilarang. Dampaknya dirasakan hingga ke Indonesia.

Perbedaan yang menjadikan hidup ini, jangan kemudian saling menyudutkan dan ambil peran kebenaran dalam sisi teologis. Kesalahan itu yang nampak, sehingga julukan fanatis beragama itu yang ada. Fanatis boleh, tapi jangan ke arah legalitas pada amalan pribadi. Islam saja dengan berbagai madzhab pada taraf amalan mereka semua berbeda-beda. Namun, pada tujuan akhirnya mereka ialah untuk ibadah kepada Allah swt. Hanya saja pemaknaan yang berlebihan itu dilabelkan pada kelompok yang berinovasi lebih sampai-sampai menggunkan dalil baik al-quran maupun hadits. Kelompok yang terintrogasi teologis juga tidak segan-segan mengeluarkan dalil serupa sebagai penguat dasar kegiatan.

Pada titik ini, dipastikan tidak akan diketemukan sebuah cahaya terang dalam hidup berdampingan baik intra agama maupun antarumat agama. Kebenaran yang sudah pasti ialah nampak pada-Nya. Yang terjadi bukan malah sebuah perdamaian sosial, tapi konflik sosial karena tekanan psikologis-religius. Karena membincangkan agama atau madzhab itu vital dan sensitif. Di era post-modern ini menjelang generasi Z, era di mana banyak kaum yang sudah mulai enggan menjadi pejuang agama, terutama agama Islam malah memilih untuk menjadi pejuang rebahan.

Islam sendiri sudah bangkit menjadi sebuah garda yang memberikan sumbangsih yang begitu banyak untuk kemajuan keumatan. Secara mayoritas di Indonesia juga mayoritas di dunia, Islam tetap menunjukkan dan mempertahankan sebuah haluan Islam yang *wasathiyah* meski banyak di sisi lain kelompok-kelompok keras atas nama Islam masih melakukan tindakan kekerasan dengan ngebom sana dan sini demi jihad yang eksklusif.

Persinggungan ini juga tertera antara Islam dan Barat sebagai dampak konflik dan munculnya narasi *islamphobia*.

Jhon L. Esposito melaporkan bahwa Barat seyogianya mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama teroris. Namun, Islam dapat dibajak kelompok-kelompok militan yang kecewa terhadap tatanan politik yang tidak adil. Jhon L. Esposito kemudian menggarisbawahi bahwa kelompok radikal bukanlah satu-satunya representasi Muslim. Masih sangat banyak kelompok-kelompok yang lebih memprioritaskan jalan dialog daripada benturan antarperadaban. Karena Barat berpandangan bahwa Islam itu seperti nampak apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris, sehingga julukan *islamphobia* yang di gagas oleh Barat dan istilah terorisme nampak terlabelkan kepada Islam. (Masduqi, Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama, 2011, hal. 165).

Islam lagi-lagi menjadi sasaran yang menjadikan sebuah perpecahan antarbangsa, seperti di Prancis baru-baru ini. Perancis yang memberikan perlakuan keras terhadap Muslim dengan beberapa kegiatan di bubarkan. Negara Barat nampak menunjukkan kembali sebuah gerakan-gerakan yang sifatnya menyudutkan Islam. Sehingga yang menjadi problema, ketika konflik ini terbawa hingga ke Indonesia maka akan berdampak panas. Indonesia yang beragam suku, agama, budaya dan bahasa dipastikan mereka juga menyadari akan perlakukan terhadap saudara nya. Namun, semua jangan sampai bisa masuk menjadi pamungkas negatif yang mengancurkan ideologi kesatuan ini.

Membangun Peradaban Islam yang Harmonis

Peradaban Islam di Indonesia bukan sebuah titik yang hanya mengulas, menghafal akan satu sisi saja. Harus bisa melangkah pada tahap aksi dan gerakan yang semakin massif akan sikap dan nilai-nilai pembangunan bangsa. Islam sendiri harus bangkit menjadi sebuah arus peradaban yang membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik dengan beberapa problema yang riskan akan persinggungan mengenai agama. Faisal Ismail melaporkan yang mengancam sebuah kesatuan dalam sebuah kehidupan berbangsa dan beragama, setidaknya ada tiga, *pertama,* agresif sebagian pemeluk agama dalam kehidupan di dalam masyarakat yang hanya diri sendirilah yang benar. *Kedua,* organisasi-organisasi lebih mengedepankan kuantitas jamaah daripada kualitas pribadi jamaah. *Ketiga,* disparitas sosial-ekonomi antarpemeluk agama yang masih ada. (Ismail, Islam, Konstitusional dan Pluralisme; memperkuat fondasi kebangsaan dan merawat relasi kebhinekaan, 2019, hal. 299).

Keharmonisan harus tetap terjaga dalam membangun Indonesia yang sejahtera dan sentosa. Indonesia dengan agama mayoritas Islam setidaknya bentuk kedewasaan dalam bertindak dan berpikir harus menunjukkan keindahan dalam hidup beragama. Islam sendiri mempunyai sebuah makna yang indah, ramah dan damai, sehingga perbedaan agama, budaya, suku dan bahasa bukan sebuah problem yang akut bagi Islam. Peradaban Islam di Indonesia harus menunjukkan titik temu tersendiri dengan negara-negara lain. Jangan hanya mencontoh tapi harus bisa menemukan titik yang beda agar bisa merefleksikan realitas yang bisa membawa peradaban Islam di Indonesia yang indah dan inklusif.

Islam sebagai agama yang besar dan mayoritas, jangan mempunyai stigamasi pada agama lain di Indonesia ini sebuah doktrin kesalahan. Pelabelan itu akan membawa pada emosi sesaat yang berdampak konfik beberapa abad. Islam yang dibawa masuk ke Indonesia ialah Islam yang ramah, toleran dan damai. Islam Indonesia itu Islam yang *wasathiyah*, yang melihat perbedaan dengan gerak di tengah-tengah. Dengan kemayoritasan jumlah, jangan sampai memarjinalkan minoritas kelompok, yang nantinya timbul diskriminasi dan eksklusifisasi dalam beragama maupun bersosial. Islam dengan konsep tengah-tengah, harus terus membumi di tanah Indonesia ini dengan memberikan gambaran Islam yang ramah, damai dan indah serta yang berkemajuan.

Islam sebagai agama yang indah, ramah dan damai terkhusus di Indonesia ini, nampak jelas pada Islamisasi oleh para wali songo atau ulama lain yang menyebarkan Islam di Nusantara kala itu. Betapa tidak, sebelum Islam datang agama Hindu-Budha sudah duduk dan bersinggahsana lama di Nusantara ini. Bahkan mereka juga ada yang tidak beragama, maupun mereka mendirikan agama mereka sendiri sesuai nenek moyang mereka yang disebut kepercayaan lokal, yang juga sebagian dari mereka masih eksis di era post-modern ini. Islam yang mengakui akan hal-hal yang berbeda di Indonesia bisa menempatkan posisi di tengah-tengah dengan membangun keharmonisan bukan kebencian.

Islam yang indah, ramah dan damai begitu nampak jelas pada peran para penyebar agama Islam kala itu. Budaya, agama, suku yang ada di Indonesia dalam Islamisasi tidak semua budaya yang ada di tanah Nusantara ini di hapus. Mereka mencoba meleburkan dengan merubah semua isinya dengan nuansa Islam. Akulturasi ini bukan mencampur adukan, dalam artian para wsli songo maupun ulama lain, mencoba melihat kegemaran masyarakat Nusantara pada waktu itu, sehingga mereka mencoba

mempengaruhinya dengan kegemarannya itu sambil memasukan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Karena tidak semua elemen masyarakat waktu itu menerima kehadiran bentuk yang aneh pada pakaian para pensyiar Islam itu, sehingga harus menggunakan metode-metode yang unik dan indah sebagai pendekatannya. Sehingga apakah pernah terjadi sebuah konflik atau cara kekerasan yang hendak mereka sampaiakan kepada masyarakat dalam mengajarkan Islam.

Karena para wali dan penyebar agama Islam lain, mempunyai latar belakang keilmuwan dalam mengajak untuk masuk Islam. Ada yang fokus pada bidang fiqih, karena masyarakat sudah bisa diajak untuk mudah dalam mengenal Islam. Ada ulama yang fokus pada bidang akhlak (tasawuf) sisi mistik Islam; karena masyarakat waktu itu masih menyukai hal-hal yang bersifat klenik, magis dan mistis. Namun, pada waktu itu mistis dalam Islam itu bukan mistis seperti dukun, tapi lebih seperti karomah dan kelebihan akan waliyullah sebagai bekal untuk Islamisasi.

Namun, di era abad 18-20 an bahwa banyak kelompok Islam yang lahir di bumi Indonesia ini sebagai arus gerakan Islam. Baik dari sisi politik, sosial keagamaan, kelahiran itu mencoba untuk mengahadirkan kemerdekaan di kaki bawah kebangsaan ini sebagai perwujudan dalam membangun nasionalisme dan religiusitas di Indonesia. Perihal budaya-agama menjadi problema agama dalam inovasi dalam bergama yang dikatakan bid'ah. Pelabelan kelompok Islam yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalitas, dianggap menyimpang, bid'ah dan ujaran-ujaran lainnya yang tidak sama seperti apa ketika era abad ke-2 H era Rasulullah saw.

Puritanisme yang sudah masuk ke Indonesia melalui kelompok-kelompok Islam menjadi sangat keras ketika melihat kearifan lokal di

Indonesia yang berbalut Islam. Semua yang berkaitan dengan lokal, budaya dan seni dianggap salah, dan tidak ada benarnya sama sekali. Bentuk kesaklekan yang negatif ini akan berdampak perpecahan di Indonesia ini. Buka kemudian para wali itu sudah mempertimbangkan bagaimana arus dalam Islamisasi yang digunakan sebagai media untuk mengembangkan Islam, bukan untuk di salahkan. Banyak kelompok-kelompok Islam yang berdiri dengan haluan puritan, revitalitas, fundamentalis, hanya untuk memberikan tabrakan dalam keislaman di Indonesia.

Sehingga bagaimana kemudian peradaban Islam di Indonesia menjadi kelompok agama Islam yang mayoritas bahkan terbesar di dunia, harus bisa memberika ecara kualitas yang etos dan ramah bukan hanya kuantitas tapi saling menjatuhkan. Indonesia yang akan menjadi arah baru Islam di dunia, harus bisa menunjukkan keindahan dalam beragama. Jangan hanya saklek pada kubangan tektualis, tapi bisa mengejawantahkan raelita dengan data dan daya kemampuan yang ada. Islam di Indonesia sebagai Islam yang tengah, indah dan ramah bisa menjadi salah satu rumus Islam di seluruh dunia. Secara teknologis mungkin Indonesia kalah dengan negeri jiran, tapi dalam humanistiknya, kebebasan intelektual, liberalisasi pemikiran Indonesia nampak lebih terbuka dan bahwa Indonesia sudah mampu menciptakan wadah-wadah membangun humanis untuk dunia dengan aliansi-aliansi komunitas *humanity, gender dan social*. (Qomar, Fajar Baru Islam Indonesia? kajian komprehensif atas arah sejarah dan dinamika intelektual islam nusantara, 2012, hal. 196). Inilah rangsangan bahwa peradaban Islam yang harmonis harus bisa terbangun untuk Indonesia maju.[]

Membangun Keluarga yang Harmonis

Keluarga merupakan negara terkecil yang memberikan sebuah bestari dalam sebuah kisah kasih antara ayah, ibu dan anak. Keluarga adalah tempat yang menjadi luapan keluh kesah ketika kita dan semua ada masalah. Jangan ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi agar tidak tersimpan menjadi sesuatu yang grundel. Keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan arah baru dan awal sebuah anak untuk terjun menjadi diri yang mandiri. Ada sangkut pautnya seorang anak dan keluarga dan masa depannya. Berikan mereka semua dengan bimbingan dan edukasi yang benar, terutama akhlak dan budi pekerti.

Anak menjadi sebuah manifesto untuk seorang orang tua kedepan, terus dukung yang menjadi *passion*nya jangan malah menjatuhkan. Yang terpenting apa yang digelutinya itu berdampak baik untuknya dan masa depannya. Sejak dini sudah terbekali, dengan apa? Dengan sebuah didikan yang benar, ajak ibadah setiap hari, dan ajarkan tata cara berdoa, agar terbiasa anak itu berdoa untuk dirinya, orang tuanya dan orang sekitarnya. Dengan itu mereka secara agama akan mendapat dukungan yang indah dan komprehensif. Pengembangan di luar itu, bisa kemudian digali dengan belajar bersama, jangan mengajarkan untuk mencontek, mengerjakan soalnya, biar anak berpikir dengan soal-soal yang dihadapinya agar mereka terbiasa dengan hal-hal kesulitan yang harus mereka pecahkan. Ketika mereka sudah tidak bisa dan kemudian sebagai orang tua harus bisa mengarahkan dan membantunya.

Pendidikan dari sebuah keluarga yang harmonis akan melahirkan sebuah kehidupan dalam masyarakat luas berdampak baik. Setiap keluarga mempunyai rumus dan cara bagaimana kehidupan rumah tangganya nampak bahagia. Terutama pendidikan moral anak untuk terus menggali

potensi dirinya kelak dan menjadi bekalnya. Representasi dari sikap orang tua ke anak harus nampak membangun, bijak dan edukatif, bukan malah menekan dan marah. Pembicaraan yang arahnya dalam pembangunan mental-spiritual atau mental-jasmaniah anak itu juga menjadi penting. Pembangunan mental-spiritual anak dengan mengajaknya untuk sholat, ibadah dan doa bersama, mengajak sosial, mengajak mengaji dan bersedekah. Pembangunan mental-jasmaniah anak dengan mengajak untuk pentingnya menjaga tubuh sehat dengan tidak memakan atau minum barang yang tidak ada manfaatnya, olahraga setiap hari, bersih-bersih sambil olahraga. Semua bisa disiasati untuk pembangunan mental dan karakteristik anak sebagai perisai diri untuk kehidupan setiap hari.

Gerakan Deradikalisasi dari Keluarga

Radikal itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai diksi dalam kasus agama, maknanya akan lebih runyam. Namun, berpikir radikal sangat boleh dianjurkan sebagai jalan untuk mengulas secara mendalam mengenai konsepsi dalam menelaah menangani kasus. Radikalisasi sudah menjadi sebuah gambaran yang keras dan kasar. Dipastikan radikalisasi akan merebak ke arah aksi terorisme. Terorisme sudah pasti radikal, tapi radikal belum tentu teroris. Dalam kaitan mengenai sebuah aksi terorisme yang kemudian menjadi aksi keras sering meresahkan masyarakat. Sering dilabelkan bahwa terorisme ada kaitanya dengan Islam, padahal tidak semua representasi Islam itu indentik dengan keras.

Keluarga merupakan lokus yang paling kecil dalam meramu kehidupan sosial bermasyarakat dan beragama. Kehidupan di dalam keluarga harus bisa kondusif dan saling menjaga keharmonisan. Perbedaan dalam keluarga jangan menjadi sebuah perselisihan, misalnya dalam keluarga ada yang beragama selain Islam, bukan kemudian memprovokasi

ini dan itu. Namun, satukan dengan keindahan yakni kumpul bersama membincangkan keseruan keluarga, cerita tentang dahulu, dan masih banyak lagi yang tujuannya untuk membangun keluarga yang utuh dalam menangkal *bullying* terhadap anak dan kasus-kasus yang tidak diinginkan.

Dari keluarga akan kemudian merambah dalam kehidupan di luar yang semakin luas. Pendidikan bisa di mulai dari keluarag apapun itu. Proses yang di jalani sebagai satu rantai dalam keluarga ialah saling menguatkan dan memberikan pengetahuan untuk memperkuat pondasi negara dengan melalui program dari keluarga yang saling support untuk kemajuan dan keharmonisan keluarga.

Intelektual Muslim Indonesia dalam Membangun Masyarakat Madani

Gagasan yang arif dan bijak sering didengar dan dibaca oleh kita semua dari sebuah gagasan-gagasan yang humanis-harmonis. Khusunya para pemikir Islam Indonesia yang mempunyai sejumlah pandagan dan gagasan yang luar bisa mengenai masyarakat madani-pluralistik di Indonesia ini. Dalam pandangan penulis, meneropong jejak para intelektual Islam di Indonesia yang sering mengangkat isu-isu humanis penulis memberikan label humanis-sosial-religius. Yang mana mereka sering aktif menulis dan menjadi sorotan yang luar biasa akan perkembangan Islam maupun pandangan tentang madzhab keislaman.

Isu-isu yang sering menjadi sentralistik dalam penulisan ialah mengenai politik, pemikiran Islam, gerakan sosial, pluralitas agama, humanis-religius. Kepenulisan tersebut dalam kategori studi Islam yang sering masif diangkat di studi luar negeri. Meskipun studi ini membahas mengenai Islam, tapi banyak kalangan yang belajar dan menuntutnya di

studi-studi non-Islam. Ini yang pernah timbul dalam permasalahan negeri ini terkait sebuah penulisan profesi tentang keislaman dengan latar belakang studi Islam di kampus-kampus non-Islam. Pandangan mereka sering dianggap resah seperti pemikiran tentang *sekular, westernisasi, sinkretis*, tapi mereka tetap berkarya dalam jumlah yang luar biasa, sebagai manifestasi perjumpaan ruang dan waktu yang tidak tahu bahwa dunia kesilaman harus tahu isu-isu globalisasi tentang Islam di negeri luar.

Misalnya seperti tulisan dan pandangan pemikiran dari Nurcholis Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Din Syamsudin, Mulyadhi Kartanegara dan masih banyak lagi. Yang mana mereka para intelektual Islam tersebut terlahir dari kalangan-kalangan akademisi yang mempunyai sumbangsih pemikiran pembaharuan dalam Islam. Tulisan-tulisan yang sering mengarah kepada paham-paham humanis yang di branding dalam nuansa Islami ini sering menuai problema karena dianggap sekular dan sinkretism. Namun, sebenarnya dalam hemat penulis bahwa pandangan-pandangan mengenai diskursus humanis-sosial-religius tersebut ditulis sebagai perwujudan dalam membentuk dan membangun toleransi dan keharmonisan daripada realitas negeri ini akan majemuknya agama, budaya, etnis dan bahasa sebagai perihal pemersatu bangsa.

Seperti yang diungkapkan oleh Gus Dur bahwa ketika belajar agama carilah sisi kemanusiannya, pun Ir. Soekarno juga mengatakan *Mankind Is One*-Kemanusiaan ialah Satu. Bahwa sudah nampak jelas bahwa dalam beragama-apapun agamanya, coba cari sisi di mana makna kemanusiaan sebagai ranah damai sebagai implikasi dari pembelajaran terhadap agama untuk manusia. Karena tanpa kita semua pelajari dalam beragama dari sisi kemanusiaannya tidak akan ada sebuah makna keharmonisan yang akan muncul sebagai realitas dalam pengejawantahan kata *tasamuh* dalam hidup berdampingan.

Sebagai intelektual Islam yang mempunyai pemikiran terhadap isu-isu Islam-Humanis menjadi sebuah tulisan yang hangat untuk terus dibaca, termasuk dalam mengulas pada makna masyarakat madani di Indonesia. Dalam orientasinya pembahasan masyarakat madani sering menjadi perbincangan yang asik dalam arus bawah sebagai pembentukkan kemandirian masyarakat terhadap negara. Cicero dalam Masykuri bahwa masyarakat madani dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat berhadapan dengan negara. Alferd Stephen pun melaporkan daripada definisi masyarakat madani ialah sebuah arena tempat berbagai gerakan sosial (himpunan ketatanegaraan, kelompok wanita, keagamaan, intelektual), serta organisasi sipil dari semua kelas (ahli hukum, wartawan, serikat buruh dan usahawan) berusaha menyatakan diri dalam suatu himpunan sehingga mereka dapat mengeskpresikan diri mereka sendiri dan memajukan pelbagai kepentingan mereka. Masyarakat madani tidak sebuah perwujudan kemandirian masyarakat, tapi juga terdapat nilai-nilai kehidupan seperti, keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan. (Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia, 2011, hal. 75).

Persinggungan Makna Demokrasi di Indonesia

Demokrasi menjadi sebuah langkah yang memberikan sebuah pemahaman bagi negeri yang mayoritas Muslim dengan pemikiran neomodernisme dan puritanisme. Keadaan bukan menjadikan sebuah konsep yang dianggap menyatukan tersebut fatal. Beberapa pandangan memang sempat menjadi riskan akan makna demokrasi bagi Indonesia. Pasalnya dengan mayoritas Muslim yang berpenghuni sehingga asumsi bahwa konsep pemerintahan ini dari negeri Barat. Memang konsep tersebut dari Barat, tapi di bawa ke Indonesia bukan untuk menghilangkan segala keberadaan penghayat yang sudah singggah lama di negeri ini. Ungkapan

yang sering menjadi problema bahwa demokrasi tidak cocok dengan tamah air Indonesia. Sehingga pemahaman lain masuk dan berungkap apakah kemudian menggunakan konsep khilafah juga bisa akan mudah diterima? Belum tentu. Karena Indonesia merupakan negara yang pluralistik, multikulturalistik, beragam, orang-orangnya, pemikirannya, budayanya, agama, etnisnya bahkan logat bahasanya mereka pun berbeda. Dalam kedua sisi yang saling bersinggungan itu terdapat sebuah konsep tengah yang menjadi sebuah jembatan yang memberikan sumbangsih untuk peradaban kehidupan seluruh umat agama di Indonesia, yakni demokrasi dengan rumus nasionalis-religius. Mereka akan terbangun dan cinta terhadap tanah airnya dan cinta dengan agamanya. Dengan sudah cinta dengan negara dan agamanya, umat agama lain pun harus bisa dirangkul bersama untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama hidup berdampingan di negeri pluralistik Nusantara ini.

Demokrasi yang dikonsep oleh negeri Barat kemudian diadopsi sebagai sistem kepemerintahan di Indonesia juga mengalami berbagai tahapan seleksi. Dengan melihat mayoritasnya Islam di negeri ini, apakah kemudian konsep sekularisme menjadi sistem yang diterima? Belum tentu, karena mayoritas Muslim di negeri ini, tidak akan mudah setuju untuk menggunakan konsep sekular sebagai sistem di negeri ini. Begtiu juga ketika menggunakan pandangan syariat Islam sebagai dasar sistem pemerintahan di negeri ini apakah kemudian bisa diterapkan? Belum tentu, karena di negeri ini banyak umat agama lain yang berteduh di payung Indonesia ini. Jadi dua pandangan yang saling bersinggungan itu, menjadi pemecah dan perumus konsep demokrasi sebagai pengejawantahan daripada negeri ini dengan majemuknya agama, suku, ras, budaya.[]

SUMBER RUJUKAN

Abdillah, M. (2011). *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Abdullah. (2014). Hubungan Agama Dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan. *(Jurnal Politik Profetik, Vol.4, No.2.)*.

Akhrani, L. A. (2018). Front Pembela Islam: Menggali Akar Konflik Beragama Ditinjau dari Fanatisme Agama, Prasangka Agama dan Intensi Konflik. *(Jurnal Fenomena: Psikologi, Vol. 1, No. 1 Juli 2018)*.

Amal, M. K. (2015). *Islam Dan Nation-State: Memetakan Kembali Pergulatan Ideologi Kebangsaan Islam Indonesia dalam Reaktualisasi Pancasila Menyoal Identitas, Globalisasi, Dan Diskursus Negara-Bangsa.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Amal, M. K. (2015). *Kelas Menengah NU.* Jember: STAIN Jember Press.

Amal, M. K. (2018). *Membendung Arus Radikalisme AgamaKonstestasi Islam Moderat Versus Islam Radikal.* Jember: STAIN Jember Press.

Amal, M. K. (2020). Explaining Islamic Populism In South East Asia: An Indonesian Muslim Intellectuals Perspective. *Journal of Critical Reviews, 7*(5).

Amal, M. K. (2020). Towards A Deliberative Conflict Resolution? A Reflection On State Inclusive Response To Sunni-Shi'a Tension In Indonesia's Democracy. *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies, 8*(2), 230.

Arifinsyah, S. d. (2018). *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI.* Jakarta: pt prenada kencana.

Aslati. (2012). Toleransi antar umat beragama dalam perspektif Islam (suatu tinjuan Historis). *(Jurnal Toleransi,Vol 4, No 1, 2012.UIN.SUSKA.2012)*.

Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi* . Jakarta: Prenadamedia Group.

Basri, M. (2015). Hukum Demokrasi Dalam Islam. *(Jurnal Suhuf, Vol.27, No. 1.)*.

Beck, H. L. (2018). *Fenomenologi Islam Modernis: Kisah Perjumpaan Muhammadiyah dengan Kebhinekaan Prilaku Beragama.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Enginner, A. A. (2000). *Devolusi Negara Islam.* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR .

Gazali, H. (2020). Tantangan Islam Wasathy di Media Sosial . *jalandamai.org*, 8-10.

Hakiki, K. M. (2016). Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia. *(Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1, No.1.)*.

Hanafi, I. (2018). Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama. *(Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2018)*.

Hayati, N. (2017). Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Quran Perspektif Komunikasi.. *(Jurnal Episteme, Vol. 12 No. 1 Juni 2017)*.

Hidayat, K. (2015). Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila. *(Jurnal Sosioteknologi, Vol. 14 No. 2 Agustus 2015)*.

Ismail, F. (2014). *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama.* Bandung: Rosda Karya.

Ismail, F. (2019). *Islam, Konstitusional dan Pluralisme; memperkuat fondasi kebangsaan dan merawat relasi kebhinekaan.* Yogyakarta: IRCiSoD.

M. Khusna Amal, D. &. (2020). *ISLAMIC POPULISM AND DEMOCRACY IN POST-NEW ORDER INDONESIA.* Yogyakarta: Spasi Book.

Masduqi, I. (2011). *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama.* Bandung: PT Mizan Pustaka.

Misrawi, Z. (2017). *Al-Quran Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin.* Jakarta: pustaka oasis.

Muhtador, M. (2016). Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah (Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan). . *(Jurnal Esoterik: Akhlak dan Tasawu, Vol. 2 No. 1 / 2016).*

Novriantoni, Z. M. (2004). *Doktrin Islam Progresif Memahami Islam sebagai Agama Rahmat.* Jakarta: LSIP Jakarta.

Nurdin, A. A. (2016). Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam Dan Demokrasi. *(Jurnal Review Politik, Vol. 06, No. 01).*

Nurdin, A. A. (2016). Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam Dan Demokrasi. *(Jurnal Review Politik, Vol. 06, No. 01).*

Qomar, M. (2012). *Fajar Baru Islam Indonesia: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara.* Bandung: PT Mizan Pustaka.

Rodin, D. (2016). *Islam dan Radikalisme;Telaah atas ayat-ayat kekerasan dalam Al-Quran.*

Safa'at, M. A. (2018). *Dinamika Negara dan Islam Dalam Perkembangan Hukum Dan Politik Di Indonesia.*. Jakarta: Konpress.

Simorangkir, J. (2015). Islam Pasca Orde Baru. *(Jurnal Istinbath, Vol 14, No 16 Juni 2015).*

Sudrajat, A. (2009). Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah. *(Jurnal Informasi, Vol. 35 No. 2/2009).*

Suhendra, A. (2015). Khilafah Perspektif Ahmadiyah: Studi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Gondrong, Tangerang, Banten. *(Jurnal NDO-ISLAMIKA, Vol. 5 No. 2 Juli –Desember 2015).*

Sukamto, A. (2013). Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru:Dari Konflik Perumusan Ideology Negara Sampai Konflik Fisik. *(Jurnal Teologi Indonesia Vol 1 No 1 Juli 2013).*

Wahyuni. (2014). Islam dan Demokrasi. *(Jurnal Politik Profetik, Vol 4 No 2 Tahun 2014).*

Widodo, S. A. (2007). Islam dan Demokrasi Pasca Orde Baru. *(Jurnal UNISIA Vol 30, No 65 September 2007).*

Winengan. (2005). Wacana Intelektual Muslim Indonesia Tentang Kompatibilitas Islam Dengan Demokrasi. *(Jurnal Ulumuna, Vol. 19, No. 2, 2005).*

Yusalia, H. (2016). Dinamika Penerapan Khilafah Sebuah Tinjauan Sosio-Historis. *(Jurnal Wardah, Vol. 17 No. 2 Juli-Desember 2016).*

Internet

Baso, A. (2020). *https://www.nu.or.id*. Retrieved September Selasa, 2020, from https://www.nu.or.id: https://www.nu.or.id/post/read/122856/ahmad-baso-sebut-ada-kekeliruan-tafsir-sejarah-khilafah-di-nusantara

https://ampkompas.com.cdn.ampproject.org. (2013). Retrieved Oktober Kamis, 2019, from https://ampkompas.com.cdn.ampproject.org.: https://ampkompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2013/12/02/2202341/MUI.2013.Lima.Konflik.Keagamaan.Terjadi.di.Jember

https://id.wikipedia.org/. (2020). Retrieved September Rabu, 2020, from https://id.wikipedia.org/.: https://id.wikipedia.org/wiki/Khilafah#Struktur_Pemerintahan_Khilafah

https://news.detik.com. (2020). Retrieved September Selasa, 2020, from https://news.detik.com.: https://news.detik.com/berita/d-5145155/lubang-sejarah-film-jejak-khilafah,

https://republika.co.id. (2020). Retrieved September Selasa, 2020, from https://republika.co.id: https://republika.co.id/berita/qfogjo385/jejak-khilafah-di-nusantara-sakralisasi-dan-yang-tersingkir

Nashir, H. (2020, September senin). *Facebook*. Retrieved November Selasa, 2020, from https://www.facebook.com/100004998490507/posts/1774505152726084/?app=fbl

Sihombing, R. F. (2020, agustus selasa). *detik news*. Retrieved oktober kamis, 2020, from detik.com: www.news.detik.com

tribunnews.com. (n.d.). Retrieved Oktober 2019, from tribunnews.com: Laporan Bidpenum Puspen TNI, Kapten Inf Suwandi. Kerukunan Umat Beragama Perekat Persatuan Bangsa. Diakses tribunnews.com

TENTANG PENULIS



Nama Ahmad Zainuri sering dipanggil Zain, pernah punya nama pena Ahmad Sultan. Lahir di Jember, 19 Desember 1997. Buku-bukunya yang telah diterbitkan antara lain*: Indahnya Relasi Sosial: Hubungan Relasi Sosial Muslim dan Kristiani di Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember,(*CV.Mudilan Group, 2020)—merupakan sebuah naskah dari S-1, *Merajut Keharmonisan Dalam Bingkai Kemajemukan Agama di Indonesia*, (CV. Kanaka Media, 2020), *Narasi Perdamaian Membangun Keharmonisan Antarpemeluk Agama di Indonesia,* (CV, Prabu21, 2020). Sekarang aktif di Duta Damai Jatim sebagai Blogger. Sekarang sedang melanjutkan studi Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



الادارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926


BHINNEKA TUNGGAL IKA



Pohon Tua
Pustaka